

**Proses partisipasi masyarakat dalam proyek penanggulangan  
kemiskinan di perkotaan (studi kasus di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol  
Kabupaten Sukoharjo)**

**TESIS**



**Oleh:**

**Ramli**

**S.6203009**

**Program Studi Penyuluhan Pembangunan  
Minat Utama: Ilmu Penyuluhan Pembangunan**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2007**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI PERKOTAAN  
(Studi kasus Di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo)**

di susun oleh:

Ramli

S. 6203009

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Sunarwan**

**Drs. Mahendra Wijaya, M.S**

Mengetahui  
Ketua Program Pasca Sarjana  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

**Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.**



## **PERNYATAAN**

Nama : Ramli  
NIM : S. 6203009

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus Di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, Juli 2007

Yang membuat pernyataan,

**Ramli**

## MOTTO

Ø *Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.*

*(Q.S. Al Baqarah: 147)*

Ø *Janganlah anda menyesali kegagalan yang anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain, akan tetapi akutilah sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat perbuatannya sendiri.*

Ø *Janganlah memandang siapa yang berbicara tetapi pandanglah dan resapilah apa yang dibicarakan.*

## **PERSEMBAHAN**

**Tesis ini dipersembahkan kepada :**

Ø *Istriku dan Anak-anakku tercinta*

Ø *Almamaterku tercinta*

## **ABSTRAK**

**Ramli, 2007, PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROYEK  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN  
(Studi Kasus Di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten  
Sukoharjo)**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah partisipasi masyarakat terhadap Proyek penanggulangan kemiskinan diperkotaan (P2KP)?; (2) Apakah sasaran pelaksanaan Proyek penanggulangan kemiskinan diperkotaan (P2KP) sudah tepat?. Penelitian dilakukan dengan tujuan: (1) Untuk mengetahui bagaimana Proses partisipasi masyarakat terhadap proyek P2KP tersebut; (2) Mengetahui apakah pelaksanaan proyek P2KP sudah tepat sasaran.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bersifat deskriptif, Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan model analisis interaktif.

Hasil penelitian: (1) Keterlibatan masyarakat dalam merencanakan P2KP dalam bidang fisik, ekonomi, dan monitoring telah diwujudkan dalam kegiatan nyata yang berupa ikut sertanya warga dalam menyusun rencana-rencana kerja, membuat refleksi kemiskinan dan ikut memetakan kondisi masyarakat yang ada dengan melalui rapat-rapat yang dilakukan oleh BKM, partisipasi lainnya dalam proses perencanaan adalah keterlibatan warga masyarakat dalam menentukan program yang harus dikembangkan dalam menanggulangi kemiskinan khususnya di desa Langenharjo. Kegiatan awal yang dikerjakan oleh warga adalah dengan mempersiapkan para pelaku termasuk di dalamnya adalah para sukarelawan; (2) Masyarakat desa Langenharjo telah berperan aktif dalam bidang pembangunan fisik, ekonomi dan sosial. Dalam bidang fisik warga masyarakat desa Langenharjo bersama dengan UPL (Unit Pengelola Lingkungan) telah mampu melaksanakan pembangunan berupa pengecoran jalan dan pembuatan saluran air, dalam bidang ekonomi warga masyarakat Desa Langenharjo telah melakukan beberapa kegiatan ekonomi diantaranya terbangunya kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan usaha kecil, dalam bidang sosial secara nyata masyarakat Desa Langenharjo telah memiliki kesadaran bersama untuk membantu warga yang tergolong miskin dalam yang diwujudkan bentuk pasar murah; (3) Partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap P2KP secara nyata telah diwujudkan oleh warga masyarakat dalam menyusun pelaporan, yang mana dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan proyek masyarakat selalu ikut terlibat, sehingga secara langsung warga masyarakat dapat mengawasi jalannya pelaksanaan proyek. Pelaporan lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh panitia pada setiap rapat warga di tingkat RT memberikan gambaran nyata, bahwa warga masyarakat ikut terlibat langsung dalam mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan P2KP.

Kata kunci: Proses Partisipasi, P2KP

## **ABSTRACT**

**Ramli, 2007, SOCIETY PARTICIPATION PROCESS IN PROJECT OF  
POORNESS HANDLING IN URBAN AREA  
( Case Study In Countryside Langenharjo District of Grogol  
Sub-Province Sukoharjo)**

Problem formula in this research is: (1) How society participation in project of handling poorness of urban area ( P2KP); (2) What is execution target of this project of handling poorness of urban area ( P2KP) have precisely. Research done with a purpose to: (1) To know how society participation process in project of the P2KP; ( 2) Knowing what is execution of this project of P2KP have zero in on.

Research done in District of Grogol Sub-Province Sukoharjo, by using qualitative approach, having the character of is descriptive, used Analysis technique in this research is descriptive qualitative analysis, by using model analyse interactive.

Result of research: (1) Involvement of society in planning P2KP in the field of physical, economic, and monitoring have been realized in reality activity which is in the form of joining in of citizen in compiling jobplans, making poorness reflection and follow to map the condition of existing society through donemeeting by BKM, other participation in course of planning is involvement of society citizen in determining program which must developed in overcoming poorness specially in Langenharjo countryside. Early activity done by citizen is by drawing up all perpetrator of this including in it is all volunteer; (2) Society Langenharjo countryside have shared active in the field of physical developing, social and economic. In the field of Langenharjo countryside society citizen physical along with UPL (Environmental Unit Organizer) have been able to execute development in the form of moulding walke and making of aqueduct, in the field of Countryside Langenharjo society citizen economics have donesome economic activity among others its self-supporting group of society in small industry management, in the field of social manifestly Countryside Langenharjo society have owned awareness with to assist impecunious pertained citizen in which is realized by cheap market form: (3) Participation society in evaluate to P2KP manifestly have been realized by society citizen in compiling reporting, which in compiling report result of execution of this project of society always follow to involve, so that directly society citizen can observe the way execution of this project. Oral reporting and also written submitted by committee in each citizen meeting in neighbour fondation storey; level give real picture, that society citizen follow to involve direct in observing and giving evaluation to P2KP execution.



Keyword: Process Participation, P2KP

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	iv
Motto.....	v
Persembahan.....	vi
Abstrak .....	vii
Abstract .....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar .....	xiii
Kata Pengantar .....	xiv
<b>BAB I            PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II            LANDASAN TEORI.....</b>	<b>5</b>
A. Kajian Teori .....	5
B. Kerangka Dasar Pemikiran .....	65

BAB III	METODE PENELITIAN.....	66
	A. Lokasi Penelitian.....	66
	B. Metodologi.....	66
	C. Teknik Sampling .....	66
	D. Sumber Data dan Jenis Data .....	66
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	67
	F. Validitas Data.....	67
	G. Analisis Data.....	68
BAB IV	SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN .....	70
	A. Sajian Data.....	70
	1. Deskripsi Umum wilayah Kecamatan Grogol.....	70
	2. Data penduduk berdasarkan jenis kelamin dan mata pencaharian tahun 2006.....	73
	3. Diskriptif Wilayah Penelitian Langenharjo.....	74
	4. Partisipasi masyarakat terhadap Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) .....	77
	B. Pembahasan .....	99
	1. Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pembangunan Fisik P2KP.....	99
	2. Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Ekonomi.....	124
	3. Peran Masyarakat dalam bidang Sosial .....	132

BAB V	PENUTUP.....	142
	A. Simpulan .....	142
	B. Implikasi .....	142
	C. Saran .....	145

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 2006 .....	73
Tabel 4.2.	Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian tahun 2006.....	74
Tabel 4.3.	Deskriptif wilayah Langenharjo berdasarkan kelompok umur penduduk .....	75
Tabel 4.4.	Deskriptif wilayah Langenharjo berdasarkan kelompok jenis pekerjaan penduduk .....	76
Tabel 4.5.	Deskriptif wilayah Langenharjo berdasarkan agama.....	77
Tabel 4.6.	Daftar RKM di Desa Langenharjo dalam perencanaan P2KP tahun 2006 .....	78
Tabel 4.7.	Realisasi Kegiatan pembangunan fisik di Desa Langenharjo proyek P2KP tahun 2006 .....	83
Tabel 4.8.	Dana bergulir “BKM Berkah Makmur” di Desa Langenharjo dalam perencanaan P2KP tahun 2006.....	88
Tabel 4.9.	Daftar warga pra sejahtera desa Langenharjo Kecamatan Grogol tahun 2006 yang memperoleh kupon.....	93
Tabel 4.10.	Kendala dan Upaya Mengatasi Pembuatan Saluran air di Desa Langenharjo dalam perencanaan P2KP tahun 2006 .....	97

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Dasar Pemikiran.....	65
Gambar 2	Analisis Model Interaktif .....	69
Gambar IV.1	Gambar Peta Wilayah Grogol .....	72

## **KATA PENGANTAR**

**Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Proses Partisipasi Masyarakat Dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi Penyuluhan Pembangunan.**

**Terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena penulis menghaturkan penghargaan setinggi-tingginya kepada:**

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Magister Program Studi Penyuluhan Pembangunan.
2. Prof. Dr. Sunarwan, selaku pembimbing I yang telah membimbing dalam penulisan tesis ini.
3. Drs. Mahendra Wijaya, M.S., selaku pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan tesis ini.
4. Segenap pengelola dan segenap dosen Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.

5. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. penulis menyampaikan terima kasih.

**Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan. Penulis menyampaikan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan keridloan kepada kita semua. Amin.**

Surakarta, Juli 2007

Penulis



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A Latar Belakang**

Masalah kemiskinan di Indonesia saat ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, dan mata pencaharian yang tidak menentu. Melalui Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, pemerintah telah berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat perkotaan untuk mewujudkan pemulihan kondisi ekonomi adalah dengan menyelenggarakan program, P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan).

Dari hasil pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan tersebut menunjukkan perkembangan yang positif, khususnya dalam hal terwujudnya kelembagaan masyarakat lokal yang mandiri, yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Badan ini dipercaya sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan sebagai pemeduli terhadap kemiskinan di komunitasnya. Membangun kelembagaan masyarakat yang mengakar perlu dilakukan, agar setelah masa proyek berakhir, upaya penanggulangan kemiskinan di perkotaan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat (Tim Persiapan P2KP, 2004)

Perlu disadari bahwa pelaksanaan program P2KP tersebut pada kenyataannya masih terdapat berbagai hal yang belum diakomodasi dalam konsep dan strategi pelaksanaan P2KP saat ini, sehingga memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dalam pelaksanaan berikutnya.

Persoalan dasar kemiskinan sebenarnya hanya dapat ditanggung oleh masyarakat sendiri, sehingga cukup jelas bahwa peran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proyek P2KP cukup berarti dalam pencapaian tujuan. Kebersamaan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli kemiskinan lainnya menempati posisi yang sangat strategis dalam penyiapan kemandirian masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Konsep penting P2KP adalah pelaksanaan dan pengelolaan program sepenuhnya diarahkan pada “Upaya Peningkatan Kemampuan Masyarakat” untuk melaksanakannya, sedangkan unsur birokrasi lebih diarahkan “fungsi pemampu (*Enabler*) yang memfasilitasi terciptanya iklim kondusif, sehingga seluruh potensi masyarakat dapat berpartisipasi aktif mengelola dan melaksanakan program ini secara maksimal. Dengan demikian dalam P2KP ini “masyarakat sasaran” adalah pelaku utama (Subjek) dan bukan hanya penerima manfaat yang pasif (Objek), agar masyarakat sasaran dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pelaksanaan program, maka diperlukan pengembangan berbagai instrumen yang mendukung serta memungkinkan terjadinya proses partisipasi, yang pada tahap awal diupayakan melalui perwujudan dan dapat berfungsinya badan partisipasi masyarakat.

Proyek penanggulangan kemiskinan diperkotaan yang merupakan prakarsa pemerintah guna mengatasi persoalan kemiskinan diperkotaan yang dirancang dengan pemahaman “penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan melalui aplikasi pendekatan partisipatif guna mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran secara nasional dan regional, maka diperlukan pemahaman proses dari pelaksanaan partisipasi yang handal dan bermodel, sehingga dapat membantu pengelolaan proses partisipasi tersebut. Penekanan pada pemahaman proses partisipasi masyarakat tentunya melalui perbaikan peran dan tanggungjawab dalam menemukan dan mengenali tuntutan kebutuhan lokal, dalam rangka merumuskan langkah lokal lalu melaksanakannya.

Pemberian modal usaha untuk peningkatan ekonomi serta memberi bantuan sarana dan prasarana dasar kepada kelompok masyarakat miskin diperkotaan adalah bentuk kepedulian pemerintah yang bersifat “memfasilitasi” berjalannya “proses partisipasi masyarakat”. Dengan memberikan sumber daya yang memadai dan pemahaman pada aspek “partisipasi” maka timbul indikasi pendekatan partisipatif yang dapat menjadi penguatan ditingkat masyarakat, hal mana diharapkan dapat terbentuk sosok masyarakat yang mampu mengorganisasi diri dan mampu mandiri serta peduli terhadap persoalan serta berkelanjutan.

## **B Perumusan Masalah**

Masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimanakah partisipasi masyarakat terhadap Proyek penanggulangan kemiskinan diperkotaan (P2KP)?
- 2 Apakah sasaran pelaksanaan Proyek penanggulangan kemiskinan diperkotaan (P2KP) sudah tepat?

### **C Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan yang akan dikaji, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1 Mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat terhadap proyek P2KP tersebut.
- 2 Mengetahui apakah pelaksanaan proyek P2KP sudah tepat sasaran.

### **D Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah

- 1 Memberi masukan kepada pihak terkait yang menjalankan serta *leading sector* dari proyek P2KP tersebut.
- 2 Memberi masukan sebagai kajian ulang terhadap pelaksanaan proyek P2KP yang telah dijalankan
- 3 Sebagai pengembangan ilmu penyuluhan pembangunan di Indonesia umumnya dan khususnya disiplin ilmu penyuluhan pembangunan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pembangunan Masyarakat**

Pembangunan masyarakat merupakan pembangunan perubahan sosial yang direncanakan (*planned social change*) yang terwujud dalam berbagai program dan kegiatan-kegiatan yang ditunjukan untuk masyarakat. Hakekat pembangunan masyarakat adalah *community base development* atau pembangunan masyarakat dari bawah (*bottom up*). Ditinjau dari sisi pemerintah (*government*), pembangunan masyarakat merupakan hasil dari perencanaan sistematis dari atas yang menempatkan masyarakat sebagai pelaksana subyek pembangunan (Hikmat, 2001: 66). Pembangunan tidak hanya melakukan pendekatan yang bersifat top down, tetapi bottom up, dua pendekatan ini menuntut partisipasi aktif dari masyarakat.

Menurut Sulistyani (2004: 37) ada dua pendekatan dalam pembangunan yang dilakukan selama ini, yaitu pendekatan *top down* dan *bottom up*. Pendekatan *top down* merupakan pendekatan yang bersumber pada pemerintah dan masyarakat sebagai sasaran atau obyek pembangunan. Sebaliknya pendekatan *bottom up* adalah pembangunan atau pusat perubahan sehingga terlibat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dan bukan lagi sebagai hanya sebagai obyek pembangunan yang bersifat pasif.

Pembangunan dari bawah (*bottom up planning*) merupakan pendekatan perencanaan pembangunan yang patriotis. Yaitu, sesuatu perencanaan pembangunan yang bukan sekedar didasarkan atas usulan lembaga birokrasi pemerintahan dan tingkat yang terbawah atau yang didasarkan pada hasil konsultasi antara aparat-aparat perencanaan pada dua atau lebih tingkatan birokrasi pemerintahan yang berbeda sebagaimana yang dikemukakan oleh suparno (1981), melainkan suatu perencanaan yang memiliki ciri-ciri (Soetrisno, 1981) menyatakan:

- a. Melibatkan ide-ide atau inisiatif yang tumbuh dari bawah (sektor non pemerintahan) dan meluas masuk ke atas ke dalam birokrasi pemerintahan.
- b. Adanya *bargaining power* masyarakat dalam perencanaan pembangunan (jika perlu menolak proyek-proyek yang direncanakan pemerintah, jika tidak cocok atau memerlukan pengorbanan masyarakat yang terlalu besar)
- c. Adanya sikap para perencana untuk melihat proses perencanaan sebagai *learning process* atau belajar dari pengalaman masyarakat setempat.

## **2. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Pengembangan masyarakat dalam kegiatan PPK diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat (Modul Pelatihan pra tugas Fasilitator

Desa, 2002). Menurut Pranaka dan Moeljarto (dalam Priyono dan Pranaka 1996: 56) konsep pemberdayaan (*empowerment*) sendiri merupakan ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri.

Kata pemberdayaan (*empowerment*) mengandung arti adanya sikap mental yang tangguh atau kuat. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individu maupun kolektif kelompok. Tetapi karena proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial atau status hirarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dimiliki sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Priyono, 1996: 138). Pemberdayaan tidak hanya penguatan individu anggota kelompok atau masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya, seperti pertanggung jawaban, keterbukaan, pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip PPK. Pembangunan partisipatif adalah suatu proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengawasan pembangunan.

Karena konsep pemberdayaan lebih menekankan masyarakat sebagai subyek, maka konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) yang dikemukakan oleh Korten (dalam Tjokrowinoto, 1955: 25) dapat dipandang sebagai salah satu konsep pemberdayaan. Adapun konsep yang dikemukakan Korten adalah manusia

dipandang sebagai masyarakat harus mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberdayakan (*empowerment*) atau kekuatan (*strengthening*) kepada masyarakat (Mas'ood dalam Mardikanto 2003: 83). Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan (*survive*) dan (dalam pengertian yang dinamis) mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena itu, memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk terus menerus meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bahwa yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Menurut Mardikanto (2003) memberdayakan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin) untuk partisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya. *Empowerment* atau pemberdayaan secara singkat dapat diartikan sebagai upaya memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*).

Selama ini, pemberdayaan merupakan *the missing ingredien* dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang aktif dan kreatif. Secara



sederhana pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses ke kontrol dan sumber hidup yang penting. Bagaimana memberdayakan masyarakat merupakan suatu masalah tersendiri yang berkaitan dengan hakikat dari *power* (daya, serta hubungan antar individu atau lapisan sosial yang lain) (Friedman, 1992: 32).

Menurut Kartono (2004: 40) berbicara masalah pemberdayaan, masyarakat lebih melihat pada benefit (keuntungan) apa yang akan didapat dengan adanya program yang akan diadakan. *Empowering* (pemberdayaan) membutuhkan waktu yang sangat lama, dimana inti dari pemberdayaan tersebut adalah agar masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Istilah yang lebih tepat apabila kita membicarakan pemberdayaan, adalah pemberdayaan komunitas, bukan masyarakat. Karena ada komunitas lebih kelihatan “*self of belonging*” nya, sehingga akan lebih jelas dan lebih parsial, sehingga yang diharapkan mereka lebih partisipatif.

Pengembangan masyarakat merupakan suatu upaya untuk merubah kondisi sosial, ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik dengan mengembangkan potensi masyarakat. Jadi pemberdayaan lebih baik mengutamakan pada perbaikan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, menggali potensi sosial ekonomi dan pembuatan sarana-sarana sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan, agar mereka mandiri serta mengembangkan kemampuannya dalam memperbaiki

kualitas hidup. Memberdayakan diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

### **3. Pembangunan Dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Hikmat (2001) konsep terbaik dalam pembangunan masyarakat adalah kemauan dan kesungguhan untuk mengintegrasikan antara konsep *community organization* (pengorganisasian komunitas) dan *community development* (pengembangan komunitas) sebagai satu kesatuan yang saling komplementer. Dua konsep tersebut dapat digabungkan menjadi konsep baru yang disebut sebagai *community buildy*. Konsep *community buildy* yaitu konsep pengembangan sekaligus pengorganisasian masyarakat secara bersamaan dan bersinergi.

Kartasasmita mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat, dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan bawah. Ketiga, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat bawah (Priyono, 1996: 105).

Ini dari pemberdayaan adalah adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi mensyaratkan adanya suatu kelompok masyarakat yang kuat dan mandiri, yang selanjutnya kelompok tersebut mampu mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan, kepentingan ekonomi, sosial, kesehatan, lingkungan dan kesejahteraan hidup mereka dalam proses pembangunan. Adapun kelompok sasaran yang diorganisir adalah kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap rentan dan tidak memiliki akses terhadap proses pembangunan. Rentan tidak berarti mereka yang miskin saja, akan tetapi juga kelompok grass-root dalam arti sosial budaya (Kartono, 2004: 40). Dengan demikian upaya pemberdayaan merupakan suatu upaya menumbuhkan peran serta dan kemandirian sehingga masyarakat baik ditingkat individu, kelompok, kelembagaan, maupun komunitas memiliki tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, memiliki akses pada sumberdaya, memiliki kesadaran kritis, mampu melakukan pengorganisasian dan kontrol sosial dari segala aktivitas pembangunan yang dilakukan dilingkungannya.

Hubungan pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat sangatlah penting dan saling menunjang. Keberdayaan masyarakat menjadi suatu hal yang realitis untuk dicapai dalam pembangunan. Diharapkan masyarakat dapat mandiri, mampu mengelola program dan mampu mengorganisir dirinya.

#### **4. Peranan Kelompok Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**

Menurut Hubeis (1992: 143) menyatakan bahwa kondisi awal era pembangunan nasional berencana adalah masyarakat pedesaan Indonesia yang menderita bencana sejarah kolonial sehingga terkena penyakit involusi, yaitu kehilangan dinamika dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang pembangunan dengan karsa dan karya sendiri. Kondisi masyarakat pedesaan seperti itu menjadi kendala bagi pembangunan ekonomi nasional karena mereka tidak responsif terhadap isyarat pasar yang memberikan peluang untuk maju. Sistem ekonomi pasar dan kemampuan masyarakat pedesaan untuk menjadi pelaku ekonomi pasar yang dinamik belum berkembang di pedesaan.

Sejarah perkembangan ekonomi modern di Indonesia dimulai dengan intervensi kolonial mengusahakan beberapa komoditi pertanian yang diminta pasar internasional. Kemudian diikuti dengan masuknya perusahaan pertanian besar (ekonomi pasar) ke pedesaan yang dirancang untuk memanfaatkan sumber alam dan potensi tenaga kerja kasar atau kuli dengan upah murah. Hal ini menimbulkan involusi, yaitu masyarakat yang statis yang berjuang untuk tidak tenggelam dalam gelombang pasang surut perekonomian yang melanda mereka. Masyarakat pedesaan yang demikian, bukan merupakan masyarakat yang mampu berperan positif dalam pembangunan ekonomi. Akibatnya adalah berkembangnya sistem ekonomi dan masyarakat dualistik ekonomi yang dualistik itu kaidah-kaidah ekonomi pasar tidak sepenuhnya berlaku.

Dengan masyarakat pedesaan (ekonomi pertanian rakyat) yang belum berwawasan ekonomi pasar (nasional apalagi internasional), ternyata tekad Pemerintah RI sejak awal kemerdekaan untuk meningkatkan produksi pangan (beras) dan pertanian pada umumnya tidak didukung dengan sistem operasional atau *modus operandi* yang menjamin implementasi tekad dan program pemerintah. Dalam upaya membangun sistem operasional untuk menggerakkan petani ke arah implementasi program nasional (pembangunan ekonomi khususnya pertanian dan lebih khusus lagi beras), Indonesia telah mengalami penyelenggaraan pembangunan dengan dasar pandangan ekonomi liberal, terpimpin, dan ekonomi pasar berencana. Ternyata, baik *modus operandi* ekonomi liberal (sebelum 1959) maupun ekonomi terpimpin (1959-1965), tidak berhasil mengembangkan sistem produksi yang mampu mewujudkan program nasional.

Kata kunci yang menjadi tolok ukur *modus operandi* tiap program pembangunan adalah partisipasi rakyat (masyarakat). Namun, sistem liberal maupun sistem ekonomi terpimpin tidak berhasil mendapat respon partisipatif dari masyarakat pedesaan (petani), karena ekonomi (masyarakat) Indonesia adalah masyarakat dualistik dan integrasi kepemimpinan masyarakat nasional dan masyarakat pedesaan belum terpadu, baik dalam wawasan maupun dalam struktur dan mekanisme. Jadi untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan keterpaduan sistem ekonomi dan wawasan nasional serta

keterpaduan struktur dan mekanisme antara penentuan keputusan tingkat makro (nasional, daerah, wilayah) dan keputusan tingkat mikro (usaha tani, kerja sama usahatani, koperasi). Apabila proses pengambilan keputusan pada tingkat makro dan mikro dilandasi dan merujuk kepada dasar dan pola pikir yang rasional serta dua-duanya merupakan subyek yang dinamik maka gejala involusi akan hilang dan partisipasi akan berkembang atas inisiatif dan kreativitas masyarakat sendiri.

Respon positif petani adalah manifestasi perilaku petani yang dihasilkan dari interaksi sosial petani dengan lingkungan sosial dan sistem nasional yang mengarahkannya. Lembaga khusus yang dirancang untuk membangun respons positif itu adalah penyuluhan pertanian. Dengan demikian, lingkungan pengarah, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi merupakan kekuatan luar yang mempengaruhi keputusan petani. Dalam penyuluhan pertanian, pengaruh lingkungan tersebut ditambah dengan kekuatan dari dalam yaitu dari diri petani sendiri berupa ilmu dan keterampilan serta penerapan teknologi.

Lingkungan pengarah dalam sistem Bimas adalah aparaturnya pembimbing koordinatif multi instansi melalui pengembangan simpul koordinasi pada tingkat administrasi pemerintahan dan lingkungan ekonomi pemerintah dalam menggairahkan masyarakat untuk membangun. Meskipun merupakan kekuatan yang diperlukan, ternyata Bimas belum cukup untuk menghasilkan gerakan masal petani dalam

melakukan intensifikasi pertanian (padi, palawija, dan lainnya) yang menjamin swasembada.

## **5. Pengertian Partisipasi**

Menurut Slamet (1994: 1), bahwa istilah partisipasi telah cukup lama dikenal khususnya di dalam pengkajian peranan anggota di dalam suatu organisasi, baik organisasi yang sifatnya tidak sukarela (*nonvoluntary*) maupun yang sukarela (*voluntary*). Namun demikian di dalam percakapan tentang pembangunan, istilah partisipasi merupakan suatu istilah yang relatif masih baru. Istilah partisipasi sering diartikan dalam kaitannya dengan pembangunan sebagai pembangunan masyarakat yang mandiri, perwakilan, mobilitas sosial, pembagian sosial yang merata terhadap hasil-hasil pembangunan, penetapan kelembagaan khusus, demokrasi politik dan sosial, reformasi sosial, atau bahkan yang disebut revolusi rakyat. Penggunaan istilah itu begitu beraneka ragam yang sebenarnya bukan menjelaskan arti yang sebenarnya dari partisipasi, tetapi hanya hal-hal yang berkaitan dengannya. Itulah sebabnya Dusseldrop menyatakan bahwa banyak literatur tentang partisipasi memulai pernyataan bahwa partisipasi digunakan dengan cara yang bercampur aduk, tidak ajeg, dan bahkan secara retorik.

Definisi tentang partisipasi di dalam literatur-literatur yang sekarang ini telah mulai memberikan pengertian yang tegas tentang arti partisipasi. Umumnya definisi-definisi yang mereka ketengahkan dapat dibedakan menjadi dua: definisi yang bersifat umum dan kedua definisi

yang bersifat khusus. Definisi yang khusus itu dikaitkan dengan aspek-aspek yang lebih khusus, misalnya dalam bidang politik, ekonomi, atau sosial, sehingga melahirkan istilah-istilah partisipasi politik, partisipasi ekonomi, partisipasi sosial.

Dengan demikian pengertian partisipasi sangat umum sebab sesuai dengan lingkup pembangunan itu sendiri amatlah luas, (namun demikian yang diartikan pembangunan di sini adalah *Planned development*, perubahan yang terencana demi peningkatan kesejahteraan masyarakat). Dalam kaitannya dengan partisipasi, pembahasannya adalah lebih mengarah kepada apa yang disebut *development participation*.

Untuk memberi arti partisipasi masyarakat dalam pembangunan barangkali yang menarik adalah hasil rumusan PBB. Dalam berbagai resolusi PBB secara jelas menunjukkan bahwa di sana ada tiga cara memandang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pertama adalah pembagian massal dari hasil-hasil pembangunan. Kedua, sumbangan massal terhadap jerih payah pembangunan. Dan ketiga adalah pembuatan keputusan di dalam pembangunan.

Oleh karena partisipasi dilihat dalam hubungannya dengan pembangunan, kiranya ada gunanya untuk sedikit menyinggung sekaligus memberikan kritik terhadap suatu model pembangunan. Pembangunan mempunyai dua macam definisi yang saling berhubungan tetapi secara analitis dapat dipisahkan. Di satu pihak, pembangunan bertautan dengan peningkatan produksi barang-barang materiil dan



pelayanan. Ini adalah pengertian pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi, titik perhatiannya sebagian besar pada persoalan-persoalan kuantitatif tentang produksi dan penggunaan sumber-sumber. Di pihak lain, pembangunan bertautan dengan perubahan di dalam pemerataan barang-barang materiil dan dalam sifat hubungannya sosial. Ini pengertian pembangunan dalam arti pembangunan sosial, yang titik beratnya pada perubahan dasar secara kualitatif dan distributif di dalam struktur masyarakat melalui peniadaan diskrimiansi dan penindasan struktural, penciptaan dan jaminan akan adanya kesempatan dan pembagian yang lebih merata atas hasil pertumbuhan ekonomi di kalangan penduduk.

Dalam hubungan dengan pembangunan, PBB memberikan definisi partisipasi sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda: (a) di dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut; (b) pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela. Namun kiranya perlu ditambahkan di sini, sesuai dengan azas tujuan pembangunan adalah pembagian yang merata atas hasil pembangunan, maka perlu dipertimbangkan tingkatan yang ketiga dari keterlibatan massa penduduk; yaitu (c) pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau suatu proyek. Penambahan butir (c) ini perlu mengingat banyak hasil dari suatu program atau proyek yang ditolak oleh penduduk,

misalnya program KB pada awal mulanya, penolakan pembangunan proyek, penolakan pembangunan jembatan keluarga, penolakan terhadap penggunaan pupuk buatan atau bibit unggul pada awal BIMAS dan sebagainya.

## **6. Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat**

Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang disertai dengan pendayagunaan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat umumnya telah ada sejak masyarakat itu sendiri ada. Namun usaha-usaha untuk membangun masyarakat yang diselenggarakan dengan cara sistematis, terencana serta menggunakan garis-garis strategi tertentu nampaknya belum lama muncul.

Usaha pembangunan masyarakat di Indonesia yang dilakukan secara sistematis dan terencana kiranya baru dimulai tahun 1955, yaitu dengan mengirimkan sebuah delegasi untuk melihat model-model pembangunan di negara tetangga kita yaitu Birma, Srilangka dan India yang menghasilkan delapan rekomendasi. Dalam perjalanan waktu, usaha-usaha pembangunan masyarakat itu dituangkan di dalam berbagai undang-undang, peraturan, atau instruksi menteri. Model dan strateginya dikembangkan di dalam pembangunan adalah model UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan).

Tentang arti pembangunan masyarakat (yang dalam bahasa Inggris disebut *community development*) hingga sekarang masih ditemukan berbagai penafsiran dan definisi yang berbeda-beda. Biasanya istilah ini

digunakan dalam arti yang paling harafiah yaitu menunjukkan ada setiap usaha perbaikan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian bila kita mengikuti pengertian yang luas ini, di situ akan ada gagasan tentang perbaikan kualitas hidup masyarakat sebanyak masyarakatnya yang akan diperbaiki itu sendiri.

Agar istilah itu tidak mempunyai pengertian yang terlalu umum, biasanya pengertian yang digunakan dipersempit dengan memberi arti yaitu adanya rangsangan-rangsangan yang berasal dari luar (baik itu rangsangan yang berupa kebendaan misalnya uang sebagai pancingan untuk merangsang perolehan dana swadaya masyarakat yang lebih besar maupun berupa penyuluhan-penyuluhan yang menumbuhkan kebutuhan baru) ke dalam masyarakat yang sifatnya memperkuat atau membantu masyarakat itu dalam menggunakan sumber-sumber lokal demi peningkatan hidup mereka. Pada tahun 1955 PBB menerima definisi pembangunan masyarakat yang mengartikannya sebagai berikut:

”Istilah pembangunan masyarakat telah masuk ke dalam pemakaian kata-kata internasional yang mengandung arti proses-proses di mana usaha-usaha dari orang-orang itu sendiri disatukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial dan kultural masyarakat, menyatukan masyarakat –masyarakat itu ke dalam kehidupan bangsa, dan memungkinkan masyarakat itu menyumbangkan secara penuh bagi kemajuan nasional”.

Proses yang kompleks itu terdiri dari dua unsur pokok: partisipasi masyarakat itu sendiri dalam usahanya untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan mengandalkan sedapat mungkin pada inisiatif mereka sendiri; dan penyediaan teknis dan pelayanan-pelayanan lain sebagai cara

untuk memperkuat inisiatif, kemandirian dan gotong royong dan membuat semua ini menjadi lebih efektif.

Definisi PBB di atas telah memperoleh banyak kritik. Alasannya ialah definisi ini masih berbau cara-cara pemerintahan kolonial mengorganisasikan program-program pembangunan masyarakat. Definisi ini lebih mencerminkan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah, ketergantungan desa terhadap kota, dalam hal bantuan-bantuan baik berupa materiil, teknis, maupun pelayanan. Pendekatan dan strategi pembangunan masyarakat telah banyak berbeda dari waktu ke waktu untuk menuju kepada kesempurnaan agar dapat memenuhi tujuan. Namun demikian definisi PBB masih tetap ada manfaatnya sebagai petunjuk dalam pembangunan masyarakat. Di dalamnya terkandung pengertian partisipasi masyarakat sebagai hal yang pasti harus ditekankan dan diupayakan agar terjadi *direct involvement*, keterlibatan langsung dari para penduduk dalam proses pembangunan.

Pembangunan masyarakat mencakup banyak kegiatan yang beraneka-ragam yang semuanya itu dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat. Perwujudannya dapat beraneka ragam seperti misalnya pelayanan-pelayanan penyuluhan, bantuan teknis, penyediaan-penyediaan kebutuhan seperti air, listrik, jalan, perumahan, sampai dengan proyek-proyek yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program-program itu ada yang diarahkan secara langsung bagi golongan masyarakat yang kurang

beruntung, misalnya para cacat, anak-anak putus sekolah, yatim piatu, janda dan lain sebagainya. Pula bagi golongan ekonomi lemah misalnya para pedagang kaki lima, bakul (pedagang kecil), buruh, nelayan miskin dan lain sebagainya (Slamet, 1994: 3).

## **7. Berbagai Tipe Partisipasi**

Dusseldorp (dalam Slamet, 1994: 10), mencoba membuat klasifikasi dari berbagai tipe partisipasi. Klasifikasinya didasarkan pada sembilan dasar. Masing-masing dasar jarang terpisah satu sama lain, artinya dalam banyak hal mengidentifikasi suatu kegiatan partisipatif yang sama melalui masing-masing tipe dari sembilan tipe yang ada itu. Dalam setiap klasifikasi Dusseldorp menunjukkan dua macam partisipasi yang dipilih secara tajam, namun kadangkala ada jenis partisipasi yang mungkin berada di tengah dari dua jenis yang tajam itu.

### **a. Penggolongan Partisipasi berdasarkan pada tingkat kesukarelaan**

Ada dua bentuk partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan, yaitu partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa. Partisipasi Bebas terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu. Partisipasi bebas dapat dibagi ke dalam dua sub kategori, yaitu partisipasi spontan dan partisipasi terbujuk. Partisipasi spontan terjadi bila seorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan pada keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan oleh lembaga-lembaga atau oleh orang lain. Partisipasi terbujuk, yaitu bila

seorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui program penyuluhan atau oleh pengaruh lain sehingga berpartisipasi secara sukarela di dalam aktivitas kelompok tertentu.

Partisipasi terbujuk dapat dibagi menurut siapa yang membujuk:

- 1). Pemerintah yang mempropagandakan program pembangunan masyarakat, gerakan koperasi, LSM/LPSM, atau HKTI.
- 2). Badan-badan sukarela di luar masyarakat itu misalnya gerakan-gerakan keagamaan.
- 3). Orang-orang yang tinggal di dalam masyarakat atau golongan organisasi sukarela yang berbasiskan di dalam masyarakat seperti PKK, Kelompok Pencapir, dan kelompok tani.

Partisipasi terpaksa dapat terjadi dalam berbagai cara:

- 1) Partisipasi terpaksa oleh hukum. Partisipasi ini terjadi bila berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dan tanpa melalui persetujuan mereka. Derajat pemaksaannya berbeda-beda.
- 2) Partisipasi terpaksa karena keadaan kondisi sosial ekonomi, secara teoritis kalau kita berbicara masalah partisipasi mestinya bukan berarti karena paksaan hukum atau peraturan. Namun adalah suatu kenyataan bila seseorang tidak turut dalam suatu kegiatan, dia akan mendudukkan dirinya atau keluarganya dalam posisi yang sulit.

b Penggolongan partisipasi berdasarkan pada cara keterlibatan

Dasar klasifikasi ini sangat dikenal di dalam ilmu politik. Dibedakan menjadi dua jenis yaitu: partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung: terjadi bila diri orang itu menampilkan kegiatan tertentu di dalam proses partisipasi. Partisipasi tidak langsung terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya.

- c Penggolongan partisipasi berdasarkan pada keterlibatan di dalam berbagai tahap proses pembangunan terencana

Ada enam langkah menurut penggolongan ini, yaitu: (1) perumusan tujuan; (2) penelitian; (3) persiapan rencana; (4) penerimaan rencana; (5) pelaksanaan; dan (6) penilaian. Partisipasi lengkap bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam seluruh enam tahap dari proses pembangunan terencana. Sedangkan partisipasi sebagian bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat di dalam seluruh enam tahap itu. Dengan perkataan lain, seseorang tetap dianggap berpartisipasi sebagian sekalipun dia terlibat dalam lima tahap lebih lebih bila kurang dari itu.

- d Penggolongan partisipasi berdasarkan pada tingkatan organisasi

Dusseldorp (dalam Slamet, 1994: 13), membedakan dua macam partisipasi menurut klasifikasi ini yaitu. Partisipasi yang terorganisasi dan partisipasi yang tidak terorganisasi. Partisipasi yang terorganisasi terjadi bila suatu struktur organisasi dan seperangkat

tata kerja dikembangkan atau sedang dalam proses penyiapan. Partisipasi yang tidak terorganisasi terjadi bila orang-orang berpartisipasi hanya dalam tempo yang kadang-kadang saja yang umumnya karena keadaan yang gawat. Partisipasi ini bersifat *ad hoc*. Partisipasi yang tidak terorganisasikan dapat menjadi benih partisipasi yang terorganisasi.

Salah satu sebab perubahan dari partisipasi yang tidak terorganisasi menjadi terorganisasi ialah bila kegiatan itu terulang-ulang sehingga demi kelancaran pelaksanaannya diperlukan pengorganisasian. Dalam organisasi itu kemudian menjadi jelas siapa melakukan apa.

- e Penggolongan partisipasi berdasarkan pada intensitas dan frekuensi kegiatan

Partisipasi intensif terjadi bila disitu ada frekuensi aktivitas partisipatif yang tinggi. Menurut Muller (Slamet, 1994: 14), hal ini diukur melalui dimensi kuantitatif dari partisipatisi. Partisipasi ekstensif terjadi bila pertemuan-pertemuan diselenggarakan secara tidak teratur dan kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian (*events*) yang membutuhkan partisipasi dalam interval waktu yang panjang. Hal demikian ini biasanya terjadi pada organisasi-organisasi yang didasarkan pada partisipasi sukarela, ada kurun-kurun waktu partisipasi intensif yang diselingi kurun waktu yang panjang dari partisipasi ekstensif. Misalnya suatu proyek kurun waktu panjang



dari partisipasi ekstensif. Misalnya suatu proyek pembangunan dapat menumbuhkan pengertian pada para pesertanya, muncul pemimpin yang baik dan aktif atau sejumlah anggota yang aktif, dapat merangsang terjadinya partisipasi intensif. Tetapi bila proyek telah selesai, pimpinan yang aktif telah tiada, maka organisasi atau kelompok bisa tergelincir ke dalam kurun waktu partisipasi ekstensif.

Kegiatan-kegiatan organisasi sukarela biasanya disertai slogan atau semboyan-semboyan. Pada awalnya organisasi ini menumbuhkan partisipasi yang intensif di kalangan anggota. Sebab pada dasarnya, apakah anggota akan berpartisipasi secara intensif atau ekstensif sangat tergantung pada biaya dan keuntungan yang diharapkan.

f Penggolongan partisipasi berdasarkan pada lingkup liputan kegiatan.

Penggolongan ada dua. Pertama, partisipasi tak terbatas yaitu bila seluruh kekuatan yang mempengaruhi komunitas tertentu dapat diawasi oleh dan dijadikan sasaran kegiatan yang membutuhkan partisipasi anggota komunitas itu. Kedua adalah partisipasi terbatas, yang terjadi bila hanya sebagian kegiatan sosial, politik, administrasi dan lingkungan fisik yang dapat dipengaruhi melalui kegiatan partisipatif.

Partisipasi tak terbatas hanya dapat terjadi dalam masyarakat yang hidup dalam isolasi sempurna. Bila berhubungan antara

pedesaan atau tempat-tempat terisolir itu telah mengalami proses penyatuan ke dalam daerah-daerah luar, masyarakat itu masuk dalam jaringan sosial, ekonomi, pemerintahan, dan politik yang lebih banyak dikontrol oleh pusat-pusat kota dan pula oleh campur tangan pemerintah. Masyarakat itu mulai melepaskan berbagai fungsinya seperti fungsi pendidikan yang tradisional, pertukaran jasa dan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Fungsi ini kemudian lebih banyak digantikan oleh organisasi-organisasi fungsional atau oleh pemerintah sendiri. Hal ini yang menyebabkan partisipatif menjadi semakin terbatas.

Namun demikian, bila ditilik lebih lanjut, bentuk partisipasi yang terbatas bukan berarti menurunkan hambatan anggota masyarakat untuk partisipasi di dalam pembangunan. Bila semula bentuk partisipasi di dalam pembangunan. Bila semula bentuk partisipasi didasarkan pada ikatan lokal yaitu kesadaran dan kewajiban sebagai warga dari suatu wilayah tertentu, dalam prosesnya berkembang atas dasar fungsi dan kepentingan. Setiap orang difungsikan di dalam setiap bidang kegiatan dan seraya dengan itu kepentingannya (baik kepentingan sosial, ekonomi, politik) dapat terpenuhi. Justru dalam keadaan ini partisipasi rakyat (*populer participation*) dapat dikembangkan dalam rangka keberhasilan program-program pembangunan masyarakat.

Duseldroep (Slamet,1994) menunjuk kecenderungan sekarang ini lebih diberikan pada pengembangan yang berdasarkan pada teritorial dari pada fungsi, artinya partisipasi yang berdasarkan teritorial yang lebih kuat dapat dikembangkan dan partisipasi rakyat pun dapat dirangsang untuk menghindari perlawanan terhadap usaha-usaha pembangunan masyarakat.

g Penggolongan partisipasi berdasarkan pada efektivitas

Secara ekstrim berdasarkan pada tingkat efektivitasnya, partisipasi dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi efektif dan partisipasi tidak efektif. Partisipasi efektif, yaitu kegiatan-kegiatan partisipatif yang telah menghasilkan perwujudan seluruh tujuan yang mengusahakan aktivitas partisipasi. Partisipasi tidak efektif, terjadi bila tidak satupun atau sejumlah kecil saja dari tujuan-tujuan aktivitas partisipatif yang dicanangkan terwujud.

Partisipasi efektif, dalam arti seluruh kegiatan-kegiatan yang dirumuskan sejak awal yang berkaitan dengan kegiatan yang memerlukan partisipasi terwujudkan, sangat jarang terjadi. Idealnya, suatu kegiatan tertentu apakah itu program atau proyek pembangunan masyarakat dapat menumbuhkan kegiatan partisipatif dari seluruh anggota masyarakat di dalam tiga tahap, yaitu mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan. Namun di dalam praktek tahap-tahap partisipasi ini tidak selalu dilewati oleh segenap anggota masyarakat. Dan ini pun tidak harus. Sebab adalah tidak mungkin menyertakan seluruh warga masyarakat misalnya, untuk turut serta dalam proses perencanaan. Hasil-hasil penelitian telah banyak menunjukkan bahwa status ekonomi (pekerjaan, pendidikan, pendapatan) berkaitan erat dengan tahapan partisipasi. Lapisan penduduk yang berstatus sosial lebih tinggi lebih banyak terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, kelas sosial

menengah lebih banyak dalam proses pelaksanaan, sedangkan kelas sosial yang lebih rendah lebih banyak hanya dalam proses pemanfaatan. Namun juga perlu diingat bahwa dalam banyak hal keadaannya bisa tidak seperti itu. Beberapa proyek misalnya lebih banyak dimanfaatkan oleh lapisan elit saja, sedangkan lapisan bahwa lebih banyak sebagai pelaksana (misalnya dengan menyumbangkan material dan tenaga) tetapi kurang langsung memanfaatkan hasil pembangunan.

Partisipasi tidak efektif sering juga terjadi, seperti hasil penelitian di sebuah desa wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY (Slamet, 1994) pada awal proyek pemanfaatan air tanah ternyata tidak segera diterima oleh penduduk. Gagasan pemerintah tentang koperasi melalui OPPA juga masih jauh dari gagasan penduduk. Pengamatan penulis tentang proyek angsanisasi (WC dengan bentuk leher angsa) juga kurang berhasil. Pun pula proyek pengadaan jamban keluarga, tungku hemat bahan bakar, dan gagasan teknologi baru lainnya kadangkala tidak mudah diterima oleh penduduk.

h Penggolongan partisipasi berdasarkan pada siapa yang terlibat.

Orang-orang yang dapat berpartisipasi dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Anggota masyarakat setempat:
  - a) Penduduk setempat;
  - b) Pemimpin setempat.

2) Pegawai pemerintah:

- a) Penduduk dalam masyarakat;
- b) Bukan penduduk.

3) Orang-orang luar:

- a) Penduduk dalam masyarakat;
- b) Bukan penduduk.

4) Wakil-wakil masyarakat yang terpilih

Anggota-anggota dari berbagai kategori dapat diorganisir (partisipasi bujukan) atau dapat mengorganisir diri mereka berdasarkan pada dua prinsip:

- 1). Perwilayahan: sifatnya heterogen, sejauh masih menyangkut kepentingan –kepentingan tertentu.
- 2). Kelompok-kelompok sasaran: sifatnya homogen, sejauh menyangkut kepentingan-kepentingan tertentu.

Di negara-negara sedang berkembang, organisasi partisipasi berdasarkan prinsip wilayah sangat dikenal. LKMD, PKK, Klompencapir, Kelompok Tani, Paguyuban KB, adalah contoh-contoh organisasi partisipasi yang berdasarkan pada prinsip wilayah yang menyangkut kepentingan-kepentingan. Cara mengorganisasi partisipasi seperti ini secara langsung maupun tidak langsung dirasakan cukup efektif. Sekalipun demikian bilamana salah satu dalam strategi pembangunan ialah menurunkan ketidakmerataan

maka pendekatan wilayah dalam mengorganisasikan partisipasi ternyata kurang menguntungkan.

Di dalam pembangunan pedesaan banyak orang beranggapan bahwa orang-orang desa itu homogen secara sosial dan ekonomi. Jelas hal ini telah menjerumuskan kedalam suatu pandangan yang keliru. Di dalam kenyataan masyarakat desa berstratifikasi, dan hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung telah menjadikan persoalan tersendiri bagi para pembangunan masyarakat. Persoalan ini sangat dirasakan di India yang masyarakatnya terbagi-bagi kedalam kasta-kasta yang masih tradisonal, kaku dan memiliki perbedaan jangkauan keuntungan-keuntungan sosial, ekonomi dan keuntungan-keuntungan lainnya. Hal demikian ini menjadikan suatu persoalan bagi badan-badan yang membiayai program pembangunan yang mengacu pada pendirian pemerintah India yang berazaskan dan persamaan.

Kegiatan partisipasi menuntut kepada para pelaku sejumlah pengorbanan waktu. Hal ini lebih-lebih bagi mereka yang duduk sebagai pengurus. Kedudukan sebagai pengurus menuntut kemampuan tertentu, di samping mengorbankan waktu.

Hal demikian ini hanya mungkin dimiliki oleh sejumlah kecil elit saja. Elit lokal ini bersedia berpartisipasi bilamana mereka tidak terancam kedudukannya di dalam sistem kekuasaan. Di samping itu juga mereka bersedia berpartisipasi lebih aktif dari penduduk biasa

bilamana mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang tertanam.

Elit lokal ini biasanya adalah tokoh-tokoh masyarakat yang terpendang seperti misalnya orang-orang yang telah cukup mempunyai pengalaman, tokoh-tokoh agama, guru, pegawai-pegawai dan juga orang-orang kaya di desa. Umumnya mereka memegang posisi kunci, yang mengesahkan nilai-nilai baru yang mau masuk. Di samping perannya sebagai orang-orang yang mengesahkan mereka juga sebagai tokoh-tokoh yang menggerakkan.

Problem partisipasi muncul bila para elit lokal itu berpartisipasi dengan maksud untuk mempertahankan kekuasaannya. Bilamana mereka mempunyai kepentingan yang tertanam dalam bidang ekonomi dalam sistem ketidakmerataan mereka menolak berpartisipasi dalam kegiatan yang mementingkan azas pemerataan. Lebih berbahaya lagi bila mereka menyusun kekuatan dan menentang program-program yang dianggap merugikan mereka. Contohnya dapat kita lihat bahwa matinya koperasi-koperasi di pedesaan dan bahkan di kota disebabkan karena “dibunuh” oleh tengkulak-tengkulak dan pedagang yang secara ekonomi lebih kuat.

Pegawai pemerintah yang sekaligus sebagai penduduk masyarakat setempat berkedudukan sebagai yang marginal berada di tepian antara dua budaya. Mereka bisa menerjemahkan bahasa pemerintah dan ilmuwan ke dalam kerangka pikir penduduk



pedesaan. Sebaliknya dia juga mampu menerjemahkan kebutuhan, motivasi, sistem nilai, pemikiran, perasaan penduduk pedesaan ke dalam kerangka yang lebih umum. Peran mereka lebih berfungsi sebagai mediator dalam proses pembangunan.

Pegawai pemerintah bukan penduduk setempat bukan dipandang sebagai mediator tetapi hanya dilihat sebagai orang yang mempunyai pengetahuan teknis sehingga orang-orang yang demikian ini oleh masyarakat didudukkan sebagai narasumber.

Sebagai akibat dari prasangka pejabat-pejabat kota dan disertai oleh mental urbanisasi, ada kecenderungan anggapan bahwa orang-orang desa memerlukan pelayanan-pelayanan yang lebih tinggi (seperti listrik, jalan-jalan aspal, irigasi. Sekolah, kesehatan).

Hal demikian ini menuntut lebih banyak pada anggota masyarakat berfungsi secara efisien. Dalam proses partisipasi, di desa mengarah pada ukuran yang lebih besar bidang keahlian, yang sudah tentu lebih menuntut fungsi yang lebih efisien.

Di atas telah dikatakan bahwa partisipasi yang mendasar pada prinsip perwilayahan dapat menghambat perwujudan pemerataan bagi semua lapisan masyarakat. Mengingat kenyataan ini, maka diperlukan pendekatan baru di dalam kegiatan partisipatif. Pendekatan baru ini memusatkan perhatian pada partisipasi individu-individu dari orang-orang yang mempunyai kedudukan ekonomi dan kepentingan yang sama, yang bisa disebut sebagai pendekatan

kelompok sasaran. Bimbingan, penyuluhan dan pendidikan bagi pengusaha ekonomi lemah, bimbingan bagi orang-orang miskin, pembinaan bagi para pemulang, wanita tuna susila adalah contoh-contoh dalam pendekatan kelompok sasaran. Cara-cara ini di Indonesia banyak dilakukan oleh yayasan–yayasan sosial, lembaga-lembaga pengembangan swadaya masyarakat, atau bahkan oleh individu.

i. Penggolompokan berdasarkan pada gaya partisipasi

Rothman membedakan tiga model praktek organisasi masyarakat. Di dalam setiap model itu terdapat perbedaan tujuan-tujuan yang dikejar dan perbedaan dalam gaya partisipasi.

1). Pembangunan lokalitas. Model praktek organisasi masyarakat ini sama dengan pembangunan masyarakat dan maksudnya adalah melibatkan orang-orang di dalam pembangunan mereka sendiri dan dengan cara ini menumbuhkan energi sosial yang dapat mengarah pada kegiatan menolong diri sendiri. Model ini mencoba melibatkan seluruh anggota masyarakat serta mempunyai fungsi integratif.

2). Perencanaan sosial. Pemerintah telah merumuskan tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu yang berkenaan dengan perumahan, kesehatan fisik dan lain sebagainya. Tujuan utama melibatkan orang-orang adalah untuk mencocokkan sebesar mungkin terhadap kebutuhan yang dirasakan dan membuat program

lebih efektif. Partisipasi di dalam perencanaan sosial dapat dicirikan seperti yang disebutkan Arnstein sebagai *informing* atau *placation*. Akan tetapi juga mungkin bahwa partisipasi berkembang ke dalam bentuk *partnership* atau perwakilan kekuasaan.

- 3). Aksi sosial (*social action*). Tujuan utama dari tipe partisipasi ini ialah memindahkan hubungan-hubungan kekuasaan dan pencapaian terhadap sumber-sumber. Perhatian utama ada satu bagian dari masyarakat yang kurang beruntung. Seperti halnya dalam pembangunan lokalitas, peningkatan partisipasi diantara kelompok sasaran adalah salah satu dari maksud-maksud yang penting.

#### **8. Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif Yang Melibatkan Masyarakat Dan Swasta Serta Lembaga Lainnya.**

Kebijakan-kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan sangat tergantung kepada siapa yang menentukannya, bagaimana proses penentuannya, siapa yang dapat mempengaruhinya, serta bagaimana diimplementasikannya. Agar masyarakat dapat membangun opini dan menentukan keberpihakan publik, maka diperlukan suatu mekanisme yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Strategi perencanaan bersama masyarakat yang dilakukan, adalah untuk menjadikan partisipasi masyarakat bukan sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan alasan "kebaikan hati", melainkan dimaksudkan sebagai suatu pelayanan dasar yang harus tersedia dan merupakan bagian yang menyatu dalam pengelolaan pembangunan daerah di era desentralisasi.

Adapun tujuan dari serangkaian aktivitas perencanaan bersama masyarakat meliputi antara lain mengurangi berbagai hambatan yang memisahkan antara masyarakat dengan pemerintahnya, atau dengan kata lain mengubah hubungan dari politik oposisi ke dialog dan pembagian kewenangan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, mendorong masyarakat dan aparat pemerintah (lintas sektoral) secara bersama-sama untuk mencari jalan keluar dari berbagai masalah umum yang mereka hadapi, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan demokratisasi, membangun kapasitas lokal untuk mendorong pengelolaan pembangunan daerah secara partisipatif, sebagai hasil dari pendekatan yang diupayakan.

Beberapa *output* atau keluaran yang dihasilkan dari serangkaian aktivitas perencanaan bersama masyarakat meliputi pembuatan dokumen identifikasi dan analisis pelaku pembangunan, kesepakatan para pelaku pembangunan terhadap agenda dan strategi pembangunan tingkat kawasan (*area-wide need assessment*), dokumen rencana pembangunan jangka menengah tingkat Desa/Kelurahan/Nagari dan

Kecamatan, dokumen Rencana Strategi Badan Perwakilan Desa/lembaga sejenisnya (*community need assessment*), dokumen Rencana Strategis Forum; hasil monitoring dan evaluasi partisipatif.

Untuk mencapai keluaran-keluaran di atas, maka serangkaian aktifitas Perencanaan Bersama Masyarakat yang dilakukan meliputi antara lain melakukan identifikasi dan analisis *stakeholder*, penentuan dan penguatan kapasitas Mitra Lokal, penyepakatan dengan NGS (*Non Government Stakeholder*) tentang perencanaan partisipatif, penjaringan dan perumusan aspirasi NGS tentang agenda dan strategi pembangunan daerah; perumusan mekanisme keterlibatan publik dalam perencanaan dan penganggaran, ekspose hasil aspirasi NGS tentang agenda strategi pembangunan daerah ke DPRD, pelaksanaan CNA (*Community need assessment*) penjajakan kebutuhan masyarakat /desa/ kelurahan dan penyusunan RPJMd/k (Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa/kelurahan), forum konsultasi tingkat kecamatan (UDKP parsitipatif), forum Koordinasi Pembangunan Daerah (FKPD/Rakorbang partisipatif) perumusan strategi BPD dalam mengawal perencanaan partisipatif, perumusan strategi NGS dalam mengawal aspirasi masyarakat dalam perencanaan, melakukan monitoring dan evaluasi.

## **9. Pengorganisasian masyarakat**

Ada berbagai pandangan atau aliran dikaitkan dengan pengorganisasian masyarakat yang nantinya akan sangat berpengaruh dalam pemahaman “pengorganisasian masyarakat” itu sendiri.

a. Pandangan tentang “pengorganisasian masyarakat”

Sekurang-kurangnya ada tiga pandangan (Prawoto, 2000) sebagai berikut ini:

- 1). Kelompok pertama melihat “pengorganisasian masyarakat” sebagai alat untuk mensukseskan program-program pemerintah. Agar program-program secara efektif diterima oleh masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat perlu diorganisasikan karena masyarakat yang terorganisasi dapat menjadi wadah yang efektif untuk proses internalisasi untuk memahami keputusan-keputusan yang telah ditetapkan pemerintah dan mudah digerakkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok ini berasumsi bahwa pemerintah adalah representasi masyarakat dan selalu tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan selalu bekerja keras hanya untuk kebaikan masyarakat. Kelompok ini percaya bahwa sistem yang ada cukup layak dan melihat bahwa struktur masyarakat yang ada adalah didasarkan atas konsensus.
- 2). Kelompok kedua melihat “pengorganisasian masyarakat” sebagai tujuan akhir yang perlu dilakukan karena kelompok ini meskipun percaya bahwa sistem yang ada adalah layak dan berfungsi tetapi ada penyimpangan-penyimpangan yang perlu diperbaiki dan masyarakat terdiri dari berbagai unsur yang bersifat majemuk sehingga perlu wadah organisasi dimana berbagai kepentingan

dapat dipertemukan. Penekanan disini adalah organisasi masyarakat terbentuk dan bukan masyarakat yang berorganisasi.

- 3). Kelompok ketiga melihat “pengorganisasian masyarakat” sebagai upaya terstruktur untuk menyadarkan masyarakat akan kondisi mereka dan perlunya menggalang potensi untuk melangkah menuju perbaikan dalam konteks tatanan sosial politik yang lebih luas. Kelompok ini melihat bahwa sistem yang ada tidak berfungsi dengan baik, struktur sosial yang ada juga konflik dan pemerintah tidak sepenuhnya tanggap dengan kebutuhan masyarakat. Bagi kelompok ini “pengorganisasian masyarakat” lebih merupakan langkah awal menuju masyarakat berorganisasi untuk mengembangkan tatanan sosial yang lebih peka dan tanggap terhadap kondisi dialami menuju pembangunan yang lebih menyeluruh (*comprehensive*).

b. Pengertian “pengorganisasian masyarakat”

Dalam kehidupan sehari-hari makin jelas bahwa pengertian “pengorganisasian masyarakat” (*community organization*) telah banyak disalah-artikan dan dimanipulasi serta seringkali juga dikecilkan artinya sehingga hanya terbatas pada membentuk organisasi atau badan hukum, jadi lebih ditekankan pada fisik organisasi sebagai akhir dari upaya pengorganisasian masyarakat.

“Pengorganisasian masyarakat” mencakup hal-hal yang lebih luas dan bersifat langkah-langkah penyadaran masyarakat terhadap

kondisi dan permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan menggalang potensi untuk memperbaiki dan mengembangkan tatanan kemasyarakatan dalam rangka membangun komunitas yang ada agar lebih peka dan tanggap serta mampu menjawab perubahan yang terjadi. Ini berarti komunitas yang terbentuk melalui proses “pengorganisasian masyarakat” ini akan merupakan komunitas yang dinamik dan mampu menjawab berbagai perubahan yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar. Dengan demikian suatu komunitas bukan hanya sekedar suatu badan hukum (legal entitu) tetapi lebih merupakan himpunan antar pribadi yang saling berinteraksi dan memiliki keterikatan atau kesaling-bergantungan dan yang berakar pada suatu tatanan budaya setempat.

Pengorganisasian masyarakat ini juga merupakan bagian dari proses membangun potensi dan kapasitas suatu kelompok suatu kelompok masyarakat (*empowerment*) agar mereka mampu secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan sehingga pada gilirannya akan mampu melakukan manajemen komunitas (*community management*) terhadap lingkungan hidupnya.

Organisator masyarakat (*community organizer*) dapat siapa saja baik merupakan unsur dari dalam masyarakat (komunitas) sendiri atau dari luar. Yang penting seorang organisator masyarakat (*community organiser*) harus memiliki beberapa kualitas dasar sebagai berikut:



1). Mencintai masyarakat dengan tulus

Mencintai disini diartikan suatu komitmen untuk memberikan hidupnya kepada masyarakat khususnya yang tertinggal. Mencintai disini juga bukan pemanjaan artinya harus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menghadapi tantangan yang dibutuhkan untuk tumbuh dengan wajar.

2). Tekun

Sifat ini sangat dibutuhkan karena mengorganisasi masyarakat bukan hanya kerja satu gebrakan (*one-shot operation*) tetapi lebih merupakan proses berlanjut yang penuh tantangan dan kesulitan.

3). Memiliki rasa humor

Agar tidak mudah putus asa dan frustrasi dalam mengorganisasi masyarakat seorang organisator masyarakat harus memiliki tingkat humor yang cukup. Artinya dia harus mampu mendudukan segala sesuatu secara proporsional tidak terlalu menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain dan mampu menerima segala kesulitan dengan tetap gembira.

4). Kreatif

Kreativitas juga sangat dibutuhkan dalam kerja mengorganisasi masyarakat karena pada dasarnya mengorganisasi masyarakat tidak ada resep baku, jadi kreativitas seorang organisator sangat dibutuhkan.

## 5). Fleksibel

Di samping kreatif seorang organisator masyarakat juga dituntut fleksibel. Artinya seorang organisator harus mampu menyesuaikan diri dan rencananya dengan situasi nyata di lapangan. Perlu dibedakan antara fleksibel dan oportunis. Fleksibel adalah penyesuaian (adaptasi) ke suatu situasi agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan sedangkan oportunis tidak punya tujuan.

### c. Beberapa konsep dalam pengorganisasian masyarakat

#### 1). Partisipasi

Beberapa pengertian partisipasi yang dapat dipakai sebagai acuan adalah sebagai berikut di bawah ini:

a). Pelibatan diri pada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama (Hasan Poerbo)

b). *Voluntary involvement of people in making & implementing decisions directly affecting their lives, ....* (UNCHS, 1991)

Pelibatan secara suka rela oleh masyarakat dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka....

c). *A voluntary process by which people including the disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the decisions that affect them* (Deepa Narayan, 1995)

Suatu proses yang wajar dimana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan)

mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

## 2). Ciri-ciri partisipasi

Partisipasi masyarakat selalu memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini:

- a). Bersifat proaktif dan bukan reaktif artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak;
- b). Ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat;
- c). Ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut;
- d). Ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara;
- e). Ada kesetaraan.

## 3). Jenjang partisipasi

Ibu Sherry Arntein, seorang sosiolog mencoba membuat jenjang partisipasi dalam delapan jenjang, dimana tingkat terendah adalah “manipulasi” atau “rekayasa sosial” dan yang tertinggi adalah bila terjadi “kontrol sosial” atau “pengendalian oleh masyarakat”. Kemudian delapan jenjang tersebut dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut ini.

Kelompok yang paling rendah adalah: Non Partisipasi. Termasuk didalamnya secara berjenjang mulai dari yang terendah adalah:

- a). Manipulasi/rekayasa sosial, yaitu pendekatan yang mendudukan masyarakat sebagai obyek pembangunan dan

dimanipulasi agar sesuai dengan harapan/program yang telah dirumuskan oleh pengambilan keputusan (pemerintah).

- b). Terapi, yaitu pendekatan yang mendudukan masyarakat sebagai pihak yang tidak tahu apa-apa (orang sakit) dan harus percaya terhadap apa yang diputuskan oleh pemerintah (dokter).

Kelompok menengah adalah yang memiliki Kadar Hadiah (tekonisme). Termasuk di dalamnya secara berjenjang mulai yang terendah adalah:

- a) Informasi, yaitu pendekatan pembangunan dengan pemberian informasi akan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah seperti pemasyarakatan program, dll.
- b) Konsultasi, yaitu pendekatan pembangunan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkonsultasi mengenai apa yang akan dilakukan oleh pemerintah di lokasi yang bersangkutan.
- c) Penenteraman, yaitu pendekatan pembangunan dengan misalnya merekrut tokoh-tokoh masyarakat untuk duduk dalam panitia pembangunan sebagai upaya menenteramkan masyarakat tetapi keputusan tetap ditangan pemerintah.

Ketiga pendekatan ini tetap mendudukan masyarakat sebagai obyek dimana kewenangan pengambilan keputusan tetap berada di tangan pemerintah.

Kelompok tertinggi adalah yang memiliki Kadar Kedaulatan Rakyat. Termasuk di dalamnya secara berjenjang mulai dari yang terendah adalah:

- a) Kerjasama, yaitu pendekatan pembangunan yang mendudukkan masyarakat sebagai mitra pembangunan yang setara sehingga keputusan dimusyawarahkan dan diputuskan bersama.
- b) Pendelegasian, yaitu pendekatan pembangunan yang memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat untuk mengambil keputusan yang langsung menyangkut kehidupan mereka.
- c) Kontrol sosial, yaitu pendekatan pembangunan di man keputusan tertinggi dan pengendalian ada di tangan masyarakat.

Kesimpulannya partisipasi baru benar-benar terjadi bila memiliki kadar kedaulatan rakyat yang cukup dan kadar kedaulatan rakyat tertinggi adalah terjadinya kontrol sosial (*social control/citizen control*) dimana keputusan penting dan pengendalian pembangunan ada di tangan rakyat.

- d. Pembangunan partisipatoris sebagai bagian integral dari pengorganisasian masyarakat

Dalam upaya membangun kesadaran suatu komunitas/masyarakat dan sekaligus menata kembali tatanan sosial yang ada

maka metode yang sangat efektif adalah pembangunan partisipatif, yaitu pembangunan yang secara langsung melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan dengan tetap mendudukan komunitas/ masyarakat pemanfaat sebagai pelaku utama, artinya keputusan-keputusan penting yang langsung menyangkut hidup mereka sepenuhnya ada di tangan komunitas/ masyarakat. Pembangunan partisipatoris ini merupakan model pembangunan yang melibatkan komunitas pemanfaat sebagai pelaku utama untuk secara aktif mengambil langkah-langkah penting yang dibutuhkan untuk memperbaiki hidup mereka.

Pembangunan partisipatoris ini juga merupakan koreksi dan sekaligus model pembangunan yang memadukan dua rancangan yaitu anjakan yaitu anjakan dari atas, di mana keputusan-keputusan dirumuskan dari atas dan anjakan dari bawah, yang menekankan keputusan di tangan masyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing. Dengan kata lain pembangunan partisipatoris tidak berarti meniadakan peran pelaku luar; ahli, pemerintah, dll tetapi mendudukan mereka sebagai fasilitator dan katalis dalam suatu proses yang sepenuhnya dikendalikan oleh komunitas/ masyarakat pemanfaat.

Pembangunan partisipatoris ini mengembangkan anjakan ketiga dengan cara menggabungkan keuntungan dan membuang kerugian masing-masing anjakan; top down dan bottom up sehingga

diperoleh ancangan ketiga yang disebut “ancangan partisipatoris” yang mempertemukan gagasan makro yang bersifat “top down” dengan gagasan mikro yang kontekstual dan bersifat “bottom up”. Ancangan ini memungkinkan dilakukan perencanaan program yang dikembangkan dari bawah dengan masukan dari atas. Pola pembangunan dengan “ancangan partisipatoris” disebut pembangunan partisipatoris, yang akan menghasilkan pembangunan “mikro” yang tidak terlepas dari konteks “mikro”.

Yang perlu diperhatikan dalam pola pembangunan partisipatoris ini peran “pelaku eksternal” bukan untuk mengambil alih pengambilan keputusan melainkan untuk menunjukkan konsekuensi dari tiap keputusan yang diambil masyarakat, dengan kata lain menjadi “fasilitator” dalam proses pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil akan rasional.

Dalam pembangunan partisipatoris, tiap tahapan pembangunan, mulai dari pengenalan persoalan dan perumusan kebutuhan, perencanaan dan pemrograman, pelaksanaan, pengoperasian dan pemeliharaan merupakan kesepakatan bersama antar pelaku pembangunan yang terlibat (pemerintah, swasta dan masyarakat), dimana seluruh proses pembangunan sekaligus merupakan proses belajar bagi tiap pihak yang terlibat. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai “katalis pembangunan” dan masyarakat sebagai “klien” yang diberdayakan dan difasilitasi agar

mampu berperan sebagai “pelaku utama” untuk memecahkan persoalan mereka melalui hasil kerja mereka sendiri.

#### **10. Pemberdayaan Masyarakat dan Strategi Pembangunan Yang Berakarkan Kerakyatan**

Perberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*”. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*) yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain disebut *alternative development*, yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*”.

Konsep ini tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, keduanya tidak harus diasumsikan sebagai “*incompatible or antithetical*”. Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap “*zero-sum game*” dan “*trade off*”. Ia bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.



Oleh karena itu, seperti pendapat Kirdar dan Silk, “*the pattern of growth is just as important as the rate of growth*”. Yang dicari adalah seperti dikatakan Ranis, “*the right kind of growth*”, yakni bukan yang vertikal menghasilkan “*trickel-down*”, seperti yang terbukti tidak berhasil, tetapi yang bersifat horizontal (*horizontal flows*), yakni “*broadly based, employment intensive, and not compartmentalized*” (Kartasasmita, 1996: 142).

Menurut Kartasasmita (1996: 144) keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Namun, selain nilai fisik seperti di atas, ada pula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti kekeluargaan, kegotongroyongan, dan bagi bangsa Indonesia, kebinekaan.

Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat haruslah pertama-pertama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Selanjutnya, upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern-seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban-adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan

pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

Peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang sungguh penting dalam hal ini. Dengan dasar pandang demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi. *“The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision-making of territorially organized communities, local self-reliance (but not autarhy), direct (participatory) democracy, and experiential social learning”.*

Arah perkembangan ekonomi seperti yang dikehendaki oleh UUD 1945 tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Artinya, kemajuan yang diukur melalui membesarnya produksi nasional tidak otomatis menjamin bahwa pertumbuhan tersebut mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara merata. Masalah utamanya, seperti telah ditunjukkan di atas, adalah ketidakseimbangan dalam kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang terbuka dalam proses pembangunan. Dengan proses pembangunan yang terus berlanjut, justru ketidakseimbangan itu dapat makin membesar yang mengakibatkan makin melebarnya jurang kesenjangan.

Dalam upaya mengatasi tantangan itu diletakkan strategi pemberdayaan masyarakat. Dasar pandangannya adalah bahwa upaya

yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain, memberdayakan.

Secara praktis upaya yang merupakan pengeralahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Dengan demikian, dapatlah diartikan bahwa pertambahan ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya. Jadi, partisipatif rakyat meningkatkan emansipasi rakyat (Kartasasmita, 1996: 133).

## **11. Kemiskinan**

### **a. Gejala-gejala kemiskinan**

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang

memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu (Tim Persiapan P2KP, 2004: 1).

Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuknya, seperti antara lain:

- 1). Dimensi politik, sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah/organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi;
- 2). Dimensi sosial, sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada, terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia serta etos kerja mereka, dan pudarnya kapital sosial;

- 3). Dimensi lingkungan, sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman;
- 4). Dimensi ekonomi, muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak; dan
- 5). Dimensi aset, ditandai dengan rendahnya tingkat kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia (*human capital*), peralatan kerja, modal dana, hunian atau perumahan dan sebagainya.

b. Akar penyebab kemiskinan

Berbagai program kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial, sektoral dan charity dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dll). Lemahnya kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalan secara bersama.

Kondisi kapital sosial serta perilaku masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pihak pengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat, yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak tanggungjawab (tidak *pro poor* dan *good governance oriented*). Sehingga menimbulkan kecurigaan, *stereotype* dan *skeptisme* di masyarakat.

Keputusan, kebijakan dan tindakan yang tidak adil ini biasanya terjadi pada situasi tatanan masyarakat yang belum madani, dengan salah satunya indikasinya dapat dilihat dari kondisi kelembagaan masyarakat yang belum berdaya, yakni: tidak berorientasi pada keadilan, tidak dikelola dengan jujur dan tidak ikhlas berjuang bagi kepentingan masyarakat.

Kelembagaan masyarakat yang belum berdaya pada dasarnya disebabkan oleh karakteristik lembaga masyarakat tersebut yang cenderung tidak mengakar, dan tidak representatif. Di samping itu, ditengarai pula bahwa berbagai lembaga masyarakat yang ada saat ini, dalam beberapa hal, lebih berorientasi pada kepentingan pihak luar masyarakat atau bahkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, sehingga mereka kurang memiliki komitmen dan kepedulian pada masyarakat di wilayahnya, terutama masyarakat miskin. Dalam kondisi ini akan semakin mendalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga masyarakat yang ada di wilayahnya.

Kondisi kelembagaan masyarakat yang tidak mengakar, tidak representatif dan tidak dapat dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh subur dalam situasi perilaku/sikap masyarakat yang belum berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada di lingkungannya, yang pada akhirnya mendorong sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan dan tergantung pada bantuan pihak luar untuk mengatasi masalahnya sendiri, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yakni terutama keikhlasan, keadilan dan kejujuran.

Dengan demikian, dari paparan di atas cukup jelas menunjukkan bahwa situasi kemiskinan akan tumbuh subur dalam situasi perilaku/sikap dan cara pandang (paradigma) masyarakat yang belum berdaya.

Oleh karena itu, P2KP memahami bahwa akar persoalan kemiskinan yang sebenarnya adalah karena kondisi masyarakat yang belum berdaya dengan indikasi kuat yang dicerminkan oleh perilaku/sikap/cara pandang masyarakat yang tidak dilandasi pada nilai-nilai universal kemanusiaan (jujur, dapat dipercaya, ikhlas, dll) dan tidak bertumpu pada prinsip-prinsip universal kemasyarakatan (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, demokrasi, dll).

c. Penanganan Akar Penyebab Kemiskinan



Pemahaman mengenai akar persoalan kemiskinan seperti di atas telah menyadarkan berbagai pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat yang senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai universal kemasyarakatan (*moral*), prinsip-prinsip kemasyarakatan (*good governance*) dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat ini merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari.

Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarkan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin (*“pro poor”*) dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*“good governance”*), baik ditinjau dari

aspek ekonomi, lingkungan termasuk perumahan dan permukiman, maupun sosial.

## **12. Strategi Pengentasan Penduduk dari Kemiskinan**

Untuk menanggulangi kemiskinan dan sekaligus pemeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, diperlukan upaya untuk memadukan berbagai kebijaksanaan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor dan wilayah. Dengan memperhatikan tantangan, modal, dan potensi yang ada, kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan tertuang dalam tiga arah kebijaksanaan. Pertama, kebijaksanaan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan; kedua, kebijaksanaan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; dan ketiga, kebijaksanaan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, dan sekaligus memacu dan memperluas upaya untuk menanggulangi kemiskinan.

Stabilitas ekonomi, sosial dan politik, pertumbuhan penduduk yang terkendali, dan lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya merupakan kondisi yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan hanya dapat berjalan baik dan efektif apabila suasana tenteram dan stabil telah tercipta. Peperangan,

pertikaian antarkelompok, dan situasi untuk politik yang tidak stabil, tidak mendukung upaya apa pun untuk menanggulangi kemiskinan. Setiap langkah yang diambil untuk menciptakan ketentraman mempunyai arah yang sama dengan upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Demikian pula halnya kestabilan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak terkendali merupakan situasi yang berlawanan bagi program penanggulangan kemiskinan. Ini menegaskan bahwa masalah penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari pengendalian perekonomian makro.

Tekanan paling utama dalam kebijaksanaan yang langsung ditujukan kepada masyarakat miskin harus diletakkan pada perbaikan pelakunya, terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan dasarnya dan pengembangan kegiatan ekonominya. Program ini harus dilaksanakan secara selektif dan terarah, dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya. Langkah yang diperlukan adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan jangkauan program tersebut. Searah dengan itu, pengembangan sistem jaminan sosial secara bertahap perlu terus ditingkatkan.

### **13. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)**

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan prakarsa dari Pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan di perkotaan, yang dirancang dengan pengertian bahwa untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan diperlukan

pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, sehingga perlu upaya-upaya tertentu yang harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, terutama di tingkat kelurahan. Upaya tersebut meliputi pula penyediaan dan penyiapan sumber daya yang cukup, memindahkan pembuatan keputusan dan tanggung jawab ke tangan masyarakat sendiri sekaligus untuk meningkatkan dan mengingatkan kepercayaan dan transparansinya.

P2KP menekankan pada pemberdayaan komunitas dalam jangka panjang melalui perbaikan peran dan tanggung jawab dalam menemkenali tuntutan kebutuhannya, merumuskan langkah-langkah penanganannya dan melaksanakannya. Selain itu, juga memberi bantuan modal usaha bagi peningkatan ekonomi dan bantuan sarana dan prasana dasar bagi kelompok masyarakat miskin di perkotaan. Dalam konteks ini, peran Pemerintah lebih ditekankan pada upaya fasilitas proses dengan memberikan bantuan penyediaan sumber daya yang memadai (dana dan bantuan teknik) agar terbentuk suatu situasi yang kondusif.

Bentuk dari pelaksanaan Program penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan bantuan teknik berupa pendampingan kepada masyarakat dalam rangka membantu pembentukan kelembagaan masyarakat dan melakukan upaya bagi peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi, perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,

sehingga dapat melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap berbagai penyebab permasalahan kemiskinan yang dihadapi.

- b. Memberikan bantuan dana kepada masyarakat miskin yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, baik yang bersifat bergulir maupun yang sifatnya hibah.

Pada umumnya prinsip dan mekanisme pelaksanaan P2KP yang harus diikuti oleh semua yang terlibat adalah bahwa keputusan pengelolaan dan pemanfaatan bantuan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, yang diwujudkan melalui pembentukan dan berfungsinya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, Konsultan memahami bahwa pada hakekatnya Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah program yang dirancang dengan paradigma bahwa untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan diperlukan pendekatan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas, sehingga dalam proses-nya perlu upaya-upaya tertentu yang harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri (terutama di tingkat kelurahan). Sasaran utama program ini adalah masyarakat miskin di tingkat kelurahan di perkotaan. Sedangkan kegiatan program ini secara garis besar akan mencakup: (i) penyediaan/penyiapan sumber daya yang cukup; (ii) memindahkan pembuatan keputusan dan tanggung jawab ke tangan masyarakat, dengan berpegang pada prinsip partisipasi,

transparansi, demokrasi dan akuntabilitas serta (iii) meningkatkan kepercayaan dan transparansinya yang dilandasi oleh asas-asas keadilan, kejujuran, kesetaraan, kepercayaan, kejujuran, keikhlasan dan kebersamaan dalam keberagaman.

Pemikiran tersebut di atas mengandung pengertian bahwa konsep dasar dalam P2KP adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang bersangkutan oleh konsultan. Berlandaskan pemikiran tersebut diharapkan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebatas menyalurkan dana ke masyarakat melainkan juga mendorong terjadinya proses pemberdayaan masyarakat dalam menemukan dan menyelesaikan masalah kemiskinan yang dihadapinya.

Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan ini tidak dibatasi pada kerangka batas waktu tertentu (batas waktu proyek), melainkan harus diupayakan untuk dapat terus berproses dan berjalan meskipun “proyek” telah selesai. Mengingat “proyek” hanya bertugas mendorong peng-awal-an, memfasilitasi dan mendampingi masyarakat selama proses penyiapan dan pelaksanaan agar sesuai konsep dasar P2KP dalam jangka waktu tertentu.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pada dasarnya, prinsip dan mekanisme pelaksanaan P2KP harus diikuti seluruh unsur pelaku yang terlibat dalam pelaksanaannya, namun hal yang lebih perlu untuk dicermati adalah bahwa keputusan pengelolaan dan pemanfaatan

bantuan dilakukan oleh masyarakat sendiri. Hal ini mengingat bahwa masyarakat adalah pelaku utama yang pasif. Agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan selama masa proyek (sebagai proses pembelajaran dari pengalaman), maka perlu dikembangkan berbagai instrumen yang mampu mendukung prosesnya. Salah satu instrumen tersebut adalah “wadah atau lembaga” yang diperuntukkan menampung, memproses sekaligus mewujudkan aspirasi dari seluruh unsur yang ada dalam masyarakat. Sejauh dalam lingkungan masyarakat terdapat lembaga yang dibutuhkan (sesuai kriteria dalam P2KP), maka upaya yang perlu ditempuh adalah meningkatkan kemampuan lembaga tersebut agar lebih berperan sesuai tugas dan fungsinya serta mengakar pada masyarakat. Namun bila lembaga tersebut sudah tidak memperoleh “legitimasi” dari masyarakatnya, maka masyarakat diberikan pilihan untuk membentuk lembaga baru atau melakukan revalidasi fungsi lembaga yang ada sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai dalam P2KP sebagai perwujudan dari Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM.

BKM dibentuk melalui proses yang ‘demokratis’ yang mencerminkan keterlibatan aktif (partisipasi) seluruh warga masyarakat. Lembaga ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kehidupan masyarakat yang mandiri dan mampu mengatasi persoalannya sendiri. Dengan demikian BKM mengembang misi untuk menumbuhkan kembali ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerja sama untuk kebaikan dan manfaat bersama. Di samping

itu, sebagai sebuah lembaga yang mandiri, BKM diharapkan akan mampu menjalankan fungsi ‘advokasi’ terhadap hak-hak masyarakat miskin dan mengefektifkan upaya pendampingan secara menerus kepada masyarakat miskin. Dengan demikian, pendekatan pemberdayaan dalam P2KP dilaksanakan melalui perkuatan kelembagaan masyarakat sebagai upaya melahirkan embrio bagi terbentuknya kelembagaan lokal yang selanjutnya dapat berfungsi sebagai media perantara, yang juga diharapkan akan mampu menjembatani hubungan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga formal yang ada.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan memiliki sifat dan konsep dasar yang berbeda dengan program lainnya. P2KP adalah program yang mengutamakan pada penguatan kelembagaan masyarakat agar menjamin keberlanjutan program. Selain itu ditekankan pula pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif.

Melalui partisipasi aktif tersebut, masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran’ tidak hanya berkedudukan menjadi objek program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling sesuai bagi mereka dalam memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program. Dengan demikian, apakah program ini akan terus berlanjut atau terhenti, akan sangat ditentukan oleh tekad dan komitmen masyarakat sendiri.



Mencermati substansi pokok pemikiran tersebut di atas, perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dipahami betul sebagai “nafas” dari P2KP yang terdiri dari Nilai-nilai dasar P2KP serta Visi–Misi P2KP. Keseluruhan hal tersebut melandasi tersusunnya rumusan ‘tujuan umum dan tujuan pokok P2KP’ serta operasionalisasi konsep pelaksanaannya dalam bentuk ‘penetapan sasaran kegiatan P2KP’.

Dalam penyelenggaraan P2KP, semua unsur pelaku yang terlibat di dalamnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar/ azas P2KP (keadilan, kejujuran, kesetaraan, dapat dipercaya, keikhlasan, dan kebersamaan dalam beragama) dan dalam bertindak harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip P2KP (demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi). Kesadaran dan tekad yang tulus untuk memperhatikan dan menjalankan ‘filosofi’ tersebut adalah untuk mendukung Visi dan Misi P2KP secara utuh dan menyeluruh.

Visi P2KP adalah mewujudkan masyarakat yang mampu menanggulangi kemiskinan yang mereka alami secara mandiri dan berkelanjutan. Ciri-ciri masyarakat sedemikian antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai kemampuan alam mengidentifikasi persoalan yang dihadapi bersama, baik yang sudah terlibat maupun yang diperkirakan akan terjadi, serta merumuskan siasat penanggulangan secara bersama;

- b. Mempunyai kemampuan mengkoordinasikan diri, sebagai salah satu cara dalam menanggulangi persoalan bersama;
- c. Mempunyai kemampuan mengembangkan aturan main mampu merumuskan alternatif jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sedangkan Misi P2KP adalah memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam menanggulangi kemiskinannya, sehingga melalui pelaksanaan program ini diharapkan akan dapat dicapai masyarakat yang mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, merumuskan serta menetapkan prioritasnya;
- b. Mampu merumuskan alternatif jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- c. Mampu mengorganisasikan diri, sebagai salah satu cara penanggulangan permasalahan secara bersama.
- d. Mampu mengembangkan aturan main, nilai, norma yang disusun, disepakati serta dipatuhi bersama;
- e. Mampu memperluas kerja sama serta mampu menjalin kemitraan yang setara.

Berdasar visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, program penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam menangkal dan menanggulangi kemiskinan khususnya

di perkotaan. Secara spesifik, tujuan khususnya yang diharapkan dapat dicapai melalui program ini antara lain adalah:

- a. Terciptanya organisasi masyarakat yang representatif, tanggap dan akuntabel yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan dan memperkuat secara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik;
- b. Meningkatkan pelayanan dan akses bagi masyarakat miskin, khususnya dalam pendanaan kebutuhan usaha, sosial dan prasarana;
- c. Meningkatkan jaringan kerja sama antar kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan koordinasi serta keterpaduan gerakan penanggulangan kemiskinan.

Tercapainya tujuan sebagaimana tersebut di atas memerlukan upaya yang dilakukan secara bersama-sama antar seluruh pelaku yang antara lain ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:

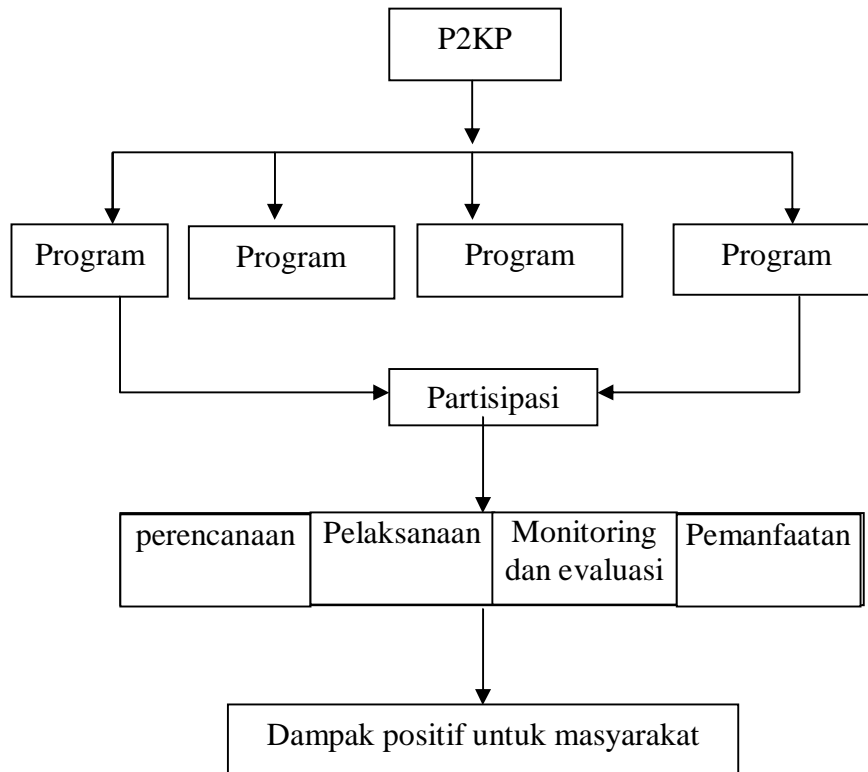
- a. Membangun rasa percaya diri masyarakat bahwa mereka mampu dan berdaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri;
- b. Membangun kesadaran serta kepedulian masyarakat maupun pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan;
- c. Memperkuat kelembagaan masyarakat setempat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
- d. Pengadaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha-usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru;

- e. Penyediaan dana hibah untuk pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan, yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang pengembangan kegiatan usaha-usaha produktif dan membuka lapangan kerja baru;
- f. Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok;
- g. Penyiapan, pengembangan dan pemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat kelurahan untu dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan dalam melaksanakan program pembangunan;
- h. Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana lingkungan dengan menumbuhkan rasa kesadaran untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan umum.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan tersebut, maka seluruh unsur pelaku terkait dalam pengelolaan kegiatan P2KP ini harus terlibat secara aktif. Pemahaman mendalam mengenai visi – misi dan tujuan dari program menjadi kunci proses pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Faktor bantuan dana maupun bantuan teknis dalam proses pemberdayaan merupakan salah satu media pendukung untuk membantu percepatan proses. Dengan demikian, pemberdayaan

masyarakat yang dilakukan akan mampu menciptakan perubahan struktur dan kultur masyarakat.

## B. Kerangka Dasar Pemikiran



Gambar 1

Kerangka Dasar Pemikiran

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi studi ini di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Tepatnya di Proyek P2KP Desa Langenharjo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan keselarasan antara tema studi dengan fenomena sosial yang kebetulan ditemukan di lokasi tersebut.

### **B. Metodologi**

Bentuk/strategi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif.

### **C. Teknik Sampling**

Teknik sampling digunakan adalah *Purposive Sampling*, yang mana peneliti cenderung memilih informan yang dianggap mengetahui masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya, untuk menjadi sumber data yang mantap. Pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data (Sutopo, 2002). Informan dalam penelitian ini adalah warga masyarakat desa Langenharjo dan Pengurus Proyek P2KP, Adapun key informant dalam penelitian ini adalah Ketua Proyek P2KP desa Langenharjo

### **D. Sumber Data dan Jenis Data**

Sumber data yang dipilih berdasarkan jenis informasi yang dibutuhkan berdasarkan arahan beragam hal yang terdapat dalam rumusan masalah

(Sutopo, 2002). Dalam penelitian ini dapat berupa manusia, peristiwa dan tingkah laku dokumen dan arsip. Jenis informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dirancang dalam kisi-kisi wawancara yang disampaikan kepada informan, kisi-kisi wawancara tersebut terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring/evaluasi P2KP di desa Langenharjo. Untuk mengamati peran masyarakat dalam P2KP tersebut peneliti melakukan observasi dengan cara ikut terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi P2KP di desa Langenharjo tersebut

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat bersifat interaktif dan non interaktif. Metode interaktif meliputi wawancara mendalam, observasi dan *focus group discussion*. Sedangkan non interaktif meliputi: kuesioner, mencatat dokumen atau arsip (*content analysis*) dan juga observasi tak berperan (Sutopo, 2002).

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi: wawancara mendalam (*In-depth interviewing*), observasi langsung, mencatat dokumen (*content analysis*), dan *focus group discussion* (FGD).

#### **F. Validitas Data**

Validitas menunjukkan bahwa apa yang diamati di lapangan oleh peneliti sesuai dengan kenyataan yang ada. Di dalam menjamin validitas data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Trianggulasi Data* (seperti pada matrik terlampir) Menurut Moleong (1990: 178) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam triangulasi ini, peneliti mengumpulkan masing-masing data yang tersedia. Dengan demikian kebenaran data dapat diuji oleh data yang diperoleh dari sumber data yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti menerapkan jenis triangulasi data (triangulasi sumber), maksudnya:

Peneliti di dalam menggali data dan informasi menggunakan beragam sumber data yang ada, artinya data yang sama digali dari sumber yang berbeda. Dengan demikian hasil data/informasi yang diperoleh akan lebih tepat atau lebih valid. Di dalam pelaksanaannya, dalam menggali sebuah informasi di lapangan digunakan narasumber birokrasi/elit desa, tokoh masyarakat, maupun masyarakat sasaran.

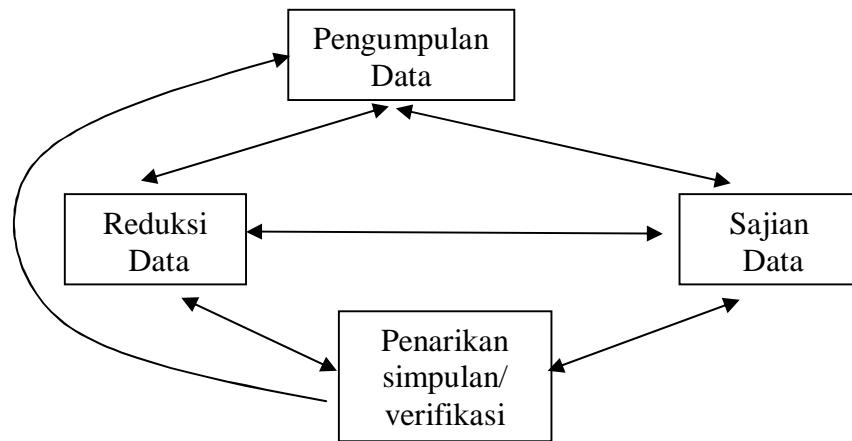
Selanjutnya peneliti juga menerapkan triangulasi situasi, maksudnya adalah “bagaimana penuturan seorang informan jika dalam keadaan ada orang lain bila dibandingkan dengan apabila hanya sendiri (Hamidi, 2004: 83).

## **G. Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan model analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman (Sutopo, 2002: 186). Model analisis interaktif ini ada tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan (verifikasi), aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Dalam melaksanakan proses ini peneliti aktivitasnya tetap bergerak diantara komponen analisis dengan pengumpulan datanya selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Selanjutnya peneliti hanya bergerak



diantara tiga komponen analisis tersebut sesudah pengumpulan data selesai pada setiap unitnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa dalam penelitian ini. Proses analisis model interaktif disajikan pada gambar 2. dibawah ini:



**Analisis Model Interaktif**  
Gambar 2

## **BAB IV**

### **SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sajian Data**

##### **1. Deskripsi Umum wilayah Kecamatan Grogol**

[Kecamatan](#) Grogol merupakan bagian dari wilayah [Kabupaten Sukoharjo](#), Propinsi [Jawa Tengah](#) yang terletak di sebelah selatan kota Surakarta. Kecamatan Grogol merupakan salah satu kota satelit [Kota Surakarta](#), karena di wilayah kecamatan tersebut telah dibuat komplek perumahan dan pertokoan Solo Baru yang merupakan pengembangan wilayah pemukiman dan pertokoan. Adapun batas wilayah Grogol yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kota Surakarta.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Baki, Kecamatan Gatak dan Kecamatan Kartasura, dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Polokarto.

Wilayah Grogol terdiri dari 14 Desa/ Kelurahan yaitu Desa Banaran, Desa Cemani, Desa Manang, Desa Sanggrahan, Desa Kwarasan, Desa Gedangan, Desa Madegondo, Desa Grogol, Desa Langenharjo, Desa Pondok, Desa Parangjoro, Desa Telukan, .Desa Pandeyan, dan Desa Kadokan.

Kecamatan Grogol dinilai sangat prospektif untuk beralih status menjadi kelurahan, hal itu didasarkan dari aspek kewilayahan, semua desa di Kecamatan Grogol kini memiliki jumlah penduduk di atas kuantitas rata-rata sebagai sebuah desa yakni di atas 5.000 jiwa. Selain itu, 14 desa tersebut juga diklaim memiliki penduduk dengan mata pencaharian kebanyakan bukan petani serta berada di lokasi yang sedang berkembang pesat. Di samping itu perubahan status tersebut didasarkan adanya perubahan serta perkembangan dari segi ekonomi serta aspek kewilayahan, semua desa di Kecamatan Grogol kini mengalami perubahan dan perkembangan signifikan.

Perkembangan tersebut bisa dilihat dari jumlah penduduk, mata pencaharian serta posisi Grogol sebagai wilayah peralihan penduduk dari Solo dan sekitarnya. Wilayah Kecamatan Grogol kini memang tengah mengalami perubahan. Bahkan, bila dicermati, secara faktual, wilayah Grogol ini tidak lagi pantas disebut sebagai desa. Keadaan serta perkembangan jumlah penduduk serta mengamati aktifitas dan mata pencaharian penduduk mayoritas bukan petani, tapi pegawai, pedagang, wiraswasta serta buruh. Sejak dua tahun lalu, wacana pengalihan status dari desa menjadi kelurahan memang telah mengemukakan di setiap kelurahan. Perkembangan peralihan kecamatan Grogol dari Desa ke Kota tersebut telah menjadi pembicaraan serius dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo. Wacana tersebut, kini memang tengah dikaji dan menjadi bahan perbincangan setiap kelurahan. Sebab, alih

status dari desa menjadi kelurahan memang tidak mudah. Banyak hal yang mesti diperhatikan. Jika ini memang terealisasi, bukan tidak mungkin akan ada pemekaran jumlah RT, RW lantaran padatnya jumlah penduduk. Selain, sistem pemilihan kepala desa nantinya tidak didasarkan pada pemilihan warga kepada perangkat/pamong desa. Tetapi menjadi otoritas Pemkab untuk menentukan siapa lurahnya. Namun demikian, alih status dari desa menjadi kelurahan ini, jelasnya tidak semudah membalikkan tangan. Semuanya didasarkan pada keinginan perangkat/ pamong desa, warga dan sejumlah lembaga di desa. Pasalnya, tanpa keinginan dari warga, mustahil adanya alih status dari desa jadi kelurahan. Terpisah Pemerintahan Desa Madegondo kini sudah sangat siap jika ada keputusan untuk alih status dari desa ke kelurahan. Pasalnya, usulah serta pandangan sejumlah warga terhadap Madegondo kini sudah berubah menjadi pandangan daerah berkembang seperti halnya Kota Solo. Berikut peta Wilayah Kecamatan Grogol



## 2. Data penduduk berdasarkan jenis kelamin dan mata pencaharian tahun 2006

### a. Data penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2006

Jenis kelamin penduduk kecamatan Grogol terbagi dalam kelompok laki-laki dan perempuan. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1.: Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 2006

no	desa	Laki-laki	Perempuan	jumlah	%
1	Desa Banaran	3,125	4,563	7,688	7.43%
2	Desa Cemani	2,683	3,456	6,139	5.94%
3	Desa Manang	2,365	4,685	7,050	6.82%
4	Desa Sanggrahan	2,653	4,896	7,549	7.30%
5	Desa Kwarasan	2,356	3,458	5,814	5.62%
6	Desa Gedangan	3,124	5,681	8,805	8.51%
7	Desa Madegondo	2,489	4,586	7,075	6.84%
8	Desa Grogol	3,452	4,213	7,665	7.41%
9	Desa Pondok	3,654	4,489	8,143	7.87%
10	Desa Langenharjo	3,486	4,457	7,943	7.68%
11	Desa Parangjoro	2,478	3,456	5,934	5.74%
12	Desa Telukan	2,962	4,657	7,619	7.37%
13	Desa Pandeyan	2,986	4,863	7,849	7.59%
14	Desa Kadokan	3,245	4,895	8,140	7.87%
	Jumlah	41,058	62,355	103,413	100.00%

Sumber: Data Monografi Kecamatan Grogol, 2006

### b. Data penduduk berdasarkan mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di kecamatan Grogol terbagi dalam kelompok Pegawai negeri, pedagang, buruh, wiraswasta dan pensiunan. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.: Data Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian tahun 2006

no	desa	pegawai	pedagang	buruh	wiraswasta	Pensiunan	jumlah	%
1	Desa Banaran	1,274	2,465	1,468	2,453	28	7,688	7.43%
2	Desa Cemani	1,265	2,462	964	1346	102	6,139	5.94%
3	Desa Manang	987	1,698	2,893	1386	86	7,050	6.82%
4	Desa Sanggrahan	1,246	2,463	2,986	780	74	7,549	7.30%
5	Desa Kwarasan	989	1,011	1,264	2486	64	5,814	5.62%
6	Desa Gedangan	1,675	1,324	2,586	3124	96	8,805	8.51%
7	Desa Madegondo	1,348	1,256	2,896	1489	86	7,075	6.84%
8	Desa Grogol	1,026	2,486	2,589	1519	45	7,665	7.41%
9	Desa Pondok	1,099	1,325	2,469	3216	34	8,143	7.87%
10	Desa Langenharjo	1,286	1,584	1,963	2986	124	7,943	7.68%
11	Desa Parangjoro	1,291	968	1,442	2169	64	5,934	5.74%
12	Desa Telukan	1,343	1,354	2,365	2489	68	7,619	7.37%
13	Desa Pandeyan	1,689	1,346	2,365	2355	94	7,849	7.59%
14	Desa Kadokan	2,648	1,245	2,136	2019	92	8,140	7.87%
	Jumlah	19,166	22,987	30,386	29,817	1,057	103,413	100.00%

Sumber: Data monografi Kecamatan Grogol, 2006

### 3. Diskriptif Wilayah Penelitian Langenharjo

Diskriptif wilayah Langenharjo dengan jumlah penduduk sekitar 7.943 jiwa berdasarkan kelompok umur, jenis pekerjaan, dan agama dengan dirinci sebagai berikut:

#### a. Kelompok Umur

Deskriptif wilayah Langenharjo berdasarkan kelompok umur penduduk, dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3: Deskriptif wilayah Langenharjo berdasarkan kelompok umur penduduk

No	Kelompok umur	Jumlah penduduk	Prosentase
1.	< 5 tahun	236	3%
2.	6 – 10 tahun	786	10%
3.	11 – 15 tahun	896	11%
4.	16 – 20 tahun	921	12%
5.	21 – 25 tahun	965	12%
6.	26 – 30 tahun	886	11%
7.	31 – 35 tahun	796	10%
8.	36 – 40 tahun	686	9%
9.	41 – 45 tahun	654	8%
10.	46 – 50 tahun	563	7%
11.	> 50 tahun	554	7%
Jumlah		7.943	100%

Sumber: Data monografi Kecamatan Grogol, 2006

Dari data tabel di atas berdasarkan kelompok umur penduduk Langenharjo adalah penduduk yang berumur < 5 tahun sebanyak 236 jiwa (3%), penduduk yang berumur 6 – 10 tahun sebanyak 786 jiwa (10%), penduduk yang berumur 11 – 15 tahun sebanyak 896 jiwa (11%), penduduk yang berumur 16 – 20 sebanyak 921 jiwa (12%), penduduk yang berumur 21 – 25 tahun sebanyak 965 jiwa (12%), penduduk yang berumur 26 – 30 tahun sebanyak 886 jiwa (11%), penduduk yang berumur 31 – 35 tahun sebanyak 796 jiwa (10%), penduduk yang berumur 36 – 40 tahun sebanyak 686 jiwa (9%), penduduk yang berumur 41 – 45 tahun sebanyak 654 jiwa (8%), penduduk yang berumur 46 – 50 tahun sebanyak 563 jiwa (7%), dan penduduk yang berumur > 50 tahun sebanyak 554 jiwa (7%). Jadi penduduk yang paling banyak adalah penduduk yang berumur 21-25 tahun yaitu sebanyak 965 jiwa (12%) dan penduduk yang paling

rendah/sedikit adalah yang berumur < 5 tahun tahun yaitu sebanyak 236 jiwa (3%).

b. Jenis Pekerjaan

Deskriptif wilayah Langenharjo berdasarkan kelompok jenis pekerjaan penduduk dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4: Deskriptif wilayah Langenharjo berdasarkan kelompok jenis pekerjaan penduduk

No	Jenis pekerjaan	Jumlah penduduk	Prosentase
1.	Pegawai	1286	16%
2.	pedagang	1584	20%
3.	buruh	1963	25%
4.	Wiraswasta	2986	38%
5.	Pensiunan	124	2%
Jumlah		7.943	100%

Sumber: Data monografi Kecamatan Grogol, 2006

Berdasarkan data di atas dapat diketahui diskriptif wilayah berdasarkan jenis pekerjaan penduduk adalah penduduk yang pekerjaannya pegawai sebanyak 1286 jiwa (16%), penduduk yang pekerjaannya pedagang sebanyak 1584 jiwa (20%), penduduk yang pekerjaannya buruh sebanyak 1963 jiwa (25%), penduduk yang pekerjaannya wiraswasta sebanyak 2986 jiwa (38%), dan penduduk yang pekerjaannya pensiunan sebanyak 124 jiwa (2%). Jadi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan yang paling banyak adalah wiraswasta yaitu sebanyak 2986 jiwa (38%), dan yang paling sedikit adalah pensiunan yaitu sebanyak 124 jiwa (2%).

c. Agama



Deskriptif wilayah penelitian Desa Langenharjo berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5: Deskriptif wilayah Langenharjo berdasarkan agama

No	Agama	Jumlah penduduk	Prosentase
1.	Islam	6145	77%
2.	Kristen	986	12%
3.	Katholik	785	10%
4.	Hindu	15	0%
5.	budha	12	0%
Jumlah		7.943	100%

Sumber: Data monografi Kecamatan Grogol, 2006

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa deskriptif penduduk Langenharjo yang beragama Islam adalah sebanyak 6145 jiwa (77%), penduduk yang beragama kristen adalah sebanyak 986 jiwa (12%), penduduk yang beragama katholik adalah sebanyak 785 jiwa (10%), penduduk yang beragama hindu adalah sebanyak 15 jiwa (0%), dan penduduk yang beragama Budha adalah sebanyak 12 jiwa (0%). Jadi deskriptif wilayah Langenharjo berdasarkan kelompok agama yang paling banyak adalah penduduk yang beragama islam yaitu sebanyak 6145 jiwa (77%), dan penduduk Langenharjo yang paling sedikit adalah penduduk yang beragama budha sebanyak 12 jiwa (0%).

#### **4. Proses Partisipasi masyarakat terhadap Proyek Penanggulangan Kemiskinan diperkotaan (P2KP)**

##### **a. Proses Partisipasi masyarakat dalam perencanaan P2KP**

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2007 s/d 9 Januari 2007 diperoleh gambaran tentang partisipasi masyarakat Desa Langenharjo Kecamatan Grogol terhadap P2KP telah terbentuk sejak sosialisasi P2KP yang dilakukan ditingkat desa yang

dilakukan melalui Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) oleh perangkat desa dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan tim fasilitator, khususnya di Desa Langenharjo, rembug kesiapan masyarakat dalam rangka sosialisasi P2KP tersebut telah dilakukan di balai Desa Langenharjo pada tanggal 21 Oktober 2005, yang selanjutnya untuk peran masyarakat tersebut dilakukan dengan sosialisasi secara intensif dan pendaftaran relawan warga. Melalui diskusi kelompok (*focus group discussion/FGD*) dan rembug warga dilakukan dalam rangka memahami kemiskinan di wilayahnya. Pendaftaran relawan di Desa Langenharjo telah dilakukan mulai tanggal 6 Nopember s/d. 16 Nopember 2005.

RKM dilakukan secara marathon sejak tanggal 21 Oktober 2005 di tingkat RT sampai dengan tingkat desa dengan mengundang semua warga secara terbuka. Rembug warga merupakan perwujudan dari proses partisipatif dalam rangka membangun kesepakatan masyarakat di calon lokasi desa sasaran untuk menetapkan kesiapan atau ketidaksiapan warga melaksanakan P2KP dan pendaftaran relawan. Berikut daftar kegiatan RKM di desa Langenharjo dalam perencanaan P2KP tahun 2006.

Tabel 4.3.: Daftar RKM di Desa Langenharjo dalam perencanaan P2KP tahun 2006

no	tanggal	Tempat	Acara
1	20 Nopember 2005	Di tingkat RT	Pendaftaran relawan warga
2	26 Nopember 2005	Di tingkat RT	Refleksi kemiskinan
3	2 Desember 2005	Di tingkat RW	Pemetaan swadaya

Sumber: Kantor Desa Langenharjo, 2006

Dalam melakukan diskusi kelompok tersebut masyarakat di dampingi oleh tim fasilitator untuk mencari cara kritis hubungan antara ciri-ciri kemiskinan, sebab akibat, sampai hal yang paling dalam sehingga dapat ditemukan akar permasalahan kemiskinan yang ada di lingkungan FGD tersebut. Kegiatan tersebut bertujuan dalam rangka merefleksikan kemiskinan yang ada di wilayah masing-masing kelompok. Melalui refleksi kemiskinan (RK) diharapkan cara pandang masyarakat yang terlibat dalam diskusi akan berubah dan berdampak pada:

- 1). Kesadaran masyarakat bahwa seharusnya mereka tidak menjadi bagian yang menambah bagian persoalan, tetapi merupakan bagian dari pemecahan masalah;
- 2). Tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur, merupakan awal dari tumbuhnya modal sosial;
- 3). Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya perbaikan, yang dimulai dari diri sendiri untuk memberikan sumbangan tenaga, waktu, pikiran, ruang bagi kelompok lain untuk berpartisipasi, berdemokrasi, untuk kesejahteraan masyarakat.

Refleksi kemiskinan bertujuan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat mengenai permasalahan kemiskinan yang bersumber

kepada lunturnya nilai-nilai kemanusiaan dan membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka harus menjadi bagian dari pemecahan masalah bukan sebaliknya. Dengan adanya refleksi kemiskinan diharapkan adanya kriteria kemiskinan di kelurahan masing-masing, dan kesadaran kritis peserta terhadap permasalahan kemiskinan dan akar permasalahannya yang bersumber pada lunturnya nilai-nilai kemanusiaan serta menumbuhkan adanya kepedulian dan kesepakatan dari peserta untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

Sebelum penyelenggaraan diskusi kelompok kerja atau panitia terlebih dahulu harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menentukan siapa yang akan diundang (peserta diskusi)
- 2) Bagaimana caranya mengundang (pengumuman terbuka dengan selebaran, diumumkan di mesjid, dalam pertemuan kelompok arisan dan sebagainya dan atau undangan tertutup)
- 3) Waktu dan tempat pelaksanaan, harus disepakati bersama masyarakat.
- 4) Biaya pertemuan, untuk alat tulis seperti kertas plano dan spidol besar dan konsumsi sederhana. Masyarakat bisa didorong untuk swadaya agar terbiasa berkontribusi untuk kegiatan-kegiatan bagi kepentingan mereka.

Informasi tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan P2KP tersebut disampaikan oleh informan Didik (Wawancara, tanggal 10 Oktober 2006) mengatakan bahwa: “sejak adanya sosialisasi P2KP

setiap warga di sini menyambut gembira, dan selalu berperan aktif dalam pembentukan kepanitiaan dan relawan”.

Hal senada disampaikan oleh Mujiman (wawancara, tanggal 10 Oktober 2006) yang mengatakan bahwa: “walaupun kami hanya sebatas urun rembug, tapi kami sangat gembira merasa diuwongke dalam kegiatan P2KP ini. Khususnya dalam menyusun rencana kegiatan untuk dijadikan proposal”

Pernyataan tersebut dipertegas oleh informan Suyat (wawancara tanggal 10 Oktober) yang menyatakan bahwa: “pada dasarnya warga di desa Langenharjo di sini sangat mudah untuk digerakkan terutama dalam membangun lingkungannya, terlebih dengan

b. Proses Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan P2KP

1) Pelaksanaan Pembangunan fisik

Proses Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan P2KP diawali dari kegiatan perangkat desa beserta masyarakat dan sukarelawan melakukan kegiatan pemetaan swadaya (PS) yang merupakan sekumpulan kegiatan di mana masyarakat melakukan kegiatan identifikasi permasalahan, potensi dan kebutuhan bersama secara kritis berdasarkan pada kekayaan informasi masyarakat setempat. Menurut kepala Desa Langenharjo, pemetaan swadaya ini dimaksudkan agar masyarakat secara bersama-sama menilai dan merumuskan sendiri persoalan yang dihadapinya dan merumuskan

kebutuhan nyata mereka untuk menanggulangi kemiskinan dengan berbasis pada hasil refleksi kemiskinan.

Adapun tujuan dari pemetaan swadaya ini menurut informan Mudiyono (observasi tanggal 8 Oktober 2006) adalah:

- a) Mendorong masyarakat membangun kebersamaan;
- b) Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat akan kondisi dan persoalan yang dihadapi;
- c) Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam melakukan proses identifikasi masalah, potensi, peluang, tantangan dan hambatan di dalam lingkungannya;
- d) Mendorong kesadaran krisis masyarakat bahwa penyelesaian persoalan kemiskinan harus mengintegrasikan potensi semua pihak dan bertumpu pada potensi diri daripada tergantung pada bantuan luar;
- e) Pembelajaran prinsip dan nilai melalui kegiatan pemetaan masalah kemiskinan dan potensi sumber masyarakat;
- f) Menumbuhkan rasa tanggungjawab individu dan masyarakat untuk menyadari permasalahan nyata yang terjadi di wilayahnya; dan
- g) Meningkatkan kepedulian dan kerelawan untuk mengatasi kondisi nyata di wilayahnya.

Bentuk partisipasi masyarakat Desa Langenharjo dalam pelaksanaan P2KP berupa swadaya masyarakat dalam pembuatan

saluran air  $20\text{m}^2$  dan pengecoran jalan  $10\text{m}^2$  seperti terlihat pada tabel relaisasi pembangunan fisik berikut:



**Tabel 4.7.: Realisasi Kegiatan pembangunan fisik di Desa  
Langenharjo proyek P2KP tahun 2006**

No	Komponen Pembiayaan	Volume	Harga satuan	Sumber pembiayaan		
				P2KP	Swadaya	Jumlah
<b>A</b>	<b>Bahan:</b>					
	1. PC. 40kg	70 sak	30.000,-	2.100.000,-		2.100.000,-
	2. Pasir Pasang	30 m <sup>3</sup>	100.000,-	3.000.000,-		3.000.000,-
	3. Batu bata	60 m <sup>3</sup>	200.000,-	1.200.000,-		1.200.000,-
	4. Pasir Urug	8 m <sup>3</sup>	50.000,-		400.000,-	400.000,-
	5. Kricak	5 m <sup>3</sup>	130.000,-		650.000,-	650.000,-
<b>B</b>	<b>Alat:</b>					
	1. Cetok	4 bh	25.000,-		100.000,-	100.000,-
	2. Sekop	3 bh	35.000,-		105.000,-	105.000,-
	3. Ember	10 bh	6.000,-		60.000,-	60.000,-
	4. Pacul	4 bh	35.000,-		140.000,-	140.000,-
	5. Linggis	2 bh	30.000,-		60.000,-	60.000,-
	6. Benang	4 bh	2.500,-		10.000,-	10.000,-
<b>C</b>	<b>Upah:</b>					
	<b>Pekerjaan</b>					
	1. Upah Galian	30	20.000,-		600.000,-	600.000,-
	2. Upah pasang bata					
	- Tukang	20HOK	30.000,-		600.000,-	600.000,-
	- Tenaga	25HOK	20.000,-		500.000,-	500.000,-
	3. Upah Plester					
	- Tukang	16HOK	30.000,-		480.000,-	480.000,-
	- Tenaga	16HOK	20.000,-		320.000,-	320.000,-
<b>D</b>	<b>Administrasi:</b>					
	Materai	3 bh	6.000,-	18.000		
	Dokumentasi	3 bh	1.500,-	4.500,0		
	Buat laporan	3 bh	25.000,-	75.000,-		
	Bolpiont	1 bh	2.500,-	2.000,-		
	<b>Jumlah</b>			6.400.000,-	4.025.000,-	10.425.000,-

Sumber: Laporan penyelesaian pekerjaan BKM Desa  
Langenharjo, 2006

Dari tabel di atas terlihat bahwa peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan dalam pendanaan relatif cukup besar yaitu sebesar Rp.4.025.000,- dari keseluruhan dana Rp.10.425.000,- yang berarti 24,28% telah ditanggung oleh warga masyarakat. Peran warga

masyarakat desa Langenharjo tersebut bukan hanya terbatas pada dana yang disumbangkan untuk pembangunan saja, melainkan bentuk kebersamaan dalam kerja bakti masyarakat khususnya setiap hari minggu, hingga pelaksanaan proyek berakhir, hal ini seperti terlihat pada kerja bhakti masyarakat pada saat membersihkan jalan dalam rangka persiapan pengecoran jalan (foto dokumentasi, tanggal 23 Januari 2006). Kegiatan tersebut menggambarkan bentuk kebersamaan masyarakat dalam membangun lingkungannya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informat Hartono (wawancara, tanggal 23 Oktober 2006) menyatakan bahwa:

“rata-rata warga Langenharjo sangat mudah untuk diajak gotong royong melakukan kerja bhakti, dan sebagian masyarakat di sini masih memiliki rasa pekewuh apabila tidak ikut kerja bhakti bersama. Kesadaran warga masyarakat untuk membangun desanya sendiri dari dulu selalu terjaga, minimal 3 bulan sekali warga di sini mengadakan kerja bhakti. Terlebih menjelang Agustusan”.

Pembangunan fisik tersebut dirasakan oleh warga merupakan hal yang sangat menggembirakan bagi warga. Karena dengan bantuan dana dari P2KP tersebut warga tergerak untuk melakukan pembangunan kembali dan bergotong royong untuk ikut serta berperan aktif baik dari segi pendanaan maupun dari segi tenaga.

Peran serta masyarakat dalam pendanaan seperti terungkap dalam wawancara dengan Warso (wawancara, tanggal 15 Nopember 2006) yang menyatakan:

“untuk pembangunan saluran air dan pengaspalan jalan setiap warga dibebani dana sebesar Rp.25.000,- - Rp. 75.000,- tergantung dari status sosial warga dalam masyarakat, artinya bagi warga yang dipandang mampu dibebani dana lebih besar dari warga yang kurang mampu. Penentuan besar kecilnya dana tersebut berdasarkan pada musyawarah warga yang dilaksanakan di RT. Masing-masing. Pada dasarnya saya pribadi merasa senang karena dengan sumbangan yang kecil, diperoleh hasil yang bermanfaat yaitu saluran air di desa ini jadi bersih dan lancar. Jalan yang tadinya banyak berlubang sekarang menjadi mulus”.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kasmidi (wawancara, tanggal 15 Nopember 2006) yang menyatakan:

“Untuk besarnya sumbangan, saya kena beban Rp. 40.000,- untuk pembangunan saluran air dan jalan. Kalau tanpa bantuan P2KP mungkin warga bisa kena sumbangan dua kali lipat. Tetapi dengan adanya proyek P2KP tersebut beban warga untuk membangun lingkungannya terutama saluran air dan pengaspalan jalan menjadi berkurang. Yang lebih menggembirakan lagi, dengan adanya proyek P2KP tersebut warga di sini mulai bergerak untuk bekerja bhakti bareng-bareng, yang mana kerja bhakti semacam ini sudah jarang sejak bong-bongan itu”.

Peran warga masyarakat khususnya di desa Langenharjo telah dibuktikan dalam peran warga dalam pemberian sumbangan secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari manapun, di samping pendanaan warga terbukti berperan serta secara langsung untuk melakukan kerja bhakti yang merupakan salah satu bentuk rukun warga, hal ini seperti terungkap dalam wawancara dengan informan Agung Haryanto (wawancara, tanggal 16 Oktober 2006)

yang merupakan ketua Panitia Pembangunan fisik di Desa Langenharjo sebagai berikut:

“Saya sangat gembira melihat warga begitu bersemangat dalam melakukan kegiatan gotong royong, ternyata warga di sini menyambut baik proyek P2KP tersebut, khususnya pada pembangunan fisik. Demikian pula dalam penarikan dana dari masyarakat, ternyata dari dana swadaya yang direncanakan dapat tercapai dalam waktu yang tepat, sehingga pelaksanaan pembangunan saluran air dan pengaspalan jalan, dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya seperti terlihat sekarang ini”.

## 2) Bidang Ekonomi

Desa Langenharjo RW I s.d VI merupakan desa yang cukup banyak warga yang membutuhkan bantuan untuk Modal usaha kecil, sebagian besar latar belakang kurang mampu hal ini telah melakukan serangkaian kegiatan dalam upaya penanganan usaha kecil yang kurang berkembang, maka melalui implementasi pelaksanaan PJM Pronangkis dan pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berupa Dana bergulir. Dalam pelaksanaannya mulai dari tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan seluruh rangkain itu perlu diketahui oleh masyarakat sehubungan dengan itu, diperlukan laporan sebagai dari Upaya menyebarluaskan informasi terhadap masyarakat.

Ketika pemerintah meluncurkan P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) di desa Langenharjo, hal ini menjadi harapan akan terselesaikannya masalah yang dihadapi oleh warga. Di bidang ekonomi program P2KP

dimaksudkan untuk: (a) mengembangkan aneka usaha kecil menengah; (b) menambah modal kelompok pra koperasi; dan (c) Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum mempunyai usaha untuk membuka usaha.

Proses pelaksanaan Dana bergulir di Desa Langenharjo, tahap II telah dicairkan sebesar Rp. 68.915.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dalam pelaksanaannya dana tersebut telah dipinjamkan kepada masyarakat sebanyak 23 KSM atau kelompok usaha kecil. Pelaksanaan P2KP di bidang ekonomi diawali dengan sosialisasi UPK kepada pengurus PKK, pengurus RT, RW setiap pertemuan, dengan cara memberikan penjelasan tentang penyusunan proposal untuk mengajukan pinjaman Dana bergulir. Dari proposal yang dibuat oleh KSM yang telah diterima oleh panitia, ditindaklanjuti dengan rapat panitia untuk menentukan dana yang diajukan, selanjutnya dikonsultasikan ke UPK, kemudian UPK mengajukan ke BKM. Seleksi dan pembahasan tentang prioritas persetujuan dilakukan oleh BKM. Hasil seleksi dan pembahasan oleh BKM direalisasikan melalui masing-masing Panitia /KSM.

Peran warga masyarakat di bidang ekonomi terlihat dari kegiatan pengajuan dana dan keterlibatan UPK. Penyaluran dana bergulir di desa Langenharjo dikelola oleh “BKM Berkah

Makmur”. Realisasi kegiatan nama-nama KSM yang sudah mendapat pinjaman Dana bergulir dengan rincian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.8.: Dana bergulir “BKM Berkah Makmu” di Desa Langenharjo dalam perencanaan P2KP tahun 2006

No	Nama ketua KSM	Alamat	Nilai usulan kegiatan (Rp)	BLM P2KP (Rp)	Tanggal penerimaan
1	Sugeng	Langenharjo, Rt.02/I	2.600.000	2.600.000	10 Juni 2006
2	Harini	Langenharjo, Rt.05/II	2.600.000	2.600.000	10 Juni 2006
3	Haryono	Sengon, Rt.01/III	3.500.000	3.500.000	10 Juni 2006
4	Suti Rahayu	Sengon, Rt.01/III	3.500.000	3.500.000	10 Juni 2006
5	Suyati	Bacem, Rt.04/I	3.000.000	3.000.000	10 Juni 2006
6	M.M Wahyuni	Bacem, Rt.05/I	3.000.000	3.000.000	10 Juni 2006
7	Sri Hariyani	Bacem, Rt.06/I	3.000.000	3.000.000	10 Juni 2006
8	Mulyani	Bacem, Rt.06/I	3.000.000	3.000.000	10 Juni 2006
9	Suwondo	Pepe, Rt.01/IV	3.000.000	3.000.000	10 Juni 2006
10	Paino	Pepe, Rt.02/IV	3.000.000	3.000.000	10 Juni 2006
11	Joko Santosa	Tlobong, Rt.02/VI	3.500.000	3.500.000	10 Juni 2006
12	Sulastri	Tlobong, Rt.03/VI	3.000.000	3.000.000	10 Juni 2006
13	Nantyo	Pepe, Rt.01/V	2.500.000	2.500.000	10 Juni 2006
14	Minnurdin	Tlobong, Rt.01/VI	3.000.000	3.000.000	10 Juni 2006
15	Saryati	Pepe, Rt. 03/VI	3.000.000	3.000.000	24 Juni 2006
16	Sri Suryani	Pepe, Rt.02/V	3.500.000	3.500.000	24 Juni 2006
17	Dwi Radjiman	Pepe,Rt.04/V	2.500.000	2.500.000	24 Juni 2006
18	Sukiyem	Jati, Rt.3/III	3.000.000	3.000.000	24 Juni 2006
19	Hartono	Tlobong,Rt.04/VI	3.000.000	3.000.000	24 Juni 2006
20	Sukatmi	Bacem, Rt.06/I	3.000.000	3.000.000	24 Juni 2006
21	Dwi Purwanti	Langenharjo,Rt.03/II	2.600.000	2.600.000	24 Juni 2006
22	Tri Mariyati	Langenharjo,Rt.04/II	2.615.000	2.615.000	24 Juni 2006
23	Tunjiyah	Langenharjo,Rt.01/II	3.500.000	3.500.000	24 Juni 2006
Jumlah			68.915.000	68.915.000	

Sumber: Laporan penyelesaian pekerjaan BKM Desa Langenharjo, 2006

Dari tabel di atas terlihat bahwa besarnya dana bergulir yang diberikan kepada warga masyarakat berkisar antara Rp.2.500.000,00 sampai Rp.3.500.000,00, dan disampaikan pada bulan Juni 2006.

Hasil wawancara dengan sejumlah informan menunjukkan bahwa bantuan dengan P2KP masyarakat desa Langenharjo, khususnya yang telah memiliki usaha menyambut baik, dan dana bergulir yang ada telah dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Penyaluran dana bergulir di desa Langenharjo merupakan

implementasi perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis). Hal ini terungkap dalam wawancara dengan informan Sugeng (wawancara, 18 Oktober 2006) yang mengatakan:

“Saya mempunyai usaha produksi karak, dengan modal yang sangat kecil tadinya hanya dapat memproduksi karak dengan bahan 10 Kg setiap hari, namun setelah kami mendapatkan bantuan dari P2KP, saya bisa memproduksi sampai 20 Kg, bahkan terkadang sampai 25 Kg perhari. Walaupun pinjaman tersebut hanya 12 bulan, namun pada prinsipnya saya merasa terbantu. Mudah-mudahan setelah dana tersebut saya kembalikan saya tetap dapat membuat karak dalam jumlah yang sama.

Hal tersebut diungkapkan pula oleh informan Dwi Radjiman (wawancara, 19 Oktober 2006) yang menyatakan:

”Dengan adanya bantuan dana bergulir P2KP sangat membantu dalam usaha saya membuat blangkon, dengan dana bergulir sebesar Rp.3.500.000,- dapat saya manfaatkan untuk menambah persediaan bahan, biasanya saya selalu ngambil bahan dengan cara “ngalap nyaur”, artinya kalau saya sudah bayar, saya baru dapat ambil bahan lagi, ya tentunya harganya cukup mahal. Tetapi dengan modal pinjaman yang berupa dana bergulir tersebut, saya sekarang dapat membeli bahan secara langsung, dan memilih bahan dengan harga yang sesuai”.

Pernyataan tersebut di atas ditegaskan oleh ketua BKM Wasalah, SH (wawancara, tanggal 19 Oktober 2006) yang menyatakan:

“Warga masyarakat desa Langenharjo, khususnya yang tergolong dalam pengusaha kecil, sangat antusias, sebenarnya alokasi dana bergulir sebesar itu sangat kurang untuk menangani permasalahan perekonomian di desa Langenharjo. Bagi pengusaha kecil jumlah dana yang diterima tersebut tergolong besar. Dalam pengembalian dana bergulir, hingga saat ini masyarakat sangat konsekuen yaitu dengan mengangsur tepat waktu setiap bulannya”.



Pelaksanaan pemberian dana bergulir kepada masyarakat disosialisasikan melalui pengurus PKK, Pengurus RT, RW, adapun sosialisasi tersebut meliputi tata cara penyusunan proposal, penentuan dana yang diajukan. Proposal yang telah dibuat selanjutnya disampaikan kepada UPK untuk dikonsultasikan, selanjutnya UPK mengajukan kepada BKM untuk diadakan pembahasan. Sosialisasi dan prosedur pengajuan dana bergulir tersebut terungkap dalam wawancara dengan informan Sulastri (wawancara, tanggal 18 Oktober 2006) yang menyatakan bahwa:

“Dana bergulir saya ketahui waktu saya arisan PKK di tempat bu Mulyani, begitu saya mendapat penjelasan tentang dana bergulir, saya buru-buru membuat proposal, setelah saya konsultasikan dengan Bu Tetijaya Ariani (ketua Unit Pengelola Keuangan/UPK) terus saya mendapat bantuan sebesar Rp.3.000.000,- pada tanggal 10 Juni 2006, dan Alhamdulillah angsuran saya setiap bulannya lancar-lancar saja”.

Sosialisasi dan prosedur pengajuan dana bergulir dinyatakan pula oleh informan Suwondo (wawancara, tanggal 20 Oktober 2006), yang menyatakan bahwa:

“Saya mengetahui dana bergulir waktu pertemuan Bapak-Bapak di rumah Pak Mudiono,SE. kebetulan saya mempunyai kelompok usaha pembuatan batu bata, setelah saya sampaikan kepada anggota kelompok usaha saya, saya mengajukan ke UPK, selanjutnya tanggal 10 Juni 2006 saya mendapat dana bergulir sebesar Rp.3.000.000,”

Prosedur pengajuan bantuan dana bergulir dipandang oleh sebagian warga cukup mudah, hal ini terungkap dalam wawancara

dengan informan Suyati (wawancara, tanggal 19 Oktober 2006)

yang menyatakan bahwa:

“Prosedur dalam pengajuan pinjaman di P2KP ini bagi saya sangatlah mudah, karena tanpa agunan, dan bunganyapun sangat ringan sekali dibanding dengan meminjam ditempat lain, kami hanya dikenai bunga sebesar 1,5% perbulan. Antara waktu pengajuan dengan realisasi sekitar satu setengah bulan”.

Dari wawancara di atas terlihat bahwa bantuan dana bergulir P2KP telah dapat dimanfaatkan oleh sebagian warga masyarakat desa Langenharjo, dengan dana bergulir masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam pengembangan usaha yang telah dilakukan sebelumnya, namun karena kekurangan modal maka sebagian masyarakat terhenti dari kegiatan usahanya. Program P2KP bidang ekonomi telah dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi kalangan pemuda di desa Langenharjo, melalui usaha kedai susu dan Hik di kawasan Solo Baru. Hal ini seperti terungkap dalam wawancara dengan informan Minnurdin (wawancara, tanggal 22 Oktober 2006) yang menyatakan:

“Tadinya kami tidak memiliki kegiatan apa-apa, setelah adanya dana bergulir dari P2KP, kami mencoba mengajukan proposal untuk membuka usaha penjualan susu murni di kawasan Solo Baru, dan kami diberi dana pinjaman bergulir sebesar Rp. 3.500.000,- yang kami terima tanggal 10 Juni 2006, dana tersebut kami pergunakan untuk pengadaan tenda, meja, kursi, dan peralatan lainnya serta untuk modal lancar, sehari kami bisa menjual susu minimal 8 liter, memang untuk mengembalikan kami kadang terlambat, tapi tidak sering”

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dengan P2KP masyarakat desa Langenharjo, telah berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dengan melakukan berbagai usaha, walaupun menurut pengakuan pengurus BKM Berkah Makmur masih terdapat kendala-kendala yaitu, sering terjadi kelambatan angsuran dari Kelompok Swadaya Masyarakat, dan UPK terpaksa harus mendatangi ke KSM yang belum mengangsur, namun hal tersebut dirasa wajar. Hal ini seperti terungkap dalam wawancara dengan informan Rika Dhuha Ningrum selaku bendahara BKM (wawancara, tanggal 22 Oktober 2006) yang menyatakan:

“Untuk pelaksanaan dana bergulir, memang masih terdapat beberapa kendala, antara lain dari 23 KSM, ada 3 atau 4 KSM yang kadang tidak tepat melakukan angsuran, tapi kami juga maklum mungkin mereka baru pertama kali melakukan usaha, kebetulan KSM yang sering terlambat melakukan angsuran tersebut adalah KSM yang baru pertama kali melakukan usaha, ya.. penyelesaiannya kami harus datang ke KSM. Baiknya sampai saat ini tidak ada dana bergulir yang macet sama sekali”.

### 3) Bidang Sosial

Kegiatan di bidang sosial proyek P2KP di desa Langenharjo dilaksanakan dalam bentuk pasar murah, tanggal 5 s/d. 19 Agustus 2006, kegiatan tersebut sekaligus dikaitkan dengan peringatan Hari Ulang Tahun RI. Teknik pelaksanaan kegiatan sosial tersebut dilakukan dengan membagi kupon pasar murah berupa potongan harga sebesar 40% terhadap warga pra sejahtera dari barang-barang yang berupa beras, minyak goreng, dan gula pasir.

Besarnya potongan yang diberikan sebesar 40% dari harga barang yang telah ditetapkan yaitu 5 Kg beras C4, 1 kg minyak goreng, dan 1 kg gula pasir dengan total harga Rp. 31.650. dari harga tersebut warga yang telah ditetapkan oleh Panitia hanya membayar Rp.28.500,-

Adapun Warga yang berhak memperoleh kupon diskont pasar murah tersebut seperti terlihat pada tabel 4.7. berikut:

Tabel 4.9.: Daftar warga pra sejahtera desa Langenharjo Kecamatan Grogol tahun 2006 yang memperoleh kupon

no	Wilayah	jumlah	%
1	Bacem RT. 02/I	2 orang	1.14%
2	Bacem RT. 01/I	4 orang	2.27%
3	Bacem RT. 03/I	17 orang	9.66%
4	Bacem RT. 04/I	6 orang	3.41%
5	Bacem RT. 06/I	7 orang	3.98%
6	Bacem RT. 01/II	6 orang	3.41%
7	Bacem RT. 02/II	9 orang	5.11%
8	Bacem RT. 03/II	10 orang	5.68%
9	Bacem RT. 01/III	22 orang	12.50%
10	Bacem RT. 02/III	1 orang	0.57%
11	Bacem RT. 03/III	4 orang	2.27%
12	Bacem RT. 04/III	5 orang	2.84%
13	Bacem RT. 05/III	4 orang	2.27%
14	Bacem RT. 01/IV	11 orang	6.25%
15	Bacem RT. 02/IV	14 orang	7.95%
16	Bacem RT. 01/V	15 orang	8.52%
17	Bacem RT. 02/V	9 orang	5.11%
18	Bacem RT. 03/V	22 orang	12.50%
19	Bacem RT. 04/V	8 orang	4.55%
	jumlah	176 orang	100.00%

Sumber: BKM Desa Langenharjo, 2006

Dari tabel di atas terlihat bahwa dalam kegiatan sosial, yang dilaksanakan dengan membagikan kupon potongan harga sebesar

30%, warga masyarakat yang paling banyak mendapatkan kupon adalah warga Bacem RT.01/III dan RT.03/V. sedangkan warga masyarakat yang paling sedikit mendapatkan kupon adalah warga Bacem RT. 02/III. Kegiatan sosial P2KP tahun 2006 difokuskan di desa Bacem.

Berdasarkan pengakuan informan fokus di desa Bacem tersebut atas pertimbangan pemetaan swadaya dan refleksi kemiskinan bahwa di desa tersebut masih banyak terdapat warga yang tergolong pra sejahtera, sehingga untuk proyek P2KP tahap ke II khususnya di bidang sosial diarahkan ke desa tersebut.

Pelaksanaan program P2KP Desa Langenharjo, khususnya di bidang sosial diimplementasikan dalam bentuk pasar murah, dan pelatihan. Masyarakat menyambut baik terhadap pelaksanaan pasar murah, dan pelatihan yang dilakukan oleh BKM, hal ini terungkap dalam wawancara dengan informan Walidi (wawancara, tanggal 24 Oktober 2006) yang menyatakan:

“Kami sangat senang dengan pemberian kupon potongan sebesar 40%, walaupun jumlahnya sedikit, tetapi lumayanlah untuk orang kecil semacam kami, sebenarnya kami sangat mengharap pasar murah ini dilaksanakan sering-sering, tapi gimana wong itu semua yang ngatur pemerintah”

Pernyataan senada disampaikan oleh Sastro Wiyono (wawancara, tanggal 23 Oktober 2006) yang menyatakan: “Wah ya senang to, wong dapat diskon 40%, Cuma sayangnya hanya sekali.”

Di samping pasar murah dan pemberian kupon diskon kepada masyarakat yang tergolong pra sejahtera, kegiatan bidang sosial dilaksanakan dalam bentuk pelatihan menjahit dan bordir, di Balai Desa Langenharjo. Pelatihan diikuti oleh 20 orang peserta, dimulai tanggal 2 Agustus 2007 sampai 16 September 2007, partisipasi masyarakat dalam pelatihan menjahit dan bordir tersebut seperti tercermin dalam wawancara dengan Sri Lestari (wawancara, tanggal 23 Oktober 2006) sebagai berikut:

“Wah saya sangat senang mengikuti kursus di Balai Desa, habis gratis, dan memang saya kepingin bisa membuat baju sendiri itu sudah lama sekali, apalagi diajari bordir segala, walaupun bordirnya hanya sedikit, tapi saya merasa senang, dan saya berharap pelatihan semacam ini dapat ditingkatkan”.

Pernyataan senada disampaikan oleh informan Kartono (wawancara, tanggal 23 Oktober 2006) yang menyatakan bahwa:

“Saya sangat berterima kasih, anak saya dapat diikutkan dalam kursus di Balai Desa, kan dekat sini ada pabrik garmen, mestinya nanti saya berharap setelah bisa menjahit anak saya diterima di pabrik garmen sini, kan kerjanya nggak jauh-jauh dari rumah, kalau nggak ya menerima jahitan di rumah kan juga bisa”.

Dari pernyataan ke tiga informan tersebut terlihat bahwa partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Proyek P2KP di desa Langenharjo mendapat tanggapan yang positif, dari kegiatan sosial yang berupa pasar murah dan pelatihan, dapat terlaksana dengan baik, hal ini seperti terungkap dalam wawancara dengan informan Wasalah (wawancara, tanggal 23 Oktober 2006) yang menyatakan:

“Dari 176 warga masyarakat yang mendapatkan kupon diskon ternyata semuanya di tukar pada saat pasar murah, dan semuanya

diambil sendiri oleh yang berhak menerima, sehingga tidak ada kupon yang diambil oleh orang lain, atau mungkin dijual ke orang lain. Mengenai pelaksanaan kursus menjahit dan bordir, dari 20 orang semuanya tidak ada yang berhenti ditengah jalan”.

Sambutan positif terhadap pelaksanaan pasar murah dan kursus menjahit dan bordir di desa Langenharjo tersebut terungkap dalam wawancara dengan informan Indah Sukarni (wawancara, tanggal 24 Oktober 2006) yang menyatakan bahwa: “pelaksanaan pasar murah sangat menggembirakan warga di sini, di samping masyarakat dapat hiburan, masyarakat juga diberi kesempatan untuk belanja murah”.

Demikian halnya dengan pelaksanaan kursus menjahit dan bordir, menurut informan Suparmi (wawancara, 24 Oktober 2006) menyatakan bahwa: “warga sangat antusias untuk mengikuti kursus, bahkan ada yang kecewa karena tidak bisa ikut, kan jumlahnya terbatas hanya 20 orang”.

c. Proses Partisipasi Masyarakat dalam Monitoring P2KP

Evaluasi dan monitoring pelaksanaan P2KP dilakukan oleh warga melalui BKM, laporan hasil pelaksanaan dibuat secara tertulis oleh masing-masing panitia disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dan bukti fisik berupa dokumentasi hasil pelaksanaan. Dalam laporan panitia tersebut sekaligus di sertakan kendala-kendalan yang menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan P2KP.

Dari dokumen laporan panitia berbagai kendala yang timbul adalah sebagai berikut:

- 1) Kendala di bidang pembanguna fisik

Kendala dan upaya dalam mengatasi pelaksanaan kegiatan Pembuatan Saluran air dan Pengecoran jalan RT 01 dan 02 RW 04 secara detail dapat dilihat di bawah ini:



Tabel 4.10.: Kendala dan Upaya Mengatasi Pembuatan Saluran air di Desa Langenharjo dalam perencanaan P2KP tahun 2006

No	Kategori kendala	Kendala	Cara pemecahan	Status akhir
1	Internal	1. Sulitnya realisasi dana swadaya 2. Masih belum semua warga ikut mengerjakan	Direbug, dimintai dengan cara didatangi Ditemui dengan pengurus RT dan tokoh masyarakat	Selesai Selesai
2	Eksternal	Hujan	Menunggu hujan selesai	Selesai

Sumber: Laporan penyelesaian pekerjaan BKM Desa Langenharjo, 2006

Di samping membuat laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan pembangunan fisik, untuk memonitor perkembangan dan pemeliharaan hasil pembangunan tersebut warga membentuk Panitia yang bertujuan untuk memelihara rasa kebersamaan warga dalam selalu berperan dalam pembangunan lingkungan melalui kerja bhakti secara kontinyu. Pembentukan panitia dilakukan oleh warga melalui musyawarah warga seperti yang dilakukan oleh warga RW 04 Desa Langenharjo Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo tanggal 03 April 2006, dengan susunan seperti di bawah ini:

Ketua : Agung Hariyanto, SH  
Sekretaris : Sukimin, AP  
Bendahara : Suwondo  
Seksi Pembangunan : 1. Mudiyono, Sp  
2. Paino DS

Peran warga dalam melestarikan kebersamaan melalui kerja bakti didukung dengan pendanaan yang seluruhnya dibebankan kepada warga masyarakat dengan cara melakukan iuran sebesar

Rp.2.000,-/ bulan. Besarnya iuran tersebut berdasarkan kesepakatan warga melalui rapat tingkat RT.

2) Kendala dalam pelaksanaana di bidang ekonomi

Kendala dan penyelesaian dalam pelaksanaan simpan pinjam Dana bergulir ada beberapa kendala yaitu sering terjadi keterlambatan angsuran dari KSM, penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dari anggota KSM dan untuk penyelesaiannya adalah UPK terpaksa harus mendatangi ke KSM yang belum mengangsur.

3) Kendala di bidang Sosial

Sebagian kendala yang timbul dalam pelaksanaan bidang sosial adalah adanya pembagian kupon yang sebagian warga dianggap tidak merata, hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh banyaknya warga yang kurang mampu sehingga potongan harga sebesar 30% benar-benar sangat bermanfaat.

Hasil wawancara terhadap informan Hartanto (Wawancara, tanggal 23 Oktober 2006) menyebutkan bahwa:

“Warga selalu memberikan masukan-masukan kepada panitia dalam melaksanakan kegiatan P2KP, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan pembagian kupon, karena hal tersebut sangat sensitif, jangan sampai nanti justru masyarakat bergejolak akibat ketidakpuasan dalam memberikan kupon”.

Evaluasi pelaksanaan P2KP juga disampaikan oleh informat Tulus (Wawancara, tanggal 23 Oktober 2006) yang menyatakan:

“Setelah selesai pelaksanaan proyek, panitia menyusun laporan dan dirapatkan di tingkat RT. Terlebih dahulu, sehingga laporan yang telah disusun tersebut ditanda tangani oleh panitia dan warga telah mendengarkan serta memberikan masukan-masukan seperlunya.

## **B. Pembahasan**

Bentuk partisipasi masyarakat Desa Langenharjo terhadap P2KP di Desa Langenharjo, terbagi dalam tiga bentuk partisipasi, yaitu partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan fisik, partisipasi dalam bidang ekonomi, dan partisipasi dalam bidang sosial. Bentuk partisipasi tersebut berupa peran warga masyarakat Desa Langenharjo dalam rangka menyusun perencanaan, melaksanakan, maupun melakukan evaluasi dan monitoring tentang pelaksanaan P2KP, adapun bentuk partisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Proses Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pembangunan Fisik P2KP**

#### **a. Peran masyarakat dalam perencanaan**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap warga tentang perencanaan P2KP terbukti bahwa warga masyarakat telah banyak terlibat dalam menyusun rencana-rencana kerja, membuat refleksi kemiskinan dan ikut memetakan kondisi masyarakat yang ada dengan melalui rapat-rapat yang dilakukan oleh BKM.

Proses yang dilakukan oleh masyarakat desa Langenharjo perencanaan pembangunan fisik, sosial dan ekonomi adalah dengan menentukan program apa saja yang harus dikembangkan dalam menanggulangi kemiskinan khususnya di desa Langenharjo. Kegiatan awal yang dikerjakan oleh warga adalah dengan mempersiapkan para pelaku termasuk di dalamnya adalah para sukarelawan.

Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan ini merupakan bentuk proses partisipasi masyarakat dalam hal pengorganisasian yang merupakan alat untuk mensukseskan program-program pemerintah secara efektif agar dapat diterima oleh masyarakat. Dengan pembentukan kepanitiaan melalui musyawarah desa merupakan perwujudan bentuk demokrasi yang dilakukan oleh warga dalam menentukan aspirasinya.

Pandangan tentang proses partisipasi dalam pengorganisasian seperti disampaikan oleh Prawoto (2000) yang menyatakan bahwa “pengorganisasian masyarakat sebagai alat untuk mensukseskan program-program pemerintah. Agar program-program secara efektif diterima oleh masyarakat”. Hal ini sesuai dengan peran nyata yang dilakukan pada warga masyarakat desa Langenharjo, bahwa dalam mengimplementasikan P2KP, mulai dari sosialisasi hingga evaluasi dan monitoring pemerintah telah menggunakan organisasi kemasyarakatan yang ada sebagai media dalam mensukseskan program P2KP.

Pandangan sebagian masyarakat terhadap pelaksanaan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah dipandang kurang efektif dan sarat dengan KKN. Dengan pemberdayaan organisasi masyarakat telah terbukti memperbaiki citra tersebut, karena masyarakatlah yang merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi sendiri jalannya pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan

oleh Prawoto (2000) tentang pengorganisasian masyarakat yang mengatakan:

“Pengorganisasian masyarakat sebagai tujuan akhir yang perlu dilakukan karena kelompok ini meskipun percaya bahwa sistem yang ada adalah layak dan berfungsi tetapi ada penyimpangan-penyimpangan yang perlu diperbaiki dan masyarakat terdiri dari berbagai unsur yang bersifat majemuk sehingga perlu wadah organisasi di mana berbagai kepentingan dapat dipertemukan”.

Dengan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan P2KP, pelaksanaan P2KP berhasil menyadarkan masyarakat akan kondisi mereka, dan perlu menggalang untuk melangkah menuju perbaikan tatanan masyarakat yang lebih baik. Bukti pelaksanaan pembangunan fisik yang dilakukan warga masyarakat secara bersama-sama, pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal, dan kegiatan sosial, dapat menghidupkan kegiatan perekonomian, dan menimbulkan kebersamaan dalam masyarakat. Kesadaran masyarakat telah timbul sejak dilakukan pemetaan dan refleksi kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Prawoto (2000) pandangan pengorganisasian masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Pengorganisasian masyarakat sebagai upaya terstruktur untuk menyadarkan masyarakat akan kondisi mereka dan perlunya menggalang potensi untuk melangkah menuju perbaikan dalam konteks tatanan sosial politik yang lebih luas”.

Perencanaan pembangunan P2KP merupakan pola pembangunan partisipatoris, gagasan-gagasan pembangunan melalui proyek P2KP merupakan gagasan yang bersifat “top down”, di mana keputusan-keputusan dirumuskan dari atas dan anjakan dari bawah, yang mana dalam pembangunan tersebut penekanan keputusan

pembangunan dan sasaran pembangunan di tangan masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator dalam proses pembangunan masyarakat.

Pengajuan sasaran pembangunan yang dibuat oleh warga masyarakat melalui musyawarah desa merupakan gagasan yang bersifat "*bottom up*", gagasan dari warga masyarakat melalui rembug warga masyarakat ini memungkinkan dilakukan perencanaan program yang dikembangkan dari bawah dengan masukan dari atas.

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di desa Langenharjo merupakan salah satu indikator proses pembelajaran masyarakat dalam pengorganisasian kelompok, yaitu menggambarkan serangkaian kegiatan untuk membangun kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, sehingga tumbuh ikatan kebersamaan yang cukup kuat di dalam masyarakat, sebagai sarana menumbuhkan solidaritas dan kepedulian di antara masyarakat, serta media belajar bersama dalam memecahkan persoalan-persoalannya secara mandiri.

Hal tersebut sesuai dengan konsep strategi P2KP yaitu untuk mendorong terjadinya proses transformasi sosial di masyarakat dari kondisi masyarakat yang tidak berdaya atau miskin menuju masyarakat yang lebih berdaya, mampu mandiri dan pada akhirnya menuju masyarakat madani. Sebagian langkah intervensi yang dilakukan P2KP adalah melakukan pendampingan dan pembelajaran kepada

masyarakat untuk membangun kelompok-kelompok swadaya atas asas ikatan ikatan pemersatu, seperti: kesamaan tujuan yaitu membangun saluran dan pengecoran jalan, kesamaan kegiatan atau usaha. Pendekatan P2KP untuk mendorong terbentuknya kelompok swadaya masyarakat merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan.

Konsep dasar P2KP seperti dikemukakan oleh KMW Satuan wilayah XIV Jawa Tengah (Konsep P2KP, 2) menyebutkan bahwa konsep dasar Proyek Penganggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai program pemberdayaan adalah proses pembelajaran bagi masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli untuk membangun kemitraan yang sinergi dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang didampingi oleh konsultan agar selanjutnya upaya-upaya penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dilakukan oleh mereka secara mandiri dan berkelanjutan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, terbukti P2KP yang dilaksanakan di desa Langenharjo telah mampu memberdayakan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam membuat perencanaan, rembug masyarakat dalam pertemuan RT merupakan bentuk kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam membangun kebersamaan dalam mengawali swadaya masyarakat.



Pengorganisasian dalam masyarakat desa Langenharjo dalam membentuk kepanitiaan dan sukarelawan merupakan proses pembangunan organisasi masyarakat yang dilaksanakan dengan jalan mencari penyelesaian secara bersama yang didasarkan pada potensi yang ada dalam masyarakat. Pengorganisasian yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka mempersiapkan P2KP menerapkan konsep CO (*Community Organizing*/pengorganisasian masyarakat) yaitu suatu bentuk pengembangan yang mengutamakan pembangunan kesadaran kritis dan penggalan potensi pengetahuan lokal masyarakat. Pengorganisasian masyarakat mengutamakan pengembangan masyarakat berdasarkan dialog atau musyawarah yang demokratis. Usulan-usulan warga masyarakat merupakan sumber utama gagasan yang harus ditindaklanjuti secara kritis, sehingga partisipasi masyarakat dalam merencanakan dalam bentuk proposal dan membuat keputusan serta melaksanakan program merupakan tonggak yang sangat penting. Pengorganisasian masyarakat yang telah dilakukan oleh masyarakat desa Langenharjo tersebut telah mampu manjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga rencana yang dibuat oleh masyarakat melalui suara dan kepentingan yang disampaikan oleh warga masyarakat lebih utama daripada kepentingan kaum elit. Dalam menyusun rencana pembangunan fisik, masyarakat menyadari bahwa pembangunan sarana-sarana fisik yang akan dapat menunjang kemajuan masyarakat, namun yang lebih utama dari tujuan

pembangunan fisik tersebut adalah pengembangan kesadaran masyarakat sehingga mampu mengelola potensi sumberdaya mereka.

Secara umum peran masyarakat dalam merencanakan pembangunan fisik di desa Langenharjo adalah dengan cara melakukan pembentukan organisasi masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kritis, partisipasi aktif, pendidikan berkelanjutan, pembentukan dan penguatan pengorganisasian masyarakat. Semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan warga masyarakat tersebut bertujuan untuk melakukan transformasi sistem sosial yang dipandang sebagai penghisap masyarakat dan menindas (represif).

Dalam melaksanakan pengorganisasian masyarakat di desa Langenharjo masyarakat telah memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- 1) Prinsip keberpihakan, artinya masyarakat desa Langenharjo dalam membentuk organisasi masyarakat dan kelompok swadaya masyarakat, menitikberatkan pada lapisan bawah yang selama ini selalu dipinggirkan, dengan mendengarkan pendapat dan masukan-masukan warga masyarakat, rencana pembangunan yang disusun oleh masyarakat sendiri memberikan gambaran bahwa lapisan bawah telah mendapatkan porsi peran yang besar dalam pembangunan dan masyarakat tentunya merasa mendapatkan perhatian (*diuwongake*, Jawa);

- 2) Pendekatan Holistik, pengorganisasian masyarakat di desa Langenharjo telah mampu menginventarisir permasalahan secara menyeluruh baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kebersamaan, sehingga pengorganisasian yang dilakukan oleh warga masyarakat desa Langenharjo diharapkan dapat mengatasi berbagai aspek yang timbul dalam masyarakat;
- 3) Pemberdayaan, dengan dilakukannya pengorganisasian dalam masyarakat di desa Langenharjo, terbukti masyarakat mampu menghadapi penguasa dalam hal perencanaan pembangunan, masyarakatlah yang menentukan pembangunan di lingkungannya sendiri, hal tersebut berbeda dengan dengan proyek-proyek sebelumnya yang mana masyarakat hanya merupakan objek dari pelaksanaan proyek;
- 4) Kemandirian, pengorganisasian masyarakat di desa Langenharjo tertumpu pada potensi yang ada dalam masyarakat, sehingga faktor-faktor di luar hanya merupakan stimulan yang akan mempercepat proses perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat, kemandirian menjadi sangat penting, karena perubahan dalam masyarakat hanya bisa terjadi dari masyarakat itu sendiri;
- 5) Berkelanjutan, pengorganisasian masyarakat di desa Langenharjo, telah mampu memunculkan kader-kader organisasi di desa setempat, dengan munculnya pengurus-pengurus dan relawan muda di desa Langenharjo menunjukkan adanya regenerasi di

kalangan masyarakat, karena generasi muda yang ada merupakan penerus pembangunan yang sedang berjalan sehingga terjamin kelanjutannya;

- 6) Partisipatif, keterlibatan masyarakat dalam pengorganisasian tercermin dalam rapat secara demokrasi kepanitiaan dan kepengurusan P2KP di tingkat RT. Partisipasi aktif dari segenap lapisan warga masyarakat desa Langenharjo telah melahirkan perasaan memiliki dari organisasi yang telah dibentuk;
- 7) Keterbukaan, pembentukan organisasi melalui rapat dan pemilihan kepengurusan P2KP secara demokratis menggambarkan bahwa pengorganisasian masyarakat di desa Langenharjo berupaya melakukan keterbukaan dari semua pihak, sehingga bisa dihindari intrik dan provokasi yang akan merusak tatanan yang telah dibangun oleh masyarakat desa Langenharjo. Dengan adanya keterbukaan tersebut kemungkinan berbagai hal yang menyebabkan perpecahan dalam organisasi kemungkinan dapat dihindarkan;
- 8) Tanpa Kekerasan, pengorganisasian masyarakat di Desa Langenharjo yang dilaksanakan secara terbuka, memberikan peluang terhindarnya bentuk kekerasan fisik maupun psikologi, dengan demikian proses pembentukan organisasi masyarakat tersebut memberikan peluang untuk menarik simpati dan dukungan

dari berbagai kalangan dalam melakukan perubahan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat setempat;

- 9) Kesetaraan, pembentukan organisasi masyarakat desa Langenharjo yang dilakukan dengan terbuka dan demokratis tersebut menggambarkan adanya kesetaraan hak bagi seluruh warga, sehingga tidak ada warga yang merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi (superior) dan rendah (inferior), hal tersebut merupakan pendidikan bagi kalangan kelas bawah untuk bisa memandang secara sama kepada kelompok-kelompok lain yang ada dalam masyarakat, terutama dalam berhubungan dengan pemerintah dan swasta.

Pada dasarnya pengorganisasian masyarakat di Desa Langenharjo menganut pemahaman bahwa pengorganisasian masyarakat merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran kritis masyarakat akan kondisi yang dihadapi bersama termasuk persoalan, potensi dan peluangnya, sehingga organisasi yang muncul di tengah masyarakat Desa Langenharjo tersebut merupakan salah satu bentuk organisasi yang terbentuk sebagai akibat adanya kebutuhan suatu wadah untuk berorganisasi. Organisasi sebagai wadah yang cocok dengan P2KP adalah organisasi masyarakat warga. Organisasi masyarakat warga ini dibangun dan dibubarkan atas dasar kesepakatan warga yang bersangkutan, sehingga organisasi masyarakat warga cenderung dapat mempertahankan kemerdekaan dan otonominya

terhadap berbagai lembaga yang ada. Hal tersebut nampaknya menjadikan suatu hal yang penting bagi warga desa Langenharjo karena kemerdekaan dan otonomi tersebut merupakan sifat dasar suatu organisasi masyarakat warga.

Dalam merencanakan pembangunan fisik yang dimulai dengan pembentukan organisasi masyarakat, masyarakat desa Langenharjo telah menyadari bahwa keputusan masyarakat untuk kebutuhan pembangunan lembaga baru hanya bisa dilakukan apabila masyarakat memahami substansi dan organisasi masyarakat warga termasuk peran strategis, azas dan prinsip serta posisi, tugas dan fungsi masyarakat dalam P2KP. Sehingga warga masyarakat sebelum warga masyarakat membuat keputusan untuk membentuk organisasi masyarakat telah dilakukan kegiatan sosialisasi secara intensif mengenai makna substansi organisasi masyarakat warga dalam P2KP.

Partisipasi warga masyarakat dalam merencanakan pembangunan fisik disusun atas dasar kebutuhan warga sendiri, tidak diatasnamakan atau diwakilkan kepada sekelompok orang atau sekelompok unsur/ perwakilan masyarakat tertentu. Fokus utama penggalan dana penjangaan kebutuhan masyarakat terutama pada aspirasi dari masyarakat miskin yang ada di desa tersebut. Kerangka aturan main disusun bersama oleh warga masyarakat dalam suatu proposal kegiatan pembangunan fisik, sebagai konsekuensinya segala aturan main yang berkaitan dengan pembangunan fisik P2KP tersebut

dibuat lebih dahulu oleh warga masyarakat, karena hal pembangunan fisik P2KP tersebut menyangkut kepentingan dan kebutuhan seluruh warga masyarakat sendiri. Aturan dasar organisasi masyarakat warga tidak dapat dibicarakan atau disepakati oleh sekelompok orang atau malah perwakilan unsur dengan mengatasnamakan seluruh warga masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan fisik tersebut di atas sejalan dengan pendapat Prawoto (2000) yang menyatakan bahwa ciri-ciri partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- 4). Bersifat proaktif dan bukan reaktif artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak;
- 5). Ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat;
- 6). Ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut;
- 7). Ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara;
- 8). Ada kesetaraan.

Menurut Prawoto (2000) “penggolongan partisipasi dapat dibedakan dalam partisipasi terbujuk, dan partisipasi terpaksa”.

Partisipasi terbujuk dapat dibagi menurut siapa yang membujuk:

- 1) Pemerintah yang mempropagandakan program pembangunan masyarakat, gerakan koperasi, LSM/LPSM, atau HKTI.

- 2) Badan-badan sukarela di luar masyarakat itu misalnya gerakan-gerakan keagamaan.
- 3) Orang-orang yang tinggal di dalam masyarakat atau golongan organisasi sukarela yang berbasiskan di dalam masyarakat seperti PKK, Kelompok Pencapir, dan kelompok tani.

Dikaitkan dengan pendapat tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat desa Langenharjo tersebut merupakan bentuk partisipasi yang tergolong terbujuk di mana dalam pembentukan organisasi masyarakat tersebut terbentuk oleh propaganda pemerintah tentang pembangunan dan dorongan orang-orang yang tinggal di dalam masyarakat tersebut.

Penyusunan rencana oleh organisasi masyarakat desa Langenharjo bersama warga telah dilakukan, penyusunan perencanaan P2KP bidang fisik tersebut merupakan salah satu bagian dari perencanaan P2KP secara keseluruhan. Dalam membuat rencana tahapan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat bersama warga tetap mengacu pada visi, dan misi P2KP. Di mana warga melalui rembug warga telah mengidentifikasi persoalan yang dihadapi bersama, baik yang sudah terlibat maupun yang diperkirakan akan terjadi, serta merumuskan siasat penanggulangan secara bersama, mempunyai kemampuan mengkoordinasikan diri, sebagai salah satu cara dalam menanggulangi persoalan bersama, dan mempunyai kemampuan mengembangkan aturan main mampu merumuskan



alternatif jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan merencanakan pembangunan pengecoran jalan dan pembuatan saluran air.

Mekanisme pembentukan organisasi masyarakat desa dan penyusunan rencana pembangunan fisik di desa Langenharjo dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: (1) Sosialisasi organisasi masyarakat warga dan kepemimpinan kolektif, yaitu kegiatan warga masyarakat desa Langenharjo diskusi-diskusi kelompok/FGD (*Focus group discussion*) sekaligus untuk menyusun refleksi kemiskinan. Keterlibatan masyarakat dalam diskusi kelompok menunjukkan adanya peran masyarakat dalam membuat rencana yang berdasarkan gagasan dan kebutuhan masyarakat; (2) Melakukan penilaian kelembagaan masyarakat warga, dalam menetapkan prioritas pembangunan fisik, penetapan dilakukan melalui FGD, masyarakat menentukan sendiri kelompok organisasi warga yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagai organisasi dan lembaga masyarakat sesuai dengan P2KP atau tidak; (3) Penetapan kebutuhan organisasi dan lembaga masyarakat, berdasarkan profil potensi dan kelemahan lembaga-lembaga yang telah dibentuk dalam masyarakat tersebut, dilakukan serangkaian rembuk warga dibuat keputusan untuk membentuk BKM dengan pertimbangan apakah BKM yang akan dibentuk tersebut dengan memberdayakan lembaga masyarakat yang sudah ada atau membentuk lembaga yang baru. Dengan BKM yang

telah terbentuk maka BKM dapat bekerja untuk menyusun kebutuhan-kebutuhan warga berdasarkan refleksi kemiskinan; (4) Penyebarluasan BKM, untuk memperoleh akuntabilitas dan legimitasi dari semua unsur warga masyarakat, maka perlu adanya sosialisasi kepada seluruh warga, dengan berbagai cara termasuk menempelkan Berita Acara hasil keputusan rembug warga di tempat tempat yang strategi, dalam dua pekan sejak sosialisasi warga masyarakat berhak mengajukan keberatan dan dalam hal warga mengajukan keberatan terhadap salah satu nama yang terpilih sebagai BKM maka setelah masa sanggah selesai (2 pekan) dapat segera melaksanakan rapat terbuka dengan mengundang perangkat pemerintah setempat dan masyarakat serta pihak yang berkeberatan untuk membahas dan menyelesaikan keberatan warga masyarakat tersebut. Berkaitan dengan akuntabilitas dan legimitasi tersebut selama ini belum pernah terjadi, hal ini dapat dimaknai bahwa kesadaran masyarakat desa Langenharjo untuk bermusyawarah sudah baik.

Mekanisme pembentukan organisasi masyarakat desa Langenharjo dalam P2KP tersebut dapat dimaknai bahwa keterlibatan langsung warga terhadap proses perencanaan mulai dari pembentukan organisasi masyarakat warga, penyusunan kebutuhan, prioritas penetapan sasaran P2KP khususnya bidang pembangunan fisik sangat besar.

Pelaksanaan pembangunan fisik P2KP seperti dalam sajian data di atas dilaksanakan dalam bentuk pembangunan pengecoran jalan dan pembuatan saluran air, dalam pelaksanaan pembangunan pengecoran jalan dan saluran yang dikerjakan oleh warga masyarakat secara gotong royong dan kerja bhakti merupakan hasil nyata dari P2KP, di mana dengan adanya P2KP masyarakat terbangun *capital social* yang ada di masyarakat yang berupa gotong royong, musyawarah dan keswadayaan, yang pada gilirannya akan mendorong pergeseran perilaku masyarakat untuk mencapai kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalan secara bersama.

Seperti yang disampaikan oleh Tim Persiapan P2KP(2004: 1) sebagai berikut:

Berbagai program kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial, sektoral dan charity dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dll). Lemahnya kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalan secara bersama.

Pelaksanaan pembangunan fisik P2KP yang dilaksanakan oleh warga masyarakat secara sukarela secara otomatis dapat menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar warga masyarakat. Dalam hal mengatasi kemiskinan di lingkungan desa Langenharjo masyarakat telah menyadari bahwa masyarakat tidak dapat bergerak sendiri-sendiri, akan tetapi perlu adanya kerjasama di antara warga

masyarakat. Untuk dapat bekerjasama diperlukan hubungan sosial yang kuat dan guyup rukun (Jawa). Oleh karena itu peran BKM dalam menggerakkan modal sosial yang telah dimiliki oleh masyarakat sangat diperlukan, BKM dalam menjaga melestarian kebersamaan yang merupakan modal sosial tersebut telah melakukan langkah sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkan kepedulian warga dengan menggerakkan kesadaran kritis masyarakat terhadap permasalahan bersama terutama yang menyangkut kemiskinan dengan cara melakukan refleksi kritis dengan berbagai kalangan yang ada di desa Langenharjo (PKK, pertemuan warga, Posyandu dll.)
- 2) Melakukan kegiatan yang bisa menumbuhkan kebersamaan melalui kelompok-kelompok seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), sehingga yang dibentuk bukan hanya sekedar untuk kepentingan pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) akan tetapi menjadi sarana kegiatan bersama. Saling menghargai, saling percaya di antara anggota kelompok akan tumbuh apabila kelompok tersebut dibangun dalam suasana keterbukaan, kebersamaan, kejujuran, keikhlasan dan saling peduli di antara anggotanya.

Monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan pembangunan fisik P2KP desa Langenharjo dilaksanakan melalui instrumen kuantitatif dan kualitatif pembentukan KSM & penyusunan usulan kegiatan KSM

(lampiran 1) dan instrumen lain seperti Evaluasi yang dilakukan oleh warga masyarakat desa Langenharjo dituangkan dalam laporan hasil pelaksanaan P2KP dari masing-masing bidang, yaitu bidang pembangunan fisik, bidang ekonomi dan bidang sosial. Monitoring dan evaluasi oleh warga sekaligus menggali permasalahan dan kendala yang timbul dalam perencanaan, maupun pelaksanaan P2KP. Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi dan memonitor jalannya P2KP tersebut telah sesuai dengan bentuk dari pelaksanaan Program penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yaitu:

“Memberikan bantuan teknik berupa pendampingan kepada masyarakat dalam rangka membantu pembentukan kelembagaan masyarakat dan melakukan upaya bagi peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi, perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap berbagai penyebab permasalahan kemiskinan yang dihadapi”.

Hasil nyata dari pembangunan fisik yang dilakukan oleh warga masyarakat desa Langenharjo seperti sajian data tersebut menunjukkan bahwa warga telah tergerak ikut berpartisipasi baik dalam pendanaan maupun tenaga dalam rangka melaksanakan pembangunan di lingkungannya, hasil pembangunan fisik tersebut memberikan merupakan indikator output (keluaran) dari P2KP yaitu:

- 1) Terlaksanana bimbingan pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagai fasilitator oleh konsultan manajemen wilayah (KMW)

- 2) Terlaksananya bimbingan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Unit Pelaksana BKM dan relawan oleh yang dilakukan oleh Tim fasilitator tentang langkah-langkah teknis pembentukan KSM dan terisinya rencana kegiatan (proposal)
- 3) Terlaksananya sosialisasi konsepsi KSM dalam P2KP dan FGD tentang dinamika kelompok.
- 4) Terlaksananya pembentukan KSM dalam P2KP dan tersusunnya program-program KSM dalam proposal
- 5) Adanya kesepakatan kelompok menyangkut aturan main dalam melaksanakan P2KP sesuai dengan konsep yang dibuat oleh KSM

Indikator out come (hasil) dari pembangunan fisik P2KP di desa Langenharjo tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pembelajaran masyarakat untuk membangun KSM sebagai sarana seluruh masyarakat membangun kepedulian dan kesatuan sosial, bukan sarana pengkotak kotakan masyarakat dan bukan sarana untuk sekedar memperoleh pinjaman/bantuan semata,
- 2) Kesadaran kritis masyarakat terhadap substansi KSM sebagai instusi lokal
- 3) Masyarakat menerapkan nilai dan prinsip universal kemanusiaan dalam proses kegiatan pembentukan dan pengokohan peran serta fungsi KSM
- 4) Berfungsi pelembagaan tanggung renteng, gerakan keswadayaan masyarakat, kepercayaan bersama dll.

- 5) Membentuk wadah untuk pertukaran pikiran dan pengalaman bagi warga ditingkat Kelurahan/Desa untuk peningkatan kemampuan berusaha dan berkerja

Perencanaan di bidang ekonomi direncanakan oleh Unit Pengelola Lingkungan, perencanaan bidang ekonomi P2KP di desa Langenharjo disusun oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK P2KP) UPK sebagai salah satu tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai pengelolaan dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangannya, baik yang berasal dari dana stimulan BLM P2KP, maupun dari pihak-pihak lainnya yang bersifat hibah.

UPK mempunyai tugas melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM ekonomi, mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM ekonomi, melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM, mengadministrasikan keuangan dan menjalin kemitraan dengan pihak pihak lain yang mendukung program ekonomi UPK.

Tahapan dalam menyusun rencana kegiatan bidang ekonomi P2KP dimulai dari pembuatan proposal oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ekonomi di dampingi oleh UPK. Rencana kegiatan ekonomi yang dibuat oleh kelompok swadaya masyarakat ekonomi selanjutnya disampaikan ke BKM untuk diadakan seleksi dan penetapan prioritas.

b. Peran masyarakat dalam Pelaksanaan bidang Fisik

Dari sajian data terlihat bahwa dalam bidang pembangunan fisik warga masyarakat desa Langenharjo bersama dengan UPL (Unit Pengelola Lingkungan) telah mampu melaksanakan pembangunan berupa pengecoran jalan dan pembuatan saluran air dengan biaya keseluruhan Rp. 10.425.000, yang terdiri dari Rp. 6.400.000 bersumber dari P2KP, dan Rp.4.025.000,- bersumber dari swadaya masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mau diajak secara bersama-sama untuk memikirkan dan membangun lingkungannya sendiri, gotong royong dan kerjabakti yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam membangun lingkungan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di mana dalam kegiatan tersebut dapat dimaknai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keterlibatan warga masyarakat setempat secara kolektif dalam organisasi masyarakat dan mereka secara proaktif telah terbangun kesadarannya untuk memberikan kontribusi yang nyata terhadap masalah kemiskinan
- 2) Dengan dibentuknya kelompok swadaya masyarakat Unit Pelaksana Lingkungan (UPL) maka akses kepada warga masyarakat setempat dapat berjalan dengan lancar
- 3) Timbulnya kesadaran masyarakat bahwa proses penanggulangan kemiskinan harus dilakukan sendiri oleh mereka secara demokratis demi memperkuat modal sosial dan membina nilai-nilai universal



yang meliputi kejujuran, kemanusiaan, kebersamaan, kegotongroyongan, keadilan sosial dan lain sebagainya

- 4) Keterlibatan jajaran aparat negara mulai dari jajaran yang paling bawah, hingga propinsi, karena merekalah hingga saat ini dianggap paling memahami kondisi warga masyarakat, sekaligus meningkatkan tanggungjawab jajaran aparat setempat untuk memfasilitasi kegiatan warga masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk masyarakat sendiri.

Pembangunan fisik P2KP desa Langenharjo tersebut merupakan model pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan: (1) maksimasi partisipasi masyarakat, dengan model pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat maka warga masyarakat merasa bertanggung jawab dengan ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan fisik, (2) Transparansi, keterbukaan pengelolaan pembangunan fisik terlihat sejak pembentukan lembaga swadaya masyarakat, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pembuatan saluran air dan pengecoran jalan, (3) Pemilihan kegiatan ditentukan sendiri oleh masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan (*open menu*), dengan pendekatan tersebut warga masyarakat dapat menentukan sasaran pembangunan berdasarkan ketetapan yang dibuat oleh warga masyarakat melalui rembug warga, (4) Penyelenggaraan kegiatan dilakukan oleh hirarki aparat paling dekat dengan masyarakat (Kecamatan/Desa), P2KP Unit

Pengelola Lingkungan dalam melakukan kegiatannya selalu melakukan koordinasi dengan aparat yang paling dekat dalam hal ini kepala Desa dan Camat, dengan model tersebut aparat akan lebih mengetahui kondisi nyata yang ada di masyarakat, kedekatan aparat terhadap masyarakat dapat menciptakan keharmonisan dalam mengatasi segala permasalahan diantaranya adalah masalah kemiskinan; dan (5) sederhana dalam implementasi, sasaran pembangunan yang direncanakan oleh warga masyarakat bersifat sangat sederhana, terlihat oleh warga, dan merupakan permasalahan warga, sehingga warga memiliki rasa tanggung jawab dan membutuhkan pembangunan tersebut demi lingkungannya sendiri.

c. Peran masyarakat dalam Monitoring dan evaluasi bidang fisik

Hasil observasi dan wawancara dengan sejumlah informan menunjukkan bahwa proses pelaksanaan dan penyusunan pelaporan selalu melibatkan warga masyarakat, sehingga secara langsung warga masyarakat selalu mengawasi jalannya pelaksanaan proyek. Pelaporan lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh panitia pada setiap rapat warga di tingkat RT memberikan gambaran nyata, bahwa warga masyarakat ikut terlibat langsung dalam mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan P2KP.

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan fisik seperti pada penyajian data adanya beberapa kendala yaitu: (1) kendala yang timbul dari faktor internal dikarenakan sulitnya realisasi

dana swadaya, dan adanya beberapa warga yang tidak ikut kerjabakti, (2) kendala yang timbul dari faktor eksternal dikarenakan adanya hujan sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan fisik.

Dengan diketahuinya kendala tersebut menunjukkan bahwa warga memiliki peran penting dalam menilai dirinya sendiri dan mencari langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya sendiri, langkah yang telah di tempuh oleh Panitia adalah melakukan rembug warga untuk mencari jalan keluar terhadap warga yang sulit dalam hal pendanaan, demikian halnya dengan warga yang tidak ikut dalam kerja bakti, panitia beserta pengurus RT dan tokoh masyarakat mengambil langkah menemui warga tersebut dengan pendekatan. Adapun faktor eksternal yang disebabkan oleh hujan, maka atas kesepakatan warga.

Kendala yang ditemukan dan solusi yang ditetapkan oleh warga secara bersama-sama melalui rembug warga menunjukkan kepercayaan masyarakat telah terbangun dimana terdapat indikasi sebagai berikut:

- 1) Perasaan aman pada setiap warga masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan berkontribusi dalam kegiatan kelompoknya. Dalam kegiatan membangun saluran air dan pengecoran jalan tersebut masyarakat saling menghargai dan saling membutuhkan, sehingga kelompok masyarakat tersebut akan tumbuh menjadi komunitas yang kuat.

- 2) Timbulnya rasa berbagi informasi dan kepedulian, setiap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut dapat saling berbagi informasi tentang kehidupan, pengalaman, gagasan, dan nilai masing-masing, serta berbagi permasalahan permasalahan yang dianggap penting dalam kehidupan mereka.
- 3) Bersama menentukan tujuan, setiap warga tidak akan tertarik dan memberikan komitmen yang dibutuhkan apabila tidak terlibat dalam perumusan tujuan. Proses pengambilan keputusan akan menentukan komitmen warga dalam pelaksanaan pemecahan masalah bersama
- 4) Adanya pengorganisasian dan tindakan, pada tahap awal dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh seluruh anggota masyarakat, memastikan ada yang akan bertanggung jawab untuk menggerakkan semua kegiatan untuk mencapai tujuan.

Monitoring dan Evaluasi bidang fisik yang dilakukan oleh warga masyarakat desa Langenharjo dituangkan dalam laporan hasil pelaksanaan P2KP yang disertai memuat proses pelaksanaan, realisasi kegiatan, kendala dan upaya mengatasi, dan rencana pelestarian.

Monitoring di bidang pembangunan fisik pada dasarnya telah dilakukan dan dipantau terus menerus oleh berbagai pihak dengan tujuan untuk melihat apakah rencana yang telah disusun bersama oleh warga masyarakat telah dilaksanakan, hambatan-hambatan apa yang terjadi pada saat pelaksanaan. Penyimpangan yang terjadi pada saat

pelaksanaan dipelajari dan diperbaiki agar tetap dapat mencapai tujuan akhir yang diinginkan.

Evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk kelompok independen pada dasarnya bertujuan untuk dinilai sejauhmana telah mencapai tujuan program yang telah disepakati bersama oleh masyarakat. Evaluasi yang baik adalah yang dilakukan oleh masyarakat sendiri yang merasakan manfaat dari kegiatan yang dikembangkan. Evaluasi kegiatan dimaksudkan sebagai proses belajar bersama untuk menilai pencapaian hasil kegiatan, kesesuaian rencana dan tindakan dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul secara terus menerus. Evaluasi dilaksanakan secara bertahap.

d. *Outcome* bidang fisik

Hasil yang dicapai P2KP desa Langenharjo yang berupa: (1) pembangunan pengecoran jalan dan pembuatan saluran air, (2) dana bergulir, dan (3) pasar murah, dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya proses pembelajaran masyarakat
- 2) Pelaksanaan P2KP di tingkat masyarakat tidak didominasi oleh segelintir elite-elita, namun melibatkan masyarakat banyak
- 3) Pendampingan yang dilakukan pada masyarakat tidak hanya memperhatikan aspek mekanistisnya saja, tapi justru dinamika atau jiwa kesadaran kritis yang didasari nilai-nilai kemanusiaan
- 4) Pelaku P2KP tidak hanya menilai bahwa P2KP hanya sebagai program kredit atau bantuan modal, melainkan perubahan perilaku

kolektif masyarakat menuju tatanan sosial yang lebih akomodatif bagi kemandirian dan keberlanjutan masyarakat dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan yang dihadapinya.

## **2. Proses Partisipasi masyarakat dalam Bidang Ekonomi**

### **a. Peran Masyarakat dalam Perencanaan Bidang Ekonomi**

Peran warga masyarakat desa Langenharjo dalam menyusun perencanaan bidang ekonomi tersebut telah sesuai dengan pedoman umum P2KP, dan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang melandasi P2KP yang menyatakan bahwa “persoalan kemiskinan dapat ditanggulangi dengan kemandirian dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip-prinsip berkelanjutan”.

Dengan rencana yang dibuat oleh kelompok warga di tingkat bawah, maka warga masyarakat merasa mendapatkan penghargaan, penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan secara berkelompok melalui rembug warga merupakan bentuk pembelajaran masyarakat untuk menghargai warga satu dan lainnya, sehingga suasana kemasyarakatan yang harmonis akan dapat terwujud. Prinsip berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi di desa Langenharjo diwujudkan dalam bentuk perencanaan usaha oleh warga dan KSM yang didampingi oleh UPK, dengan disusunnya kegiatan usaha oleh warga masyarakat dan KSM tentunya usaha yang akan dilaksanakan

tersebut telah dipertimbangkan dengan berbagai kemungkinan dan perkembangan usaha ke depan.

Proses penyusunan rencana P2KP bidang ekonomi di desa Langenharjo memberikan makna bahwa warga masyarakat telah menjunjung tinggi prinsip yang melandasi pelaksanaan P2KP yaitu:

#### 1) Demokrasi

Dalam setiap proses pengambilan keputusan untuk menyusun perencanaan yang menyangkut kepentingan masyarakat miskin di desa Langenharjo, mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif dan demokratis. Oleh itu, masyarakat desa Langenharjo berusaha untuk membangun dan memperkuat organisasi masyarakat dengan representasi, yang akseptabel, inklusif, transparan demokratis dan akuntabel

#### 2) Partisipasi

Dalam tiap langkah dalam kaitannya dengan perencanaan dilakukan secara partisipatif sehingga masyarakat mampu membangun rasa kepemilikan dan proses belajar melalui bekerja bersama. Partisipasi dibangun dengan menekankan proses pengambilan keputusan oleh warga. Mulai dari gagasan hingga tertuang dalam bentuk proposal. Partisipasi juga berarti upaya melibatkan segenap komponen masyarakat. Khususnya kelompok masyarakat yang rentan yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program kegiatan setempat.

### 3) Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam proses penyusunan rencana bidang ekonomi, masyarakat desa Langenharjo telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat belajar dan melembagakan sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan kegiatan yang akan dituangkan dalam bentuk proposal

### 4) Desentralisasi

Proses pengambilan keputusan penetapan rencana bidang ekonomi, masyarakat desa Langenharjo menitik beratkan pada manfaat terhadap masyarakat lingkungan, sehingga keputusan dalam rencana kegiatan tersebut benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak.

#### b. Pelaksanaan Bidang Ekonomi

Pelaksanaan bidang ekonomi P2KP di desa Langenharjo diimplementasikan dalam bentuk pemberian dana bergulir kepada warga melalui BKM, pemberian dana bergulir tersebut terbukti telah mampu membangkitkan perekonomian warga desa Langenharjo dengan munculnya kelompok swadaya masyarakat dalam suatu kelompok usaha seperti penjualan susu segar, hik, pengrajin blangkon, perusahaan karak dll. Dengan pengembalian dana bergulir secara tepat waktu oleh KSM, akan menumbuhkan kepercayaan dari warga lain,



juga BKM terhadap KSM tersebut, sehingga kemungkinan untuk bermitra dengan berbagai pihak menjadi sangat terbuka.

Penggunaan dana bergulir bagi warga masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha tersebut memberikan dapat dimaknai bahwa telah terjadi perubahan perilaku dalam masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan di lingkungannya. Masyarakat telah memiliki niat, prakarsa, untuk membangun kepedulian dan komitmen masyarakat itu sendiri. Masyarakat menyadari bahwa keberhasilan dari P2KP sebagian besar justru akan sangat tergantung pada kepedulian, komitmen, motivasi dan ikhtiar masyarakat setempat. Modal bergulir yang diberikan kelompok masyarakat dijadikan sarana bagi proses pembelajaran masyarakat untuk terus melakukan perubahan-perubahan sendiri ke arah yang lebih baik dan efektif. Masyarakat yang tadinya tidak tergerak untuk bekerja dan melakukan usaha, dengan adanya dana bergulir P2KP maka masyarakat mulai memikirkan apa yang harus ia kerjakan, pada sisi lain bagi para pendamping (fasilitator, konsultan, dll), prinsip membangun dari dalam mengandung makna bahwa proses pendampingan tahapan kegiatan tidak diurus dan dilaksanakan sendiri oleh para pendamping, tetapi justru para pendamping seharusnya melakukan proses pendampingan yang menitikberatkan pada proses pembelajaran bagi masyarakat agar mampu melakukan tahapan kegiatannya sendiri, dan menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan P2KP khususnya bidang ekonomi di desa Langenharjo telah terbentuk relawan dari masyarakat, relawan yang timbul dari dalam masyarakat itu sendiri memberikan makna masyarakat desa Langenharjo telah menyadari bahwa proses pengembangan masyarakat dengan prinsip membangun masyarakat dari dalam akan membutuhkan pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat sendiri yang mengabdikan tanpa pamrih, ikhlas, peduli, dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya.

Masyarakat menyadari bahwa proses pembangunan ekonomi dari dalam tidak akan terlaksana apabila pelopor-pelopor yang menggerakkan masyarakat tersebut yang merupakan individu atau sekumpulan individu yang hanya memiliki pamrih pribadi dan hanya mementingkan urusan ataupun kepentingan pribadi serta golongan atau kelompoknya. Dengan kata lain, perubahan perilaku masyarakat akan sangat ditentukan oleh relawan-relawan atau motor penggerak setempat yang memiliki moral yang baik dan diakui kualitas kepribadiannya, bukan hanya sekedar relawan yang pengalaman, pendidikan tinggi dan punya kedudukan yang tinggi.

Didasarkan pada keyakinan tersebut di atas, maka masyarakat desa Langenharjo dalam membangun kehidupan ekonomi di wilayahnya berusaha mendorong masyarakat membuka kesempatan seluas mungkin bagi warga-warganya yang ikhlas, jujur, adil, peduli dan memiliki komitmen tinggi untuk menjadi relawan yang membantu

masyarakat dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan P2KP di desa Langenharjo agar bermanfaat bagi masyarakat miskin serta seluruh masyarakat di wilayah Langenharjo. Proses pendampingan masyarakat tersebut sesuai dengan bentuk dari pelaksanaan Program penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yaitu:

“Memberikan bantuan teknik berupa pendampingan kepada masyarakat dalam rangka membantu pembentukan kelembagaan masyarakat dan melakukan upaya bagi peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi, perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap berbagai penyebab permasalahan kemiskinan yang dihadapi”

Sebagai akibat dari dana bergulir P2KP yang diberikan kepada masyarakat desa Langenharjo dapat mendorong kesiapan dan kesadaran kritis masyarakat agar mampu menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan secara alami. Masyarakat desa Langenharjo telah menyadari bahwa tingkat kesiapan dan kesadaran kritis masyarakat memerlukan waktu yang cukup panjang dan juga bukan merupakan proses yang dijalankan secara instan, untuk itu dalam melaksanakan program pembangunan bidang ekonomi P2KP desa Langenharjo masyarakat telah melakukan antisipasi bahwa proses tersebut kemungkinan dapat menimbulkan kejenuhan, kebosanan, ketidakpercayaan, ketidak yakinan dll. Maka dalam melaksanakan kegiatan yang berupa dana bergulir UPK P2KP Desa Langenharjo berusaha agar dana yang telah diberikan tidak

macet, vakum, dan atau berhenti sesaat berhubung harus menunggu  
selesainya aktivitas yang sama pada kelompok lain.

c. Peran Masyarakat dalam Monitoring dan Evaluasi bidang ekonomi

UPK dan relawan senantiasa selalu memonitor jalannya dana bergulir yang diberikan kepada kelompok swadaya masyarakat dengan harapan agar dana yang telah diberikan kepada KSM tersebut dapat dimanfaatkan dengan benar sesuai dengan rencana yang mereka ajukan dalam bentuk proposal sebelumnya, usaha UPK dan relawan dalam memonitor dana bergulir tersebut dengan mendatangi kelompok-kelompok usaha dan mengadakan rembug warga setiap bulan sekali guna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

Relawan dan UPK melakukan berbagai langkah agar tidak terjadi kelambatan angsuran dari KSM, antara lain: mendatangi KSM untuk agar KSM menyadari tujuan P2KP, dan agar KSM arti pentingnya pembelajaran dalam rangka mengangkat warga masyarakat dari kemiskinan. Dari hasil evaluasi BKM Desa Langenharjo, diperoleh beberapa temuan antara lain: KSM ternyata belum mampu menyediakan dana untuk mengembangkan usaha kecil yang layak tanpa adanya bantuan dari luar, sehingga dana bergulir dari P2KP tersebut benar-benar bermanfaat untuk menumbuhkan usaha kecil di lingkungan desa Langenharjo, dengan adanya dana bergulir P2KP secara nyata usaha kecil yang tadinya hampir mati, mulai bergerak secara kontinyu.

Hasil monitoring dan evaluasi oleh UPK diumumkan, pengumuman memuat KSM beserta anggota yang memperoleh pinjaman, Panitia Kemitraan, serta informasi lain, dengan cara:

- 1) Penempatan melalui papan-papan informasi di tempat-tempat yang strategis, minimal di 5 lokasi, dengan ukuran dan bentuk yang mudah dilihat dan dibaca oleh semua warga. Baik itu papan informasi kegiatan (proyek), papan informasi BKM dan KSM, papan informasi kegiatan PAKET, papan-papan informasi kegiatan pembangunan, kegiatan sosial, dengan muatan/isi yang bervariasi sesuai perkembangan dll.
- 2) Pertemuan-pertemuan rutin dengan KSM, panitia dan masyarakat.
- 3) Pertemuan-pertemuan rutin dengan perangkat kelurahan, lembaga kelurahan formal yang ada dan kelompok peduli setempat, demikian pula pertemuan rutin masyarakat dengan dinas dan kelompok peduli dalam kaitan dengan pelaksanaan PAKET.
- 4) Penyebarluasan melalui surat kepada KSM-KSM dan masyarakat.
- 5) Pembuatan dan penyebarluasan media warga, leaflet atau buletin, dll.
- 6) Melakukan audit tahunan BKM dan hasilnya disebar luaskan ke masyarakat melalui rapat tahunan pertanggung jawaban BKM-BKM, UP-UP serta pelaku P2KP lain harus bersifat terbuka

memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh KMW, perangkat pemerintah, unsur masyarakat dan atau pemantau independen.

d. *Outcame* bidang ekonomi

- 1) Tumbuh berkembangnya sektor usaha kecil di desa Langenharjo sebagai dampak dana bergulir yang diberikan kepada 23 KSM
- 2) Munculnya Pra koperasi di desa Langenharjo
- 3) Terbukanya lapangan kerja, khususnya bagi warga yang tadinya belum memiliki usaha, setelah adanya dana bergulir tersebut warga memiliki usaha sebagai sumber mata pencaharian.

**3. Peran masyarakat dalam bidang Sosial**

a. Perencanaan

Perencanaan bidang sosial P2KP di desa Langenharjo, disusun oleh warga masyarakat yang tergabung dalam KSM bidang sosial yang didampingi oleh UPS (Unit Pengelola Sosial), dalam menyusun perencanaan tersebut KSM mengidentifikasi tentang apa, bagaimana, siapa, untuk apa, untuk siapa dan kapan kegiatan sosial tersebut akan dilaksanakan. Rencana kegiatan bidang sosial yang dibuat oleh warga pada P2KP tahap II Desa Langenharjo tersebut adalah penyelenggaraan pasar murah.

Kegiatan warga dalam menyusun rencana kegiatan bidang sosial tersebut merupakan bentuk pembelajaran masyarakat agar dapat mengetahui kondisi sosial masyarakat yang ada, dengan menyusun refleksi masyarakat, maka masyarakat desa Langenharjo dapat melihat lebih dekat kondisi nyata yang dialami oleh warga masyarakat. Langkah awal dalam penyusunan rencana kegiatan bidang sosial



adalah dengan melakukan pemetaan kondisi aktual di lapangan. Dengan mengetahui kondisi awal, maka diperoleh gambaran awal yang dapat memberikan pemahaman umum tentang lokasi dalam rangka perumusan strategi serta sasaran dalam bidang sosial.

b. Pelaksanaan

Hasil penelitian dengan melalui observasi dan wawancara menunjukkan bahwa P2KP bidang sosial di desa Langenharjo diimplementasikan dalam bentuk pasar murah, dengan membagikan kupon berupa potongan 30% dari harga kebutuhan pokok sebesar Rp. 31.650,- pemberian kupon sebanyak 235. hal ini memberikan makna bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tersebut bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat, bahwa masyarakat bukanlah menjadi objek dari pembangunan, melainkan pelaku dari pembangunan.

Pemberian kupon sebanyak 235 kupon tersebut merupakan pengembangan program perlindungan sosial, yang menekankan pada pemanfaatan program secara kolektif, program tersebut terasa langsung oleh penduduk miskin di desa Langenharjo. Pendekatan yang dilakukan P2KP sebagai strategi penanggulangan kemiskinan tersebut memiliki makna bahwa P2KP bidang sosial di desa Langenharjo adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya jaminan bahwa sasaran program sosial tersebut dapat sampai kepada penduduk miskin yang bersangkutan

- 2) Penduduk miskin sebagai sasaran P2KP telah dapat mencairkan dana secara langsung dan mudah dan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka.
- 3) Adanya pelayanan yang cepat dan tepat oleh aparat negara kepada penduduk, sehingga memungkinkan terbangunnya citra aparaturnegara yang good government
- 4) Dengan adanya kupon yang dibagikan kepada penduduk miskin yang berbentuk diskont, maka timbul peningkatan daya beli yang tinggi dari masyarakat
- 5) Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin yang ditandai dengan semakin berkurangnya beban konsumsi keluarga

Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada penduduk miskin merupakan bentuk bantuan yang kemanfaatannya ditujukan langsung kepada rumah tangga miskin sehingga perhatian pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyat semakin terfokus. BLT memberikan efek kesejahteraan sosial yang semakin nyata bagi anggota rumah tangga miskin. Bantuan langsung yang berupa kupon diskon tersebut tidak menyalahi ketentuan penggunaan dana BLM (bantuan langsung masyarakat). Bantuan langsung tunai diberikan berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah warga miskin yang ada di desa Langenharjo, besarnya dana ditentukan oleh masyarakat sendiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman P2KP.

c. Peran masyarakat dalam evaluasi dan monitoring bidang sosial

Peran masyarakat dalam evaluasi dan monitoring bidang sosial dilakukan oleh Unit Pengelola Sosial P2KP desa Langenharjo bersama-sama warga masyarakat, yang dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas

- 1) Transparansi, hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan P2KP bidang sosial diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan ataupun membutuhkan untuk mengetahui informasi-informasi mengenai pelaksanaan bidang sosial P2KP, kebijakan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengambilan keputusan, perkembangan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi terkait lainnya yang ingin mengetahui dana serta kegiatan bidang sosial P2KP. Penerapan transparansi oleh seluruh pelaku P2KP dimaksudkan antara lain: (1) mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan melalui tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol sosial, (2) menghindari miss komunikasi ataupun salah persepsi, (3) mendorong proses masyarakat belajar dan ‘melembangkan” sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya, (4) membangun kepercayaan semua pihak (*trust building*) terhadap pelaksanaan P2KP secara keseluruhan, serta (5) pelaksanaan P2KP dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,

prinsip dan nilai P2KP. Transparansi dalam pelaksanaan P2KP ini harus dilakukan di semua tataran, di tataran masyarakat adalah BKM wajib menyebarluaskan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan, perkembangan organisasi dan kegiatan BKM/UP-UP, laporan posisi keuangan.

2) Akuntabilitas (pertanggungjawaban) diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan/atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan, baik di tingkat proyek, daerah dan masyarakat. Akuntabilitas dalam pelaksanaan P2KP khususnya bidang sosial di desa Langenharjo dilakukan di semua tataran melalui beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a) Konsultasi publik yaitu dalam hal BKM mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak (misalnya: Peta Kemiskinan, Pronangkis, Pencairan dana BLM dan PAKET, KSM penerima manfaat dll), keputusan yang ditetapkan oleh BKM telah dikonsultasikan ke masyarakat melalui penyebaran dan penempelan keputusan tersebut di tempat-tempat strategis.
- b) Rapat koordinasi triwulan BKM dengan KSM dan masyarakat yaitu anggota-anggota BKM telah mengadakan pertemuan koordinasi triwulan atau sesuai ketentuan AD/ART dengan mengundang seluruh gugus tugas (UP-UP), KSM, dan

perwakilan masyarakat dalam rapat koordinasi tersebut disampaikan perkembangan kegiatan, membahas permasalahan serta merencanakan kegiatan triwulan berikutnya.

- c) Rapat bulanan anggota, dalam rapat BKM tersebut telah menyelenggarakan pertemuan rutin anggota-anggota BKM setiap satu bulan sekali membahas, dalam rapat tersebut berbagai masalah dan perkembangan yang ada yang berkaitan dengan kegiatan bidang sosial, di samping membahas hasil kerja bulanan yang sedang berjalan rapat juga membahas rencana BKM untuk bulan berikutnya. Hasil rapat bulanan tersebut disampaikan BKM kepada KSM, masyarakat dan pemerintah kelurahan.
- d) Rapat Tahunan BKM, berkaitan dengan rapat tahunan, BKM telah menyelenggarakan Rapat Tahunan BKM yang dilaksanakan pada bulan Desember 2006. Rapat tahunan BKM tersebut di samping sebagai pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan kepada masyarakat (termasuk penyampaian hasil audit) sekaligus juga melakukan penyegaran anggota BKM, apabila dibutuhkan dan sesuai dengan AD/ART BKM desa Langenharjo, melalui utusan-utusan yang dipilih langsung dari setiap RT/RW, dalam rapat tersebut diputuskan menerima atau menolak

pertanggungjawaban anggota BKM tersebut serta menetapkan untuk memperpanjang atau mengganti anggota BKM.

- e) Rembug para pihak terkait di tingkat kelurahan yaitu BKM, pemerintah kelurahan, relawan dan kelompok peduli perlu menyelenggarakan rembug para pihak di tingkat kelurahan dilaksanakan di desa Langenharjo untuk mengambil keputusan mengenai program perbaikan pelayanan public (*good governance*) serta channelling program dalam kaitan dengan P2KP khususnya bidang sosial dan menyangkut kepentingan seluruh para pihak.

BKM dan pelaku PAKET wajib P2KP desa Langenharjo telah melakukan audit tahunan termasuk semua unit-unitnya (UP-UP) dan panitia kemitraan dan hasilnya disebarluaskan kesemua pihak terkait sesuai ketentuan. BKM dan semua unit yang ada di desa Langenharjo secara terbuka memberikan kesempatan terhadap berbagai pemeriksaan, baik dari manajemen proyek, pemerintah maupun masyarakat.

Dalam rangka membangun mekanisme pengendalian sosial (*social control*), masyarakat yang peduli pada P2KP dan memiliki komitmen terhadap kemiskinan warga masyarakat desa Langenharjo telah membentuk Kelompok pemantau independen. Inisiatif masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan P2KP diakomodasikan oleh BKM dan Pokja PAKET dengan

memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan mereka. Meskipun demikian, Kelompok pemantau independen tetap tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi ataupun kebijakan terhadap BKM dan Pokja PAKET. Hasil pemeriksaan dan temuan dari Kelompok pemantau disampaikan kepada rembug-rembug warga kelurahan atau instansi yang berwenang yang menangani hal tersebut, atau kepada unit pengaduan masyarakat (UPM) yang ada.

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bidang sosial P2KP dan bidang lainnya dapat dilakukan oleh semua pihak, dalam hal masyarakat melihat terjadi penyimpangan prinsip serta nilai P2KP oleh anggota BKM dan/atau terdapat keputusan BKM yang ditolak oleh sebagian besar warga, maka masyarakat berhak membubarkan sebagian atau keseluruhan anggota BKM serta memilih penggantinya melalui mekanisme Rembug Warga Kelurahan. Mekanisme rembug warga kelurahan diawali dengan rembug warga tingkat RT/RW, rembug warga tingkat dusun dan akhirnya rembug warga tingkat kelurahan. Melalui rembug warga ini dapat ditetapkan sanksi sosial dan atau sanksi hukum yaitu dengan menyerahkan oknum yang melakukan penyimpangan ke pihak yang berwajib

d. *Outcome* bidang sosial

Meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok pada saat diselenggarakan pasar murah merupakan indikasi bahwa bantuan langsung tunai yang berupa kupon diskon 30% telah mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Upaya penanggulangan kemiskinan dengan bantuan langsung tunai tersebut secara nyata hasilnya belum signifikan, karakter dari masyarakat khususnya penduduk yang tergolong miskin secara langsung berpengaruh pada capaian hasil P2KP. Beberapa penduduk miskin yang menjadi fokus Bantuan langsung tunai memberikan gambaran adanya kendala sikap dan mental yang tidak mendukung P2KP, sehingga mereka tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri, bantuan langsung tunai yang diberikan merupakan bantuan yang sifatnya pertolongan sesaat, dan setelah kupon tersebut dicairkan mereka tetap memiliki pola hidup seperti biasanya. Penduduk yang tergolong miskin rata-rata memiliki kebiasaan kurang dapat menggunakan waktu luang untuk kegiatan produktif.

Dari uraian di atas terlihat bahwa proses pelaksanaan proyek P2KP di Desa Langenharjo telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme siklus pembelajaran masyarakat di tingkat kalurahan, yang mana dalam proses pelaksanaan P2KP tersebut telah menunjukkan adanya proses penyadaran kritis masyarakat yaitu dengan melakukan kegiatan prinsip pembelajaran yaitu:



- a. Prinsip membangun dari dalam (*development from within*), yaitu proses dimana peran pendamping pihak luar hanyalah sebagai pelengkap dari adanya inisiatif, prakarsa, kepedulian, dan ikhtiar dari masyarakat itu sendiri.
- b. Prinsip sistem kerelawanan (*volunteerisme*), yaitu proses pengembangan masyarakat akan membutuhkan pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat sendiri yang mengabdikan tanpa pamrih, ikhlas, peduli, adil, jujur dan memiliki komitmen kuat bagi kemajuan masyarakat di wilayahnya. 'Proses membangun dari dalam' tidak akan terlaksana bila pelopor-pelopor tersebut merupakan individu yang hanya memiliki pamrih pribadi dan mementingkan kepentingan pribadi dan golongan/kelompok.
- c. Prinsip pertumbuhan organik dan dinamis (*organic development*), yaitu proses penumbuhan kesiapan dan kesadaran kritis masyarakat memang memerlukan waktu, karena bukan merupakan proses yang dijalankan secara instan (serba cepat, formalitas dan mekanistik). Meskipun demikian, dibutuhkan manajemen pengendalian proses di lapangan secara tepat agar tidak menjadi berlarut-larut dan bertele-tele, yang pada akhirnya menimbulkan kefrustasian masyarakat. Terkait dengan hal itu, P2KP merancang proses pendampingan secara langsung dan intensif oleh Tim fasilitator yang berkedudukan di kecamatan, sehingga tim fasilitator bersama relawan-relawan

mampu memfasilitasi masyarakat kelurahan untuk melaksanakan P2KP secara berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, Robert C. & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education : An Introduction to Theory and Methods*, Boston : Allyn and Bacon, Inc. 1982.**
- Burhan, Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Darmiyati, Zuchdi, Penyusunan Proposal Penelitian Kualitatif, Makalah pada penataran tugas akhir mahasiswa IKIP Yogyakarta, Yogyakarta : IKIP, 1990.
- Davis, K., & Newstrom, J.W., *Human Behavior at Work*, New York : McGraw Hill, 1985, 5rd edition.
- Drajat Tri Kartono, 2004, *Pembentukan Sistem Ketahanan Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*, UNS Pres, Surakarta.
- Fagence, *Citizen Participation Planning*, New York : Pergamous Press Oxford, 1977.
- Fredian Tony, \_\_\_\_, *Pengertian dan Perspektif Pengembangan Masyarakat Asas dan Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat, Pemberdayaan dan Partisipasi Wara Komunitas*.
- Friedman, John, 1992, *Empowerment: The Public Alternative Development*, Cambridge Mass, Blackwell Publisher.
- Ginanjjar Kartasmita, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat*, Badan Perencana Pembangunan Nasional, Jakarta
- Hadari Nawawi, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hassan, Sadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pembangunan, 1961.

- Hassan, Sadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pembangunan, 1961.
- Hikmat, Harry, 2001, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Hubeis, Aida Vitayala Sjafriz, 1992, *Penyuluhan Pembangunan Di Indonesia Menyongsong Abad XXI*, PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, Jakarta.
- Julia, Branner, *Memadu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Terj. Imam Syafi'i & Noorhaidi, A.H), Yogyakarta Pustaka Pelajar, 1997.
- Karsidi, Ravik, *Sosiologi Pendidikan*, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Pers), Surakarta. 2005
- Lexy, Meliong. J., 1999, *Methodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya,
- Loekman Sutrisno, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mar'at, 1981, *Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukuran*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardikanto, T., E., Lestari, A. Sudrajat, R. Setyowati. Supanggyo, Sutarto, S. Anantanyu, 1996, *Penyuluhan Pembangunan Kehutanan*, Pusat Penyuluhan Kehutanan, Jakarta.
- Margono Slamet, 2003, *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*, IPB Press, Bogor.
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES 1989.
- Mathew, B. Miles, Huberman., *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press, 1992.
- Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Bandung : Tarsito Agung.**
- Onny S. Prijono dan Pranarka AMW., 1996, *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, 2002, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Pidarta, Made, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1990
- Prawoto, 2000, *Pengorganisasian Masyarakat*, PT. Tera Buana Manggala Jaya, Semarang

- Robbins Stephen, P., 2002, *Organizational Behavior, Terjemahan Perilaku Organisasi (Edisi Terjemahan Tim Index)*, PT. Index Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Simanjuntak, *Perubahan dan Perencanaan Sosial*, Bandung: Tarsito,. 1981
- Slamet, 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Spradley, James P., *Participant Observation*, New York: Rinehart And Winston, Inc. 1980.
- Sukamto, 1983, *Beberapa Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Sukardi, 2007, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Suparjan dan Hempri, S., 2003, *Pengembangan Masyarakat*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Sutopo, H.B., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta,
- Tim Persiapan P2KP, 2004, *Pedoman Umum*, Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

### Matrix Penelitian

No	Pokok bahasan	Aspek	Indikator	Sumber data
1	Proses Partisipasi masyarakat dalam perencanaan P2KP	Kegiatan masyarakat dalam perencanaan P2KP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlibatan masyarakat dalam ikut serta merencanakan P2KP</li> <li>- Aktivitas masyarakat dalam kegiatan perencanaan P2KP</li> </ul>	Warga masyarakat pengurus P2KP
2	Proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KP	Kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan P2KP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan melaksanakan bidang fisik</li> <li>- Proses partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan melaksanakan bidang ekonomi</li> <li>- Proses partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan melaksanakan bidang sosial</li> </ul>	Warga masyarakat pengurus P2KP
3	Proses partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi P2KP	Kegiatan masyarakat dalam keikutsertaan memonitor dan mengevaluasi P2KP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring dan evaluasi bidang fisik</li> <li>- Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi</li> <li>- Monitoring dan evaluasi bidang sosial</li> </ul>	Warga masyarakat pengurus P2KP

**BKM “BERKAH MAKMUR”**  
**DESA LANGENHARJO, KECAMATAN GROGOL**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**  
**JAWA TENGAH**

---

**SURAT KETERANGAN**

Koordinator BKM Berkah Makmur Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, menerangkan bahwa:

Nama	:	Ramli
NIM	:	S. 6203009
Pekerjaan	:	Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Program Studi Penyuluhan Pembangunan

Nama tersebut benar-benar telah melakukan penelitian tentang P2KP di Desa Langenharjo dengan Judul penelitian: **“PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (Studi Kasus Di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo)”**

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langenharjo, 6 April 2007  
Koordinator BKM

Wasalam, SH

## **CATATAN LAPANGAN 1**

Tgl. wawancara : 10 Oktober 2006

Informan 2 : Didik

### **Pertanyaan :**

Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan P2KP?

### **Jawaban:**

Sejak adanya sosialisasi P2KP setiap warga di sini menyambut gembira, dan selalu berperan aktif dalam pembentukan kepanitiaan dan relawan.

## **CATATAN LAPANGAN 2**

Tgl. wawancara : 10 Oktober 2006

Informan 2 : Mujiman

### **Pertanyaan :**

Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan P2KP?

### **Jawaban:**

Walaupun kami hanya sebatas urun rembug, tapi kami sangat gembira merasa diuwongke dalam kegiatan P2KP ini. Khususnya dalam menyusun rencana kegiatan untuk dijadikan proposal.



## **CATATAN LAPANGAN 2**

Tgl. wawancara : 10 Oktober 2006

Key Informan : Suyat

### **Pertanyaan :**

Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan P2KP?

### **Jawaban:**

Pada dasarnya warga di desa Langenharjo di sini sangat mudah untuk digerakkan terutama dalam membangun lingkungannya, terlebih dengan .....

## **CATATAN LAPANGAN 2**

Tgl. wawancara : 8 Oktober 2006

Key Informan : Suyat

### **Pertanyaan :**

Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan P2KP?

### **Jawaban:**

Pada dasarnya warga di desa Langenharjo di sini sangat mudah untuk digerakkan terutama dalam membangun lingkungannya, terlebih dengan .....

1. Informan Didik (wawancara tanggal 10 Oktober 2006)

Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan P2KP?

Jawab: Sejak adanya sosialisasi P2KP setiap warga di sini menyambut gembira, dan selalu berperan aktif dalam pembentukan kepanitiaan dan relawan.

2. Informan Mujiman (wawancara tanggal 10 Oktober 2006)

Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan P2KP?

Jawab: Walaupun kami hanya sebatas urun rembug, tapi kami sangat gembira merasa diuwongke dalam kegiatan P2KP ini. Khususnya dalam menyusun rencana kegiatan untuk dijadikan proposal.

3. Key Informan Suyat (wawancara tanggal 10 Oktober 2006)

Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan P2KP?

Jawab: Pada dasarnya warga di desa Langenharjo di sini sangat mudah untuk digerakkan terutama dalam membangun lingkungannya, terlebih dengan .....

4. Informan Mudiyono (wawancara tanggal 8 Oktober 2006)

Apa tujuan dari pemetaan swadaya?

Jawab: Tujuan dari pemetaan swadaya adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong masyarakat membangun kebersamaan.
- b. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat akan kondisi dan persoalan dihadapi.

- c. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam melakukan proses identifikasi masalah, potensi, peluang, tantangan dan hambatan di dalam lingkungannya;
- d. Mendorong kesadaran krisis masyarakat bahwa penyelesaian persoalan kemiskinan harus mengintegrasikan potensi semua pihak dan bertumpu pada potensi diri daripada tergantung pada bantuan luar;
- e. Pembelajaran prinsip dan nilai melalui kegiatan pemetaan masalah kemiskinan dan potensi sumber masyarakat;
- f. Menumbuhkan rasa tanggungjawab individu dan masyarakat untuk menyadari permasalahan nyata yang terjadi di wilayahnya; dan
- g. Meningkatkan kepedulian dan kerelawan untuk mengatasi kondisi nyata di wilayahnya.

5. Informan Hartono (wawancara tanggal 23 Oktober 2006)

Apa bentuk kebersamaan masyarakat dalam membangun lingkungannya sendiri?

Jawab: Rata-rata warga Langenharjo sangat mudah untuk diajak gotong royong melakukan kerja bakti, dan sebagian masyarakat di sini masih memiliki rasa pekewuh apabila tidak ikut kerja bakti bersama. Kesadaran warga masyarakat untuk membangun desanya sendiri dari dulu selalu terjaga, minimal 3 bulan sekali warga di sini mengadakan kerja bakti. Terlebih menjelang Agustusan.

6. Informan Warso (wawancara tanggal 15 Nopember 2006)

Bagaimana peran serta masyarakat dalam pendanaan?

Jawab: Untuk pembangunan saluran air dan pengaspalan jalan setiap warga dibebani dana sebesar Rp.25.000,- - Rp. 75.000,- tergantung dari status sosial warga dalam masyarakat, artinya bagi warga yang dipandang mampu dibebani dana lebih besar dari warga yang kurang mampu. Penentuan besar kecilnya dana tersebut berdasarkan pada musyawarah warga yang dilaksanakan di RT. Masing-masing. Pada dasarnya saya pribadi merasa senang karena dengan sumbangan yang kecil, diperoleh hasil yang bermanfaat yaitu saluran air di desa ini jadi bersih dan lancar. Jalan yang tadinya banyak berlubang sekarang menjadi mulus

7. Informan Kasmidi (wawancara tanggal 15 Nopember 2006)

Bagaimana peran serta masyarakat dalam pendanaan?

Jawab: Untuk besarnya sumbangan, saya kena beban Rp. 40.000,- untuk pembangunan saluran air dan jalan. Kalau tanpa bantuan P2KP mungkin warga bisa kena sumbangan dua kali lipat. Tetapi dengan adanya proyek P2KP tersebut beban warga untuk membangun lingkungannya terutama saluran air dan pengaspalan jalan menjadi berkurang. Yang lebih menggembirakan lagi, dengan adanya proyek P2KP tersebut warga di sini mulai bergerak untuk bekerja bhakti bareng-bareng, yang mana kerja bhakti semacam ini sudah jarang sejak bong-bongan itu

8. Informan Agung Haryanto (wawancara tanggal 16 Oktober 2006)

Bagaimanakah peran masyarakat dalam pemberian sumbangan?

Jawab: Saya sangat gembira melihat warga begitu bersemangat dalam melakukan kegiatan gotong royong, ternyata warga di sini menyambut baik proyek P2KP tersebut, khususnya pada pembangunan fisik. Demikian pula dalam penarikan dana dari masyarakat, ternyata dari dana swadaya yang direncanakan dapat tercapai dalam waktu yang tepat, sehingga pelaksanaan pembangunan saluran air dan pengaspalan jalan, dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya seperti terlihat sekarang itu.

9. Informan Sugeng (wawancara tanggal 18 Oktober 2006)

Bagaimanakah penyaluran dana bergulir di desa Langenharjo dalam implementasi perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan?

Jawab: Saya mempunyai usaha produksi karak, dengan modal yang sangat kecil tadinya hanya dapat memproduksi karak dengan bahan 10 Kg setiap hari, namun setelah kami mendapatkan bantuan dari P2KP, saya bisa memproduksi sampai 20 Kg, bahkan terkadang sampai 25 Kg perhari. Walaupun pinjaman tersebut hanya 12 bulan, namun pada prinsipnya saya merasa terbantu. Mudah-mudahan setelah dana tersebut saya kembalikan saya tetap dapat membuat karak dalam jumlah yang sama.

10. Informan Dwi Radjiman (wawancara tanggal 19 Oktober 2006)

Bagaimanakah penyaluran dana bergulir di desa Langenharjo dalam implementasi perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan?

Dengan adanya bantuan dana bergulir P2KP sangat membantu dalam usaha saya membuat blangkon, dengan dana bergulir sebesar Rp.3.500.000,- dapat saya manfaatkan untuk menambah persediaan bahan, biasanya saya selalu ngambil bahan dengan cara “ngalap nyaur”, artinya kalau saya sudah bayar, saya baru dapat ambil bahan lagi, ya tentunya harganya cukup mahal. Tetapi dengan modal pinjaman yang berupa dana bergulir tersebut, saya sekarang dapat membeli bahan secara langsung, dan memilih bahan dengan harga yang sesuai

11. Informan Wasalah, SH (wawancara tanggal 19 Oktober 2006)

Bagaimanakah penyaluran dana bergulir di desa Langenharjo dalam implementasi perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan?

Warga masyarakat desa Langenharjo, khususnya yang tergolong dalam pengusaha kecil, sangat antusias, sebenarnya alokasi dana bergulir sebesar itu sangat kurang untuk menangani permasalahan perekonomian di desa Langenharjo. Bagi pengusaha kecil jumlah dana yang diterima tersebut tergolong besar. Dalam pengembalian dana bergulir, hingga saat ini masyarakat sangat konsekuen yaitu dengan mengangsur tepat waktu setiap bulannya.

12. Informan Sulastri (wawancara tanggal 18 Oktober 2006)

Bagaimana sosialisasi dan prosedur pengajuan dana bergulir?

Jawab: Dana bergulir saya ketahui waktu saya arisan PKK di tempat bu Mulyani, begitu saya mendapat penjelasan tentang dana bergulir, saya buru-

buru membuat proposal, setelah saya konsultasikan dengan Bu Tetijaya Ariani (ketua Unit Pengelola Keuangan/UPK) terus saya mendapat bantuan sebesar Rp.3.000.000,- pada tanggal 10 Juni 2006, dan Alhamdulillah angsuran saya setiap bulannya lancar-lancar saja.

13. Informan Suwondo (wawancara tanggal 20 Oktober 2006)

Bagaimanakah sosialisasi dan prosedur pengajuan dana bergulir?

Jawab: Saya mengetahui dana bergulir waktu pertemuan Bapak-Bapak di rumah Pak Mudiono,SE. kebetulan saya mempunyai kelompok usaha pembuatan batu bata, setelah saya sampaikan kepada anggota kelompok usaha saya, saya mengajukan ke UPK, selanjutnya tanggal 10 Juni 2006 saya mendapat dana bergulir sebesar Rp.3.000.000.

14. Informan Suyati (wawancara tanggal 19 Oktober 2006)

Apakah prosedur pengajuan bantuan dana bergulir proses cukup mudah?

Jawab: Prosedur dalam pengajuan pinjaman di P2KP ini bagi saya sangatlah mudah, karena tanpa agunan, dan bunganyapun sangat ringan sekali dibanding dengan meminjam ditempat lain, kami hanya dikenai bunga sebesar 1,5% perbulan. Antara waktu pengajuan dengan realisasi sekitar satu setengah bulan

15. Informan Minnurdin (wawancara, tanggal 22 Oktober 2006)

Apakah program P2KP telah dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru?

Jawab: Tadinya kami tidak memiliki kegiatan apa-apa, setelah adanya dana bergulir dari P2KP, kami mencoba mengajukan proposal untuk membuka usaha penjualan susu murni di kawasan Solo Baru, dan kami diberi dana



pinjaman bergulir sebesar Rp. 3.500.000,- yang kami terima tanggal 10 Juni 2006, dana tersebut kami pergunakan untuk pengadaan tenda, meja, kursi, dan peralatan lainnya serta untuk modal lancar, sehari kami bisa menjual susu minimal 8 liter, memang untuk mengembalikan kami kadang terlambat, tapi tidak sering.

16. Informan Rika Dhuha Ningrum (wawancara tanggal 22 Oktober 2006)

Apakah dalam pelaksanaan dana bergulir masih terdapat kendala?

Jawab: Untuk pelaksanaan dana bergulir memang masih terdapat kendala, antara lain dari 23 KSM, ada 3 atau 4 KSM yang kadang tidak tepat melakukan angsuran, tapi kami juga maklum mungkin mereka baru pertama kali melakukan usaha, kebetulan KSM yang sering terlambat melakukan angsuran tersebut adalah KSM yang baru pertama kali melakukan usaha, yang penyelesaiannya kami harus datang ke KSM. Baiknya sampai saat ini tidak ada dana bergulir yang macet sama sekali.

17. Informan Walidi (wawancara tanggal 24 Oktober 2006)

Bagaimanakah sambutan dari pelaksanaan program P2KP dalam bentuk pasar mudah?

Jawab: Kami sangat senang dengan pemberian kupon potongan sebesar 40% walaupun jumlahnya sedikit, tetapi lumayanlah untuk orang kecil semacam kami, sebenarnya kami sangat mengharap pasar murah ini dilaksanakan sering-sering, tapi gimana wong itu semua yang ngatur pemerintah.

18. Informan Sastro Wiyono (wawancara tanggal 23 Oktober 2006)

Bagaimanakah sambutan dari pelaksanaan program P2KP dalam bentuk pasar mudah?

Jawab: wah ya senang to, wong dapat diskonan 40%, cuma sayangnya hanya sekali.

19. Informan Sri Lestari (wawancara tanggal 23 Oktober 2006)

Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan menjahit dan bordir?

Jawab: Wah saya sangat senang mengikuti kursus di Balai Desa, habis gratis, dan memang saya kepingin bisa membuat baju sendiri itu sudah lama sekali, apalagi diajari bordir segala, walaupun bordirnya hanya sedikit, tapi saya merasa senang, dan saya berharap pelatihan semacam ini dapat ditingkatkan.

20. Informan Wasalah (wawancara tanggal 23 Oktober 2006)

Bagaimanakah partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan proyek P2KP dalam bentuk pasar murah dan pelatihan?

Jawab: Dari 176 warga masyarakat yang mendapatkan kupon diskon ternyata semuanya di tukar pada saat pasar murah, dan semuanya diambil sendiri oleh yang berhak menerima, sehingga tidak ada kupon yang diambil oleh orang lain, atau mungkin dijual ke orang lain. Mengenai pelaksanaan kursus menjahit dan bordir, dari 20 orang semuanya tidak ada yang berhenti ditengah jalan.

21. Informan Sukarni (wawancara tanggal 24 Oktober 2006)

Bagaimanakah sambutan warga dalam pelaksanaan pasar murah?

Jawab: Pelaksanaan pasar murah sangat menggembirakan warga di sini, di samping masyarakat dapat hiburan, masyarakat juga diberi kesempatan untuk belanja murah

22. Informan Suparmi (wawancara tanggal 24 Oktober 2006)

Bagaimanakah sambutan warga dalam pelaksanaan pelatihan dalam bentuk kursus menjahit dan bordir?

Jawab: Warga sangat antusias untuk mengikuti kursus, bahkan ada yang kecewa karena tidak bisa ikut, kan jumlahnya terbatas hanya 20 orang.

23. Informan Hartanto (wawancara tanggal 23 Oktober 2006)

Apakah kendala yang timbul dalam pelaksanaan bidang sosial dalam hal pembagian kupon?

Jawab: Warga selalu memberikan masukan-masukan kepada panitia dalam melaksanakan kegiatan P2KP, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan pembagian kupon, karena hal tersebut sangat sensitif, jangan sampai nanti justru masyarakat bergejolak akibat ketidakpuasan dalam memberikan kupon.

24. Informan Tulus (wawancara tanggal 23 Oktober 2006)

Bagaimana evaluasi pelaksanaan P2KP?

Jawab: setelah selesai pelaksanaan proyek, panitia menyusun laporan dan dirapatkan di tingkat RT. Terlebih dahulu, sehingga laporan yang telah disusun tersebut ditanda tangani oleh panitia dan warga telah mendengarkan serta memberikan masukan-masukan seperlunya.

## CATATAN LAPANGAN 1

Tgl. wawancara : 8 Oktober 2006  
Key Informan : Mudiyo

### **Pertanyaan :**

Apa tujuan dari pemetaan swadaya?

### **Jawaban:**

Tujuan dari pemetaan swadaya adalah sebagai berikut:

25. Mendorong masyarakat membangun kebersamaan.
26. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat akan kondisi dan persoalan dihadapi.
27. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam melakukan proses identifikasi masalah, potensi, peluang, tantangan dan hambatan di dalam lingkungannya;
28. Mendorong kesadaran kritis masyarakat bahwa penyelesaian persoalan kemiskinan harus mengintegrasikan potensi semua pihak dan bertumpu pada potensi diri daripada tergantung pada bantuan luar;
29. Pembelajaran prinsip dan nilai melalui kegiatan pemetaan masalah kemiskinan dan potensi sumber masyarakat;
30. Menumbuhkan rasa tanggungjawab individu dan masyarakat untuk menyadari permasalahan nyata yang terjadi di wilayahnya; dan
31. Meningkatkan kepedulian dan kerelawan untuk mengatasi kondisi nyata di wilayahnya.

## **CATATAN LAPANGAN 2**

Tgl. wawancara : 10 Oktober 2006  
Informan 2 : Didik

### **Pertanyaan :**

Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan P2KP?

### **Jawaban:**

Sejak adanya sosialisasi P2KP setiap warga di sini menyambut gembira, dan selalu berperan aktif dalam pembentukan kepanitiaan dan relawan.

### **CATATAN LAPANGAN 3**

Tgl. wawancara : 10 Oktober 2006  
Informan 2 : Mujiman

**Pertanyaan :**

Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan P2KP?

**Jawaban:**

Walaupun kami hanya sebatas urun rembug, tapi kami sangat gembira merasa diuwongke dalam kegiatan P2KP ini. Khususnya dalam menyusun rencana kegiatan untuk dijadikan proposal.

## **CATATAN LAPANGAN 4**

Tgl. wawancara : 10 Oktober 2006  
Key Informan : Suyat

### **Pertanyaan :**

Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan P2KP?

### **Jawaban:**

Pada dasarnya warga di desa Langenharjo di sini sangat mudah untuk digerakkan terutama dalam membangun lingkungannya, terlebih dengan .....

## **CATATAN LAPANGAN 21**

Tgl. wawancara : 23 Oktober 2006  
Key Informan : Hartono

### **Pertanyaan :**

Apa bentuk kebersamaan masyarakat dalam membangun lingkungannya sendiri?

### **Jawaban:**

Rata-rata warga Langenharjo sangat mudah untuk diajak gotong royong melakukan kerja bakti, dan sebagian masyarakat di sini masih memiliki rasa pekewuh apabila tidak ikut kerja bakti bersama. Kesadaran warga masyarakat untuk membangun desanya sendiri dari dulu selalu terjaga, minimal 3 bulan sekali warga di sini mengadakan kerja bakti. Terlebih menjelang Agustusan.



## CATATAN LAPANGAN 22

Tgl. wawancara : 15 Nopember 2006  
Key Informan : Warso

**Pertanyaan :**

Bagaimana peran serta masyarakat dalam pendanaan proyek pembangunan lingkungan?

**Jawaban:**

Untuk pembangunan saluran air dan pengaspalan jalan setiap warga dibebani dana sebesar Rp.25.000,00 - Rp. 75.000,00 tergantung dari status sosial warga dalam masyarakat, artinya bagi warga yang dipandang mampu dibebani dana lebih besar dari warga yang kurang mampu. Penentuan besar kecilnya dana tersebut berdasarkan pada musyawarah warga yang dilaksanakan di RT. Masing-masing. Pada dasarnya saya pribadi merasa senang karena dengan sumbangan yang kecil, diperoleh hasil yang bermanfaat yaitu saluran air di desa ini jadi bersih dan lancar. Jalan yang tadinya banyak berlubang sekarang menjadi mulus.

## CATATAN LAPANGAN 23

Tgl. wawancara : 15 Nopember 2006  
Key Informan : Kasmidi

**Pertanyaan :**

Bagaimana peran serta masyarakat dalam pendanaan proyek pembangunan lingkungan?

**Jawaban:**

Untuk besarnya sumbangan, saya kena beban Rp. 40.000,- untuk pembangunan saluran air dan jalan. Kalau tanpa bantuan P2KP mungkin warga bisa kena sumbangan dua kali lipat. Tetapi dengan adanya proyek P2KP tersebut beban warga untuk membangun lingkungannya terutama saluran air dan pengaspalan jalan menjadi berkurang. Yang lebih menggembirakan lagi, dengan adanya proyek P2KP tersebut warga di sini mulai bergerak untuk bekerja bhakti bareng-bareng, yang mana kerja bhakti semacam ini sudah jarang sejak bong-bongan itu.

## CATATAN LAPANGAN 5

Tgl. wawancara : 16 Oktober 2006  
Key Informan : Agung Haryanto

**Pertanyaan :**

Bagaimanakah peran masyarakat dalam pemberian sumbangan?

**Jawaban:**

Saya sangat gembira melihat warga begitu bersemangat dalam melakukan kegiatan gotong royong, ternyata warga di sini menyambut baik proyek P2KP tersebut, khususnya pada pembangunan fisik. Demikian pula dalam penarikan dana dari masyarakat, ternyata dari dana swadaya yang direncanakan dapat tercapai dalam waktu yang tepat, sehingga pelaksanaan pembangunan saluran air dan pengaspalan jalan, dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya seperti terlihat sekarang itu.

## CATATAN LAPANGAN 6

Tgl. wawancara : 18 Oktober 2006  
Key Informan : Sugeng

**Pertanyaan :**

Bagaimanakah penyaluran dana bergulir di desa Langenharjo dalam implementasi perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan?

**Jawaban:**

Saya mempunyai usaha produksi karak, dengan modal yang sangat kecil tadinya hanya dapat memproduksi karak dengan bahan 10 Kg setiap hari, namun setelah kami mendapatkan bantuan dari P2KP, saya bisa memproduksi sampai 20 Kg, bahkan terkadang sampai 25 Kg perhari. Walaupun pinjaman tersebut hanya 12 bulan, namun pada prinsipinya saya merasa terbantu. Mudah-mudahan setelah dana tersebut saya kembalikan saya tetap dapat membuat karak dalam jumlah yang sama.

## CATATAN LAPANGAN 8

Tgl. wawancara : 19 Oktober 2006  
Key Informan : Dwi Radjiman

**Pertanyaan :**

Bagaimanakah penyaluran dana bergulir di desa Langenharjo dalam implementasi perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan?

**Jawaban:**

Dengan adanya bantuan dana bergulir P2KP sangat membantu dalam usaha saya membuat blangkon, dengan dana bergulir sebesar Rp.3.500.000,- dapat saya manfaatkan untuk menambah persediaan bahan, biasaya saya selalu ngambil bahan dengan cara “ngalap nyaur”, artinya kalau saya sudah bayar, saya baru dapat ambil bahan lagi, ya tentunya harganya cukup mahal. Tetapi dengan modal pinjaman yang berupa dana bergulir tersebut, saya sekarang dapat membeli bahan secara langsung, dan memilih bahan dengan harga yang sesuai.

## CATATAN LAPANGAN 9

Tgl. wawancara : 19 Oktober 2006  
Key Informan : Wasalah, SH

### **Pertanyaan :**

1. Bagaimanakah penyaluran dana bergulir di desa Langenharjo dalam implementasi perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan?
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan proyek P2KP dalam bentuk pasar murah dan pelatihan?

### **Jawaban:**

1. Warga masyarakat desa Langenharjo, khususnya yang tergolong dalam pengusaha kecil, sangat antusias, sebenarnya alokasi dana bergulir sebesar itu sangat kurang untuk menangani permasalahan perekonomian di desa Langenharjo. Bagi pengusaha kecil jumlah dana yang diterima tersebut tergolong besar. Dalam pengembalian dana bergulir, hingga saat ini masyarakat sangat konsekuen yaitu dengan mengangsur tepat waktu setiap bulannya.
2. Dari 176 warga masyarakat yang mendapatkan kupon diskon ternyata semuanya di tukar pada saat pasar murah, dan semuanya diambil sendiri oleh yang berhak menerima, sehingga tidak ada kupon yang diambil oleh orang lain, atau mungkin dijual ke orang lain. Mengenai pelaksanaan kursus menjahit dan bordir, dari 20 orang semuanya tidak ada yang berhenti ditengah jalan.

## CATATAN LAPANGAN 7

Tgl. wawancara : 18 Oktober 2006  
Key Informan : Sulastri

**Pertanyaan :**

Bagaimana sosialisasi dan prosedur pengajuan dana bergulir?

**Jawaban:**

Dana bergulir saya ketahui waktu saya arisan PKK di tempat bu Mulyani, begitu saya mendapat penjelasan tentang dana bergulir, saya buru-buru membuat proposal, setelah saya konsultasikan dengan Bu Tetijaya Ariani (ketua Unit Pengelola Keuangan/UPK) terus saya mendapat bantuan sebesar Rp.3.000.000,- pada tanggal 10 Juni 2006, dan Alhamdulillah angsuran saya setiap bulannya lancar-lancar saja.

## **CATATAN LAPANGAN 11**

Tgl. wawancara : 20 Oktober 2006  
Key Informan : Suwondo

**Pertanyaan :**

Bagaimana sosialisasi dan prosedur pengajuan dana bergulir?

**Jawaban:**

Saya mengetahui dana bergulir waktu pertemuan Bapak-Bapak di rumah Pak Mudiono, SE. kebetulan saya mempunyai kelompok usaha pembuatan batu bata, setelah saya sampaikan kepada anggota kelompok usaha saya, saya mengajukan ke UPK, selanjutnya tanggal 10 Juni 2006 saya mendapat dana bergulir sebesar Rp.3.000.000.



## **CATATAN LAPANGAN 10**

Tgl. wawancara : 19 Oktober 2006  
Key Informan : Suyati

**Pertanyaan :**

Apakah prosedur pengajuan bantuan dana bergulir proses cukup mudah?

**Jawaban:**

Prosedur dalam pengajuan pinjaman di P2KP ini bagi saya sangatlah mudah, karena tanpa agunan, dan bunganyapun sangat ringan sekali dibanding dengan meminjam ditempat lain, kami hanya dikenai bunga sebesar 1,5% perbulan. Antara waktu pengajuan dengan realisasi sekitar satu setengah bulan.

## CATATAN LAPANGAN 12

Tgl. wawancara : 22 Oktober 2006  
Key Informan : Minnurdin

**Pertanyaan :**

Apakah program P2KP telah dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru?

**Jawaban:**

Tadinya kami tidak memiliki kegiatan apa-apa, setelah adanya dana bergulir dari P2KP, kami mencoba mengajukan proposal untuk membuka usaha penjualan susu murni di kawasan Solo Baru, dan kami diberi dana pinjaman bergulir sebesar Rp. 3.500.000,- yang kami terima tanggal 10 Juni 2006, dana tersebut kami pergunakan untuk pengadaan tenda, meja, kursi, dan peralatan lainnya serta untuk modal lancar, sehari kami bisa menjual susu minimal 8 liter, memang untuk mengembalikan kami kadang terlambat, tapi tidak sering.

### **CATATAN LAPANGAN 13**

Tgl. wawancara : 22 Oktober 2006  
Key Informan : Rika Dhuha Ningrum

**Pertanyaan :**

Apakah dalam pelaksanaan dana bergulir masih terdapat kendala?

**Jawaban:**

Untuk pelaksanaan dana bergulir memang masih terdapat kendala, antara lain dari 23 KSM, ada 3 atau 4 KSM yang kadang tidak tepat melakukan angsuran, tapi kami juga maklum mungkin mereka baru pertama kali melakukan usaha, kebetulan KSM yang sering terlambat melakukan angsuran tersebut adalah KSM yang baru pertama kali melakukan usaha, yang penyelesaiannya kami harus datang ke KSM. Baiknya sampai saat ini tidak ada dana bergulir yang macet sama sekali.

## **CATATAN LAPANGAN 16**

Tgl. wawancara : 24 Oktober 2006  
Key Informan : Walidi

### **Pertanyaan :**

Bagaimanakah sambutan dari pelaksanaan program P2KP dalam bentuk pasar murah?

### **Jawaban:**

Kami sangat senang dengan pemberian kupon potongan sebesar 40% walaupun jumlahnya sedikit, tetapi lumayanlah untuk orang kecil semacam kami, sebenarnya kami sangat mengharap pasar murah ini dilaksanakan sering-sering, tapi gimana wong itu semua yang ngatur pemerintah.

## **CATATAN LAPANGAN 14**

Tgl. wawancara : 23 Oktober 2006  
Key Informan : Sastro Wiyono

**Pertanyaan :**

Bagaimanakah sambutan dari pelaksanaan program P2KP dalam bentuk pasar murah?

**Jawaban:**

Wah ya senang to, wong dapat diskon 40%, cuma sayangnya hanya sekali.

## **CATATAN LAPANGAN 15**

Tgl. wawancara : 23 Oktober 2006  
Key Informan : Sri Lestari

**Pertanyaan :**

Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan menjahit dan bordir?

**Jawaban:**

Wah saya sangat senang mengikuti kursus di Balai Desa, habis gratis, dan memang saya kepingin bisa membuat baju sendiri itu sudah lama sekali, apalagi diajari bordir segala, walaupun bordirnya hanya sedikit, tapi saya merasa senang, dan saya berharap pelatihan semacam ini dapat ditingkatkan.

## **CATATAN LAPANGAN 17**

Tgl. wawancara : 24 Oktober 2006  
Key Informan : Sukarni

**Pertanyaan :**

Bagaimanakah sambutan warga dalam pelaksanaan pasar murah?

**Jawaban:**

Pelaksanaan pasar murah sangat menggembirakan warga di sini, di samping masyarakat dapat hiburan, masyarakat juga diberi kesempatan untuk belanja murah.

## **CATATAN LAPANGAN 18**

Tgl. wawancara : 24 Oktober 2006  
Key Informan : Suparmi

**Pertanyaan :**

Bagaimanakah sambutan warga dalam pelaksanaan pelatihan dalam bentuk kursus menjahit dan bordir?

**Jawaban:**

Warga sangat antusias untuk mengikuti kursus, bahkan ada yang kecewa karena tidak bisa ikut, kan jumlahnya terbatas hanya 20 orang.



## **CATATAN LAPANGAN 19**

Tgl. wawancara : 23 Oktober 2006  
Key Informan : Hartanto

**Pertanyaan :**

Apakah kendala yang timbul dalam pelaksanaan bidang sosial dalam hal pembagian kupon?

**Jawaban:**

Warga selalu memberikan masukan-masukan kepada panitia dalam melaksanakan kegiatan P2KP, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan pembagian kupon, karena hal tersebut sangat sensitif, jangan sampai nanti justru masyarakat bergejolak akibat ketidakpuasan dalam memberikan kupon.

## **CATATAN LAPANGAN 20**

Tgl. wawancara : 23 Oktober 2006  
Key Informan : Tulus

**Pertanyaan :**

Bagaimana evaluasi pelaksanaan P2KP?

**Jawaban:**

Setelah selesai pelaksanaan proyek, panitia menyusun laporan dan dirapatkan di tingkat RT. Terlebih dahulu, sehingga laporan yang telah disusun tersebut ditanda tangani oleh panitia dan warga telah mendengarkan serta memberikan masukan-masukan seperlunya.